



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III Berisi :

- A. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi
- 3.1. Capaian IKU Pemerintah Provinsi Jambi s.d. tahun 2014
- 3.2. Evaluasi & Analisis Capaian Perjanjian Kinerja
- 3.3. Capaian Kinerja Lainnya
- B. Realisasi Anggaran

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Povinsi Jambi untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan monitoring dan evaluasi kinerja adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja yang berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam me-reviu kinerja organisasi pemerintah.

A. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan /program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran diukur berdasarkan pada data hasil pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran.

Jika dilihat bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan LKj ini. Kriteria pengukuran kinerja yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala nilai capaian kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≥100	Sangat baik	
2.	76 s.d. 90	Tinggi	
3.	66 s.d. 75	Sedang	
4.	51 s.d. 65	Rendah	
5.	s.d. 50	Sangat rendah	

Sumber : Permendagri 54 tahun 2010, diolah.

Indikator dan target yang ingin dicapai Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015, antara lain :

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama s.d. 2014

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun 2014. Pencapaian IKU Gubernur Jambi s.d. tahun 2014 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Tabel 3.2. Capaian IKU Gubernur Jambi s.d. Tahun 2014

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	2011	2012	2013	2014			Target 2015
					Target	Realisasi	% Capaian	
1. Persentase jalan dalam kondisi mantap (baik)	68,98 (1.037Km)	71,42	72,83	74,11	71	74,82	105,38	75
2. Rasio elektrifikasi	49,59	53,45	65,48	67,11	75	72,57	96,76	82
3. Persentase pengembangan energi baru terbarukan	48,90	55,13	61,26	72,50	84,61	87,93	103,92	88
4. Persentase fungsionalisasi luas daerah irigasi	60,62	60,62	52,50	60,62	65,52	77,39	118,12	66,35
5. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	44,32	44,32	44,62	42,72	62,90	42,72	67,92	68,87
6. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	40,93	50,65	52,79	53,70	60,27	53,70	89,10	62,41
7. Angka partisipasi murni (APM)								
SD :	95,6	92,36	94,1	96,43	99,5	98,4	98,89	100
SMP :	66,9	67,43	69,56	72,73	87	69,87	80,31	90
SMA :	45,7	48,55	46,42	51,77	65	74,93	115,27	78



Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	2011	2012	2013	2014			Target 2015
					Target	Realisasi	% Capaian	
8. Prevalensi kekurangan gizi pada balita (kasus balita gizi buruk tertangani)	100%	100%	100% (63 kasus)	100% (6 kasus)	100%	100% (79 kasus)	100%	100%
9. Persentase puskesmas berkinerja baik	50	50	60	36,4	70	50	71,42	85
10. Persentase menurunnya rumah tangga sangat miskin (RTSM)	8,34	7,9	8,28	8,42	8,30	8,39	97,73	5
11. Indeks Pembangunan Manusia	72,74	73,3	73,78	74,20	74	74,35	100,47	74,5
12. Nilai investasi PMA	USD Juta 448,4	USD Juta 621,37	USD Juta 827,85	USD Juta 984,45	USD Juta 1.001,2	USD Juta 1.015,5	101	USD Juta 1.161,35
13. Nilai investasi PMDN	Rp 11,2 T	Rp 15,23 T	Rp 19,93 T	Rp 25,17 T	Rp 16,52 T	Rp 26,62 T	161	Rp 18,26 T
14. Nilai Ekspor	USD.000 1.209.672	USD.000 2.383.555	USD.000 1.659.055	USD.000 1.354.135	USD.000 1.800.000	USD.000 1.282.430	71,25	USD.000 2.000.000
15. Persentase koperasi berkualitas (berprestasi)	69,49	71,50	72	73,50	73,50	72,6	98,77	78
16. Peningkatan pelaku usaha mikro kecil menengah	65.240	67.825	79.119	81.552	81.570	81.595	100,03	82
17. Laju inflasi provinsi	10,42	2,76	4,22	8,74	6,12	8,72	70,2	5,53
18. Pertumbuhan kunjungan wisata	1.110.000	1.130.893	1.287.471	1.444.049	1.450.000	1.530.056	105,52	1.554.319
19. Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	14,53	14,94	15,78	16,98	17,5	18,7	106,85	19
20. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	29,6	29,4	29,6	29,83	28,5	27,8	97,54	28-28,5
21. Nilai tukar petani	96	96,01	89,45	96,2	97	94,71	97,63	104 – 106
22. Ketersediaan energi/kap/perhari dan Persentase pola pangan harapan (PPH)	1.929 gr/kap/hr	1.960 gr/kap/hr	1.896 gr/kap/hr	1.957 gr/kap/hr	2.000 gr/kap/hr	1.957 gr/kap/hr	97,85	2.000 gr/kap/hr
23. Penurunan titik api (penganganan hot spot)	623	1.784	1.414	1.551	800 (dari 1.152 titik)	989	123,62	300
24. Persentase luasan lahan tertutup pohon (rehabilitasi lahan kritis)	64,80 (1.120.355 Ha)	64,80 (1.120.510 Ha)	64,80 (1.120.555 Ha)	64,81 (1.120.655 Ha)	64,815 (1.120.655Ha a)	64,812 (1.120.655Ha a)	99,9	65,5 (1.120.855 Ha)
25. Penurunan emisi gas rumah kaca	2,5 MtCO2	3,45 MtCO2	6,90 MtCO2	10,25 MtCO2	12,00 MtCO2	12,70	100,7	17,25 MtCO2
26. Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	100	WTP
27. Aksi daerah pemberantasan korupsi Provinsi Jambi dan Kab/Kota	Prov. - Kab/Kota -	Prov. - Kab/Kota -	Prov. - Kab/Kota -	Prov. - Kab/Kota -	Prov : 100 (8 aksi hijau) Kab/Kota : 75	Prov : 100 (8 aksi hijau) Kab/Kota : 70	100 93,3	100 100
28. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jambi	-	-	-	76,89 (B)	77 (B)	77,61 (B)	100,79	> 85 (A)
29. Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemprov Jambi	C (44,32)	C (44,71)	CC (50,95)	CC 56,71	B (65)	CC (59,36)	91,32	B (65)
30. Persentase kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	96	96,06	96,33	97,4	97,5	97,43	99,92	97,5



Dari 30 Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Jambi tahun 2014, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa hampir keseluruhan capaian IKU mendapatkan kriteria sangat baik. IKU yang masuk dalam kriteria sangat baik yakni sebanyak 25 IKU dengan presentase rata-rata di atas 91%. IKU yang mendapatkan persentase yang sangat baik yakni indikator penurunan titik api sebesar 123,62% (target pemadaman 800 titik api, mampu realisasikan 989 titik api, dari jumlah keseluruhan titik api sebanyak 1.152 titik, dengan sisa 163 titik api lainnya yang padam karena faktor alam yakni hujan). Disusul IKU Persentase fungsionalisasi daerah irigasi dengan capaian sebesar 118,12%. Selain itu juga 1 indikator dengan capaian tinggi dengan perolehan capaian 89,10% adalah indikator Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan.

Sedangkan IKU yang masuk dalam kriteria penilaian sedang yakni Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan dengan capaian hanya 67,92%, disusul IKU angka laju inflasi yang ditargetkan sebesar 6,12 terealisasi lebih besar menjadi 8,72% yang mengakibatkan tingkat penurunan inflasi tidak tercapai dengan presentase capaian sebesar 70,2%. Selain itu, indikator yang juga masuk dalam capaian sedang ini adalah indikator peningkatan nilai ekspor yang tidak sesuai target yakni sebesar USD1.800.000 hanya terealisasi sebesar USD1.282.430, dengan capaian sebesar 71,25%.

Beberapa IKU yang diuraikan di atas, penetapan target dan pengukuran realisasi dilakukan dengan menggunakan proxy indicator karena karakter indikator yang spesifik, termasuk tentang metode pengukuran indikator. Indikator yang dimaksud dan penjelasan mengapa dipergunakan proxy indicator adalah sebagai berikut :

1. Sebagian indikator merupakan indikator pada *level outcome*, dimana pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, belum tentu akan berkontribusi pada pencapaian target kinerja IKU secara langsung, seperti IKU yang ketiga serta beberapa IKU lainnya.
2. Sebagian indikator mempergunakan data yang dihasilkan oleh pengukuran secara periodik oleh lembaga di luar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, yang biasanya dilakukan sekali dalam setahun. Indikator yang masuk dalam kategori ini adalah Laju Inflasi, Kontribusi sektor pariwisata dan sektor pertanian terhadap PDRB, Angka Partisipasi Murni, Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap air bersih dan sanitasi layak, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Opini Pemeriksaan BPK, dan AD-PPK, serta beberapa indikator lainnya.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. Beberapa sasaran strategis yang terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis ini.

1. Sasaran Kualitas Ketersediaan Infrastruktur Daerah Meningkat

Indikator Kinerja Persentase Jalan Provinsi Jambi Dalam Kondisi Mantap (Baik)

Dalam rangka mendukung aktivitas sosial ekonomi daerah, kesiapan infrastruktur merupakan salah satu aspek penentu arah dan perkembangan dinamika sosial, aktivitas ekonomi serta fungsi-fungsi distribusi. Arah pembangunan infrastruktur ditujukan pada upaya mengakselerasi perkembangan daerah secara menyeluruh dengan memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana yang belum sebanding dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Secara finansial pemenuhan infrastruktur memang belum mampu menjangkau pendekatan suplai yang bertujuan merangsang investasi. Namun dengan kemampuan terbatas, upaya berkelanjutan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat terus dilakukan melalui langkah-langkah peningkatan, pemeliharaan serta perbaikan tata kelola yang diharapkan mampu memacu terciptanya efisiensi dan efektivitas pembangunan secara luas dan merangsang tumbuh kembangnya perekonomian di Provinsi Jambi.



Infrastruktur pekerjaan umum merupakan salah satu urusan wajib prioritas dalam kebijakan pembangunan Provinsi Jambi yang menjadi bagian penopang utama peningkatan perekonomian dan kemandirian daerah. Perhatian ini telah dinyatakan sebagai salah satu prioritas utama dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2010-2015, serta terlihat jelas dalam pengalokasian anggaran daerah, dimana porsi terbesar memang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pekerjaan Umum.

Penanganan infrastruktur di Provinsi Jambi pada Tahun 2014 difokuskan pada program pembangunan jalan dan jembatan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan yang bertujuan untuk meningkatkan arus barang dan jasa serta mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah. Total implementasi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, dimana jalan yang harus ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jambi adalah sepanjang 1.504,929 (seribu lima ratus empat koma sembilan ratus dua puluh sembilan) kilometer.

Dalam rangka mewujudkan jalan Provinsi Jambi dalam kondisi “mantap” (kondisi jalan dengan kualitas baik dan sedang), maka telah dilaksanakan Program pembangunan jalan dan jembatan periode RPJMD 2010-2015 dengan anggaran yang didistribusikan menggunakan pendekatan kewilayahan dimana Provinsi Jambi dibagi menjadi 7 wilayah yang terdiri dari:

1. Wilayah I (Kabupaten Tanjab Barat),
2. Wilayah II (Kab. Tanjab Timur dan Ma. Jambi),
3. Wilayah III (Kab. Bungo),
4. Wilayah IV (Kab. Batanghari dan Ma. Jambi),
5. Wilayah V (kab. Merangin),
6. Wilayah VI (Kab. Kerinci) dan
7. Wilayah VII (Kab. Sarolangun).

Gambar 3.1. Kondisi Jalan Mantap



Salah satu prioritas penanganan infrastruktur jalan adalah membuka keterisolasian wilayah-wilayah produksi pertanian utama yang berada di wilayah Barat dan Tengah Provinsi Jambi. Hal ini bertujuan secara tidak langsung untuk mengurai kemendegan (*bottlenecking*) yang selama ini dianggap menjadi faktor utama rendahnya Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi dan fluktuasi inflasi perdesaan. Oleh karena itu, prioritas penanganan jalan dan jembatan tahun 2014 adalah Peningkatan Ruas Jalan Bts. Kerinci – Sanggaran Agung – Sei. Penuh (Multy Years), Sei. Penuh – Bts. Sumbang/Tapan, Pelawan – Sei. Salak – Pekan Gedang – Ma. Talang, Jalan Simp. Pudak – Suak Kandis – Desa Simpang, Tempino – Muara Bulian dan Jalan Ma. Tebo – Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung. Program prioritas tersebut menyerap alokasi 40,45 % dari total APBD Kebinamargaan Provinsi Jambi. Sisanya tersebar di seluruh ruas jalan lainnya. Selain itu, juga dilaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan yang tersebar di Kabupaten/kota.

Secara keseluruhan, penanganan jalan dan jembatan yang telah dilaksanakan yaitu : peningkatan jalan efektif 115,0 km atau 7,642% dari total panjang jalan Provinsi yang dan pelaksanaan pekerjaan fungsional sepanjang 121,0 km atau 8,040% dari total panjang jalan Provinsi. Dengan total penanganan jalan hanya sepanjang 236,0 km, atau 15,682% terindikasi bahwa APBD 2014 masih jauh dari rasio kecukupan. Padahal di sisi lain laju kerusakan masih cukup tinggi terkait adanya eksploitasi sumberdaya alam yang penanganannya tidak dapat hanya mengandalkan pemeliharaan semata. Kenyataan ini dapat dilihat dari kondisi jalan hingga bulan Desember 2014 sebagai berikut :



Tabel 3.3. Kondisi Jalan Provinsi Jambi Tahun 2014

Total Panjang Jalan Provinsi 1.504,929Km	Kondisi Jalan Provinsi Jambi : Km			
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
	595,568 Km (39,57%)	530,526 Km (35,253%)	242,969 Km (16,145%)	135,866 Km (9,028%)

Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2013 jalan dengan Kondisi Baik saat itu sepanjang 586,418 Km atau (38,966%), Sedang 528,926 Km atau 35,146%, Rusak Ringan 249,544 Km atau 16,582% dan Rusak Berat 140,041 Km atau 9,305%.

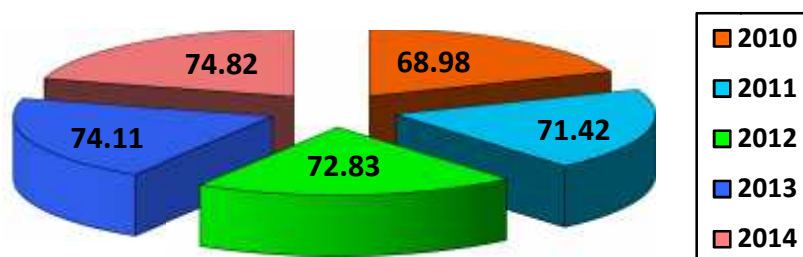
Persentase kenaikan terbesar adalah jalan yang berkondisi baik pada tahun 2014 dengan kenaikan sebesar 0,61% dibanding kondisi Desember 2013. Sedangkan jalan yang berkondisi rusak berat turun sebesar 0,27% dibanding periode yang sama tahun 2013. Berdasarkan analisa, rumusan kelayakan rasio kecukupan yang ideal sesuai target RPJM dengan laju kerusakan seperti saat sekarang adalah 20 : 80, atau 300,986 km pekerjaan efektif dan 1.203,943 km pekerjaan fungsional/pemeliharaan.

Menghitung kemampuan pekerjaan efektif rata-rata beberapa tahun terakhir yang hanya sejumlah 115 kilometer atau hanya sebesar 7,64%, maka pemenuhan pencapaian target peningkatan kondisi mantap sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD yaitu dari target 75% dapat terpenuhi. Disamping itu sejak tahun 2012 telah disusun strategi penanganan jalan melalui pemanfaatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum yang bertindak selaku unit pemeliharaan rutin jalan serta berkolaborasi dengan penempatan mandor-mandor jalan yang bertanggungjawab terhadap pengawasan jalan per 20 km. Diharapkan strategi ini dapat memelihara lokasi-lokasi fungsional jalan dalam kondisi baik sehingga optimalisasi anggaran dapat segera dicapai.

Sedangkan untuk penanganan jembatan selama tahun 2014 yang meliputi : Pembangunan Jembatan Gantung di Angso Duo (Jembatan Pedestrian) sepanjang 491,5 Meter selesai pada tahun 2014 melalui kontrak Multy Years. Dan pemeliharaan rutin jembatan provinsi sebanyak 10 (sepuluh) unit yang tersebar di seluruh jalan Provinsi Jambi.

Selain itu, dengan diterbitkannya kebijakan pengaturan pengangkutan batubara, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi, telah menurunkan laju kerusakan jalan publik, yang selanjutnya meringankan biaya pemeliharaan jalan yang sangat besar dan mengurangi beban APBD. Oleh karena itu, perlunya dukungan dan komitmen bersama semua pihak agar dapat mengawasi jalannya Peraturan Daerah ini secara efektif.

Gambar 3.2. Peningkatan Kondisi Infrastruktur Jalan Provinsi Jambi Dalam Kondisi Mantap



Dari gambar di atas, terlihat perkembangan peningkatan jalan wilayah provinsi Jambi dalam kondisi mantap dari tahun ke tahun. Dengan kondisi jalan wilayah provinsi Jambi pada awal RPJMD sebesar 68,98%, terjadi peningkatan sebesar 2,44% pada tahun 2011, dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2012 sebesar 1,41% serta peningkatan cukup berarti dicapai pada tahun 2013 dan 2014 masing-masing 0,82 dan 1,32%.



Tabel 3.4. Perbandingan dan Capaian Kinerja Peningkatan Jalan Provinsi Jambi Dalam Kondisi Mantap Tahun 2010 s.d. 2014

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Periode capaian kinerja			Capaian Kinerja			Capaian Target s.d. 2014	Target Akhir RPJMD
			2011	2012	2013	2014		% Capaian		
						Target	Realisasi			
1.	Persentase Jalan Provinsi Jambi Dalam Kondisi Mantap	68,98	71,42	72,83	73,50	74	74,82	101,10	74,82	75
	(Panjang Jalan 1.504,929 Km)	971,24 Km	1.005,59 Km	1.093,78 Km	1.106,2 Km	1.113,65 Km	1.125,99 Km		1.125,99 Km	1.135,77 Km

Sumber : Dinas PU Provinsi Jambi & Hasil pengolahan data tahun 2015

Upaya mengantisipasi tingginya tingkat kerusakan jalan di Provinsi Jambi, diperlukan adanya optimalisasi pemanfaatan alat berat milik Pemerintah. Hingga tahun 2014, Pemerintah telah memiliki alat berat yang siap pakai. Disadari bahwa banyak permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya adalah menghitung kemampuan pekerjaan efektif peningkatan jalan rata-rata beberapa tahun terakhir yang hanya sejumlah 135 kilometer atau hanya sebesar 9,02%, hal ini memperlihatkan betapa rendahnya kemampuan APBD untuk memberikan keyakinan pemenuhan pencapaian target peningkatan kondisi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD yaitu dari target 75% hanya tercapai 74,82%. Hal ini berarti masih ada sebesar 0,18% lagi target kinerja yang harus dituntaskan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

Dampak positif dari meningkatnya infrastruktur jalan Provinsi Jambi, yakni telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan pariwisata Provinsi Jambi. Peningkatan pertumbuhan industri dan perdagangan berdampak pada terkendalinya kondisi ketersediaan stock dan harga kebutuhan pangan. Kondisi jalan baik ini, memberikan dampak terhadap peningkatan mobilitas hasil-hasil pertanian dan hasil-hasil bumi lainnya dari sentra produksi ke sentra-sentra pemasaran. Misalnya, sebelum dilakukan pembangunan ruas jalan Simpang Pulau Rengas-Jangkat waktu tempuh biasa sampai 10 jam bahkan lebih. Saat ini, dapat ditempuh hanya dalam waktu 3 jam.

Disamping itu, biaya angkut produksi lebih murah, yaitu sebesar 400-500 rupiah per kilogram sedangkan biaya angkut sewaktu kondisi jalan masih buruk sebesar 2000 rupiah per kilogram. Demikian pula untuk ruas jalan Bangko-Kerinci telah mulai ditangani pada APBD-Perubahan Provinsi Jambi tahun 2014, melalui tahun jamak dan diperkirakan selesai 2015. Penangan jalan ini, disamping APBD Provinsi juga didukung melalui APBN.

Dampak lainnya juga dapat terlihat dalam ruang lingkup pariwisata, salah satu indikator pendukung keberhasilan yang tergambar adalah adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan perkembangan usaha pariwisata di Provinsi Jambi. Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2011 sebanyak 8.543 orang (10,22%) dan pada tahun 2012 juga mengalami peningkatan mencapai 9231 orang (8,05%) sedangkan pada tahun 2013 meningkat menjadi 9.919 orang (6,94%), dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 10.056 orang. Begitupun untuk kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) pada tahun 2011 jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.122.350 orang (17,19%), tahun 2012 kunjungan wisatawan nusantara meningkat sebanyak 1.278.240 wisatawan (13,89%), dan untuk tahun 2013 kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 1.434.130 wisatawan (meningkat 10,87%) dan pada tahun 2014 menjadi 1.520.000 (5,99%) orang. Kondisi ini membuktikan bahwa semakin membaiknya akses infrastruktur jalan menuju tempat-tempat wisata sangat mempengaruhi tingkat kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara, dan secara tidak langsung pula berdampak pada tumbuhnya industri pariwisata serta mendongkrak perekonomian industri kecil di Provinsi Jambi.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan peningkatan infrastruktur daerah. Dalam tahun 2014, program yang dilakukan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 7 program, yakni :



1. Program pembangunan jalan dan jembatan
2. Program inspeksi jalan dan jembatan
3. Program tanggap darurat jalan dan jembatan
4. Program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan
5. Program pembebasan lahan untuk jalan dan jembatan
6. Program pengembangan lalu lintas angkutan umum
7. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Permasalahan :

1. Pelaksanaan program peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang dijabarkan dalam implementasi kegiatan, merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2014 ini, Permasalahan yang paling mendasar adalah masih relatif terbatasnya jumlah anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur sehingga penanganan kegiatan dilakukan secara bertahap dan terkesan tidak tuntas.
2. Pelaksanaan pelelangan paket kegiatan peningkatan infrastruktur jalan masih terkendala pada teknis administratif yang pada umumnya terkadang tidak tepat waktu mulai dari penetapan DPA SKPD hingga proses pelaksanaan kegiatan, sehingga berimbas pada terhambatnya pelaksanaan pekerjaan pembenahan infrastruktur jalan.

Solusi :

1. Terbatasnya anggaran dalam pembangunan infrastruktur terutama jalan merupakan masalah yang dialami oleh sebagian daerah berkembang di Indonesia, untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Provinsi Jambi diharapkan dapat mengukur kemampuan keuangan daerah dalam hal proporsi peningkatan infrastruktur jalan. Setelah didapat analisis kemampuan anggaran tersebut, maka ditentukan skala prioritas pembangunan jalan terutama bagi daerah-daerah yang menjadi jalur-jalur sentra produksi pertanian, perkebunan, tanaman pangan serta sektor-sektor lain yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi.
2. Untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan pada tahun-tahun yang akan datang, maka perlu upaya pelelangan paket-paket pekerjaan yang lebih dipercepat untuk memberikan ruang dan waktu perencanaan terhadap implementasi pekerjaan yang lebih baik tentunya tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat sesuai aturan yang berlaku pada proses lelang sehingga pelaksanaan peningkatan infrastruktur jalan dapat dilaksanakan tepat waktu.

2. Sasaran Pembangunan Infrastruktur Energi Dan Listrik Meningkat

Menyadari bahwa pembangunan infrastruktur energi dan listrik mempunyai akses yang luas terhadap publik, maka Pemerintah Provinsi Jambi telah membuat rencana dan menetapkan target kinerja energi dan listrik. Mengingat sampai 2014 masih terdapat beberapa desa di Provinsi Jambi yang belum teraliri listrik, sementara fasilitas listrik merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat sehingga Pemerintah Provinsi Jambi memprioritaskan desa-desa yang teraliri listrik dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Untuk itu, dalam mewujudkan capaian kinerja menyangkut infrastruktur listrik ditetapkan indikator sebagai variabel ukuran capaian kinerja, yakni Rasio Elektrifikasi.

a. Rasio Elektrifikasi

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk mendukung keberhasilan capaian kinerja peningkatan rasio elektrifikasi, maka dalam Program Pengembangan energi dilakukan dengan melaksanakan berbagai upaya, antara lain :



1. Menginventarisasi dan melakukan pembinaan Desa Mandiri Energi, yang bertujuan untuk penyediaan data potensi Energi Baru Terbarukan dan terbinanya desa mandiri Energi sehingga tersedia energy alternatif guna mengurangi penggunaan BBM.
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pembangunan biogas.
3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pembangunan PLTMH di Kabupaten Sarolangun.
4. Menginventarisir desa belum berlistrik di provinsi Jambi.
5. Melaksanakan study kelayakan potensi mikrohidro (PLTMH).
6. Melakukan perbaikan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) dan pembangkit tenaga kincir air di Kabupaten Bungo.

Gambar 3.3. Elektrifikasi Provinsi Jambi



Provinsi Jambi dengan jumlah penduduk lebih kurang 3.317.034 jiwa dan yang memperoleh aliran listrik dari PT. PLN (Persero) mencapai 56,4% dengan total pelanggan 542ribu pelanggan. Sistem kelistrikan di Propinsi Jambi sudah terintegrasi dengan Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu. Disamping itu masih terdapat kebutuhan tenaga listrik di Propinsi Jambi yang disuplai dengan sistem yang terisolasi. Beban puncak untuk sistem integrasi di Jambi mencapai 60 MW dan sistem yang terisolasi dengan perkiraan beban puncak 28 MW dengan total konsumsi listrik mencapai 497 GWH. Kapasitas terpasang sistem terisolasi mencapai 147 MW yang disuplai dengan PLTD. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Propinsi Jambi, juga disuplai dengan captive power yang diperkirakan mencapai 280 MVA, yang terdiri dari pembangkit utama sebesar 225 MVA dan 55 MVA sebagai cadangan. Sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dan rencana tata ruang daerah telah diperuntukan beberapa daerah sesuai keperluannya seperti daerah pariwisata terdapat di Jambi Bagian Barat, lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan diperuntukan di Propinsi Jambi Bagian Tengah, Jambi Bagian Timur telah dikembangkan menjadi daerah kawasan industri.

Sektor energi merupakan sektor vital pendukung pembangunan daerah, dengan semua keterbatasan yang ada, maka tidak semua desa di Provinsi Jambi dapat dialiri listrik PLN. Oleh karena itu, dalam rangka penyediaan energi khususnya pada desa-desa yang tidak terjangkau oleh aliran PT. PLN, hingga saat ini telah terbangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro beserta jaringannya dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Hal tersebut tentu saja berdampak pada peningkatan Rasio Elektrifikasi Desa di Provinsi Jambi yang mencapai 72,57 persen, meningkat sebesar 4,82 persen dari tahun 2012 yang mencapai 67,11 persen.

Untuk melihat sejauhmana perkembangan jumlah pembangunan, pengembangan, dan pemberdayaan energi dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.5. Jumlah Desa yang Ter-aliri listrik PLN tahun 2013

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Berlistrik <i>Electrical</i>	Belum Berlistrik <i>Unelectrical</i>	Jumlah <i>Total</i>	Persentase Desa Berlistrik <i>Percentage</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kerinci	209	203	412	67, 28
2. Merangin	129	79	208	68, 55
3. Sarolangun	83	52	135	61, 17
4. Batang Hari	92	20	112	66, 02
5. Muaro Jambi	119	33	152	70, 29
6. Tanjab Timur	68	22	90	71, 52
7. Tanjab Barat	27	38	65	67, 89
8. Tebo	83	18	101	56, 02
9. Bungo	98	35	133	50, 52
10. Kota Jambi	62	-	62	100,
11. Kota Sungai Penuh	69	69	138	75, 07
Jumlah/ Total 2013	1 039	569	1 608	64,61

Sumber : Jambi Dalam Angka Tahun 2014

Berbagai upaya dalam pengembangan energi yang telah dilakukan tersebut, saat ini telah terinventarisir dan tersedia data potensi desa yang mempunyai bahan nabati serta terbinannya masyarakat desa mandiri energi, serta terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana energi sambungan listrik. Lebih lanjut mengenai rasio elektrifikasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6. Perbandingan dan Capaian Kinerja Rasio Elektrifikasi Tahun 2010 s.d. 2014

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Periode capaian kinerja			Capaian Kinerja			Capaian Target s.d. 2014	Target Akhir RPJMD
			2011	2012	2013	2014		% Capaian		
						Target	Realisasi			
1.	Persentase rasio elektrifikasi	49,59	53,45	65,48	67,11	75	72,57	96,76	72,57	82

Sumber : Dinas ESDM & Hasil pengolahan data tahun 2014

Dari tabel tersebut dapat dilihat capaian target rasio elektrifikasi pada tahun 2014 belum mencapai target 75% dengan tingkat capaian sebesar 72,57% menuju pencapaian target RPJMD yakni sebesar 82%. Dampak positif dari peningkatan rasio elektrifikasi tersebut adalah semakin maju dan berkembangnya masyarakat yang mendapatkan informasi serta menjadikan masyarakat yang tersambung jaringan elektrifikasi menjadi lebih produktif dengan menumbuhkan industri-industri rumah tangga yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi industri kecil.

b. Peningkatan Energi Baru Terbarukan

Upaya peningkatan rasio elektrifikasi tentunya tidak terlepas dari peningkatan energi baru terbarukan. Dalam rangka memenuhi kecukupan energi di Provinsi Jambi, pada tahun 2012 lalu telah dibangun Kerinci Hydro Power oleh PT Bukaka Teknik Energy dengan kapasitas 350 MW di Batang Merangin Kabupaten Kerinci. Sampai dengan bulan Desember 2014 ini telah terbangun 13 unit PLTMH di Provinsi Jambi, sumber elektrifikasi lainnya juga berasal dari pemanfaatan tenaga surya



Gambar. 3.4. PLTS

dengan jumlah pemanfaatan peralatan tenaga surya sebanyak 6.112 unit. Selain itu, pada tahun 2014 ini masih berlanjut pengembangan eksploitasi dan uji sumur produksi oleh PT Pertamina Geothermal Energy, disamping itu masih terus dilakukan eksplorasi terhadap potensi geothermal di lokasi sekitarnya.

Untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga, juga dilakukan upaya pembangunan Digester Biogas yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2010. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan pembangunan Biogas dalam rangka memanfaatkan kotoran sapi sebagai sumber energi alternatif. Adapun perkembangan

pembangunan PLTMH, PLTS, dan Digester Biogas di Provinsi Jambi sebagai berikut :

Tabel 3.7. Peningkatan Jumlah Pengembangan Energi Baru Terbarukan

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Periode capaian kinerja			Capaian Kinerja			Capaian Target s.d. 2014	Target Akhir RPJMD
			2011	2012	2013	2014		% Capaian		
						Target	Realisasi			
1.	Persentase pengembangan energi baru terbarukan	48,90	55,13	61,26	72,50	84,61	87,93	103,92	87,93	88
	Jumlah PLTMH	9 unit 60%	10 unit 66,67%	11 unit 74%	13 unit 86,67%	13 unit 86,67%	13 unit 86,67%	100	13 unit 87%	15
	Jumlah PLTS (unit)	5.649 80,70%	6.069 86,70%	6.073 86,76%	6.077 86,82%	6.100 87,15	6.098 87,12%	98	6.098 87,12%	7.000 unit
	Jumlah Digester Biogas (unit)	6 6%	12 12%	23 23%	44 44%	80 80%	90 90%	110	90 90%	100

Hasil pengolahan data 2015

Jika dibandingkan dengan target sasaran dalam RPJMD Provinsi Jambi, di tahun 2014 ini total jumlah PLTMH berjumlah 13 unit, ini berarti masih tersisa 2 target pembangunan PLTMH yang harus diwujudkan dari target yang akan dicapai secara keseluruhan di tahun 2015 yakni sebanyak 15 PLTMH. Ini berarti pencapaian sasaran RPJMD telah menyentuh angka 87%, begitu pula dengan peningkatan PLTS dan Digester. Berbagai survei, pembangunan/pengembangan, serta pembinaan telah dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber pembangkit listrik dari energi baru terbarukan di wilayah Provinsi Jambi.

Dalam rangka peningkatan dan pemanfaatan energi baru terbarukan, pemanfaatan Biogas juga semakin digalakkan di wilayah kota maupun pedesaan. Teknologi biogas merupakan teknologi tepat guna untuk mengolah limbah padat (tinja dan isi rumen) dan limbah cair (urine dan air pencucian kandang/ternak) yang dihasilkan dari usaha peternakan. Pengolahan yang dilakukan dapat mengurangi pencemaran lingkungan serta memanfaatkan limbah sebagai produk berdaya guna penghasil sumber energi berupa bahan bakar gas (gasbio) dan dapat pula menghasilkan pupuk organik padat dan cair yang bermutu bagi usaha pertanian. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan pembinaan dan pembangunan unit biogas yang berlokasi di Biogas di Kab. Kerinci, Merangin, Sarolangun, dan Tebo.

Tahun 2014 Pembangunan Digester Biogas dilaksanakan di 6 (enam) Kabupaten dengan jumlah total sebanyak 46 unit, antara lain : Kab. Muaro Jambi (8 unit), Kab. Bungo (8 unit), Kab. Tanjab Barat (7 unit), Kab. Tanjab Timur (8 unit), Kab. Batanghari (8 unit) dan Kabupaten Kerinci (7 unit).

Dimanfaatkannya energi terbarukan ini telah membawa Provinsi Jambi menjadi provinsi yang memiliki energi cadangan selain dari elektrifikasi yang dilakukan oleh PLN. Dampak yang bisa



dirasakan adalah pemerintah dapat mengurangi subsidi bahan bakar minyak, banyak energi jadi lebih murah sehingga menghemat anggaran Pemerintah Daerah. Selain itu, penggunaan gas sebagai pembangkit listrik sangat responsif terhadap beban dan fleksibel dalam pegerasiannya sehingga dapat mendukung stabilitas jaringan.

Dengan demikian, selama empat (empat) tahun terakhir sampai dengan tahun 2014 target kinerja peningkatan kualitas infrastruktur energi dan listrik mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat terwujud tentunya tidak terlepas dari program dan kegiatan yang terencana dengan baik dan sejalan dengan program "satu milyar satu kecamatan".

Capaian kinerja di atas, merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan peningkatan infrastruktur energi dan listrik. Dalam tahun 2014, program yang dilakukan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 5 program, yakni :

1. Program pengembangan potensi dan kecukupan energi listrik dan bahan bakar
2. Program pengembangan jaringan listrik perdesaan
3. Program pengembangan energi
4. Program pengembangan pemanfaatan energi baru dan terbarukan
5. Program pengembangan potensi energi lokal/desa

Permasalahan :

1. Rasio elektrifikasi di Provinsi Jambi masih rendah dikarenakan sulitnya akses ke daerah terisolir.
2. Rendahnya pemanfaatan sumber energi alternatif juga merupakan salah satu masalah yang dihadapi di Provinsi Jambi. Seperti belum termanfaatkannya potensi energi alternatif seperti kotoran sapi dan bijih jarak, dan belum dimanfaatkannya potensi panas bumi (geothermal) dan potensi air terjun sebagai sumber energi.

Solusi :

1. Meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Jambi dengan memanfaatkan potensi-potensi energi yang ada untuk dikembangkan menjadi energi listrik terutama di daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik negara.
2. Memanfaatkan potensi energi alternatif di Provinsi Jambi dengan cara menggali potensi serta menciptakan energi baru terbarukan. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral diharapkan lebih giat dalam memberikan pembinaan serta melaksanakan pembangunan Biogas dalam rangka memanfaatkan kotoran hewani sebagai sumber energi alternatif. Kegiatan Pembangunan Digester Biogas telah dilaksanakan sejak Tahun 2010, dan pada masa yang akan datang akan terus dikembangkan agar menjadi sumber energi pendamping selain jalur elektrifikasi dari PLN.

3. Sasaran Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Air Bersih Meningkat

a. Persentase Fungsionalisasi Luas Daerah Irigasi

Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan target terpeliharanya bendung, saluran pembawa dan pembuang serta bangunan pelengkap lainnya sebagai upaya untuk memberikan jaminan pelayanan terhadap lahan irigasi seluas 6.029 ha (kewenangan Provinsi) pada wilayah-wilayah produksi utama di Provinsi Jambi. Hal ini bertujuan untuk memberikan dampak peningkatan produktivitas sektor pertanian dan kepada masyarakat luas secara umum.

Oleh sebab itu, telah dilaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya yang lebih diarahkan pada rehabilitasi/pemeliharaan daerah irigasi sepanjang 4.665Ha, fungsionalisasi jaringan irigasi seluas 9.375Ha, serta pengawasan pekerjaan pada beberapa kabupaten/kota terutama pada wilayah-wilayah potensi sumberdaya pertanian secara luas.



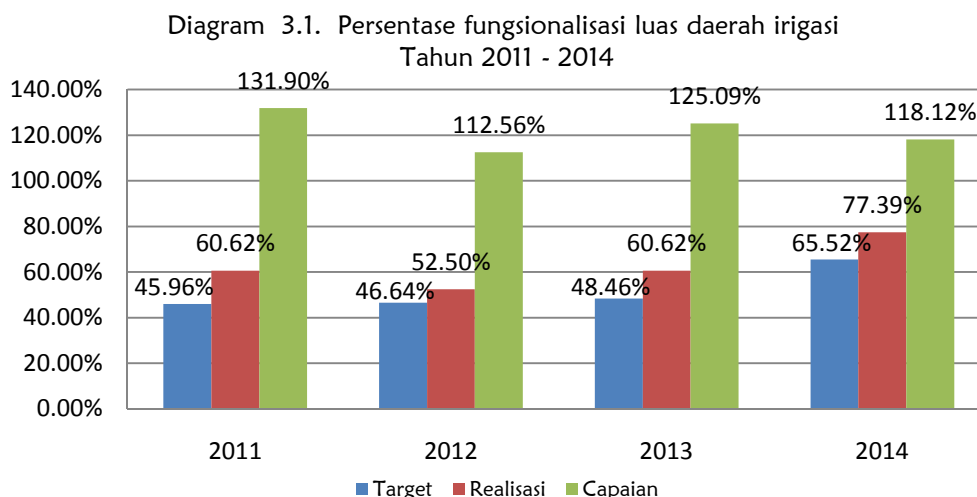
Selain itu, masalah pengendalian daya rusak air juga merupakan prioritas yang diterjemahkan dalam perencanaan survey investigasi dan desain (SID), pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan serta pengawasan turap, penahan tebing, *checkdam* dan pelindung tebing. Target capaian pembangunan yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam mengantisipasi terjadinya banjir dan longsor dilakukan secara bertahap setiap tahun. Secara keseluruhan, target capaian dengan melakukan perencanaan survey identifikasi dan desain (turap/talud/bronjong) selama 5 (lima) tahun sepanjang 6.400 meter, sumur air dalam sebanyak 20 lokasi dan normalisasi sungai sepanjang 21.100 m. Sedangkan dalam implementasinya baru mampu disusun rencana desain sepanjang 2.833 meter (44,27%) yang meliputi pembangunan turap, penahan tebing sungai, pelindung tebing sungai dan lokasi sumur air dalam. Selanjutnya, terkait dengan pencapaian penyelenggaraan pemeliharaan jaringan irigasi pada wilayah-wilayah sulit air bersih dilakukan dengan membangun sumur di wilayah timur provinsi Jambi.

Gambar 3.5. Daerah irigasi di Kab. Kerinci



Persentase luas daerah irigasi yang berfungsi mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Persentase luas daerah irigasi yang fungsional sama artinya dengan meningkatkan lahan pertanian. Realisasi Persentase luas daerah irigasi yang fungsional pada tahun 2014 sebanyak 77.39 persen irigasi telah mengalami peningkatan sebanyak 16.77 persen dari tahun sebelumnya.

Persentase luas daerah irigasi yang fungsional dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 untuk kondisi irigasi yang fungsional menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Adapun capaian Persentase luas daerah irigasi yang fungsional tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :



Sampai dengan tahun 2014, Persentase luas daerah irigasi yang fungsional sudah mencapai sekitar 92.01 persen dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2010-2015 sebesar 272.93 persen. Diperkirakan Persentase luas daerah irigasi yang fungsional sampai dengan tahun 2015 akan melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.



Tabel 3.8. Perbandingan dan Capaian Kinerja fungsionalisasi daerah irigasi tahun 2010 s.d. 2014

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Periode capaian kinerja			Capaian Kinerja			Capaian Target s.d. 2014	Target Akhir RPJMD
			2011	2012	2013	2014		% Capaian		
						Target	Realisasi			
1.	Persentase fungsionalisasi luas daerah irigasi	60,62	60,62	52,50	60,62	65,52	77,39	118,12	77,39	66,35

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2015

Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional ditandai dengan Pertumbuhan Ekonomi dan meningkatnya lahan pertanian. Adapun faktor yang mempengaruhi Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu terdiri atas 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhinya yaitu :

1. Kemampuan teknis
2. Pengawasan yang baik
3. Matangnya perencanaan

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu

1. Dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah
2. Kerjasama dengan Dinas Pertanian

Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu :

1. Aksesibilitas
2. Kondisi lahan pertanian

Dengan peningkatan panjang dan rehabilitasi jaringan irigasi telah berdampak positif pada peningkatan produksi pertanian Provinsi Jambi tentunya disandingkan dengan program-program prioritas di bidang pertanian dan ketahanan pangan, pada tahun 2014 Provinsi Jambi mengalami peningkatan produksi padi sebesar sebesar 8,7% jika dibandingkan tahun 2013, yaitu dari 685.680 ton GKG menjadi 772.846 ton GKG pada tahun 2014 (*ARAM II 2014*). Kenaikan produksi padi ini terjadi karena adanya peningkatan produktivitas sebesar 1,45 Kw/Ha (3,80%), serta didukung oleh peningkatan luas panen sebesar 9.825 Ha (6,72%).

Gambar 3.6. Produktivitas Padi

Produksi padi pada tahun 2014 mengalami peningkatan dikarenakan meningkatnya alokasi dana SLPTT dimana pada tahun 2013 hanya seluas 65.000 Ha menjadi 98.000 Ha. Untuk peningkatan produktivitas terjadi karena petani telah banyak yang mengerti dengan sistem pertanian yang terpadu dan adanya perbaikan teknologi berupa peningkatan penggunaan benih unggul bermutu, penggunaan pupuk organik, pemanfaatan agen hayati sebagai alternatif adanya kekurangan pupuk pada saat musim tanam tiba serta perbaikan sarana prasarana pertanian seperti perbaikan sistem pengelolaan Tata Air Mikro (TAM) dan perbaikan saluran irigasi lahan sawah.



b. Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak

Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat dan taraf kesehatan masyarakat, dan dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga dapat terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.



Penyediaan air minum atau air bersih yang layak bagi masyarakat sampai saat ini masih menjadi salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini didasarkan pada kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa aksesibilitas masyarakat (baik di perkotaan maupun perdesaan) terhadap air bersih dan air minum masih relatif rendah. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jambi secara konsisten dan berkesinambungan terus mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program penyediaan air bersih dan air minum ini.

Gambar 3.7. Distribusi Air Bersih PDAM



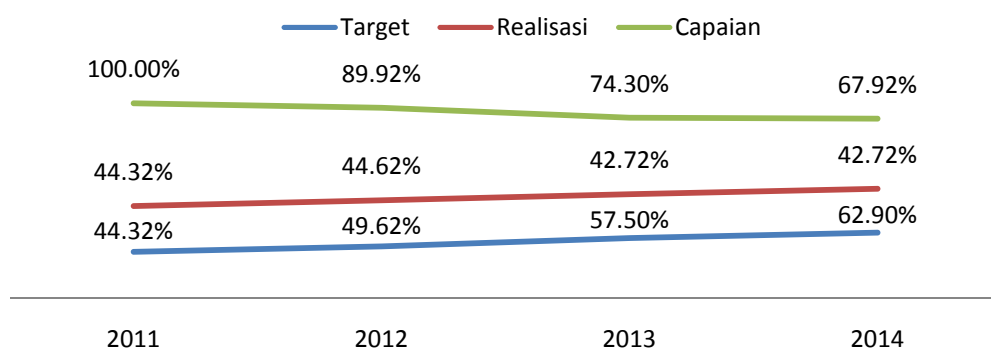
Sebagaimana diketahui bahwa capaian target kinerja atas rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan, perdesaan, serta perkotaan dan perdesaan Provinsi Jambi juga merupakan target nasional yang bertujuan untuk pencapaian target *Millenium Development Goals (MDG's)*. Artinya, target kinerja yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi merupakan target kinerja yang sama dengan target MDG's.

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum yang layak antar provinsi pada tahun 2013 (lap. MDGs 2013) memiliki disparitas dari 20,86 sampai 2,66 persen.

Sebanyak 13 dari 33 provinsi memiliki proporsi di atas rata-rata nasional dan provinsi dengan proporsi tertinggi adalah DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tenggara, sedangkan provinsi dengan proporsi terendah adalah Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, dan Papua.

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak berdasarkan susenas BPS tahun 2013 untuk perkotaan, pedesaan, serta perkotaan+perdesaan Provinsi Jambi pada tahun 2013 menunjukkan angka rata-rata 42,72%. Hal ini tidak mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2012 yakni sebesar 44,62%.

Grafik 3.1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Tahun 2011 - 2014



Dalam rangka meningkatkan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan, Pedesaan, dan Perkotaan+Pedesaan sebagaimana target MDGs, langkah nyata yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi adalah dengan melaksanakan pemasangan pipa (pipa distribusi) yang meliputi wilayah Kota Jambi, Kabupaten Batang Hari, Bungo, Tebo, Muaro Jambi, Sarolangun, Merangin, Tanjung Jabung Barat dan kerinci serta Pembangunan IPA Telanaipura Kota Jambi dan Pengadaan/Pemasangan IPA Paket Baja Kapasitas 30 l/det dan Pipa + ME di Kab. Ma. Jambi.

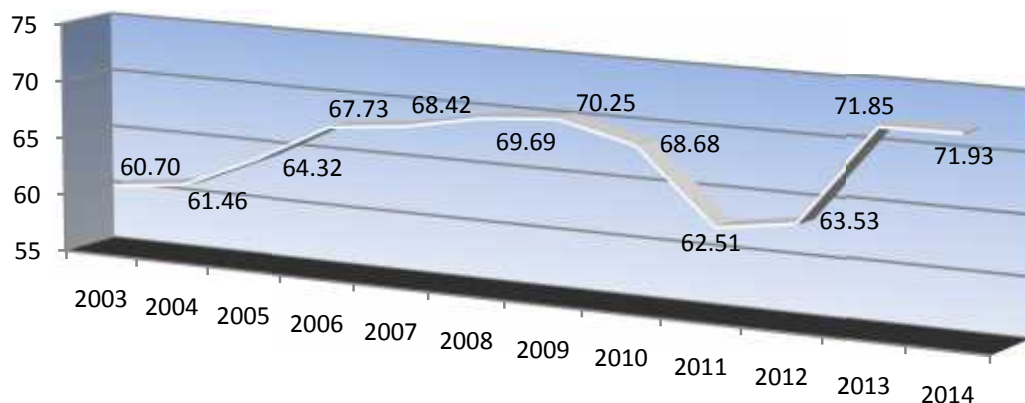


Total sambungan air bersih sampai dengan tahun 2014 ini yakni Kab. Tebo sebanyak 3515 sambungan rumah, Kab. Bungo sebanyak 7622 sambungan rumah, Kab. Merangin sebanyak 7132 sambungan rumah, Kab. Muara Jambi sebanyak 7536 sambungan rumah, Kab. Tanjung Jabung Barat sebanyak 2723 sambungan rumah, Kab. Sarolangun sebanyak 7590 sambungan rumah, Kab. Batanghari sebanyak 5180 sambungan rumah, Kab. Kerinci sebanyak 38696 sambungan rumah dan Kota Sungai Penuh sebanyak 70221 sambungan rumah.



Namun jika dibandingkan dengan capaian akses terhadap air minum berkualitas sudah cukup baik. Berbagai upaya yang dilakukan diantaranya monitoring dan evaluasi di lokasi eks (Community Water Service Health Project (CWSHP) di 5 kabupaten (Tanjung Barat, Muara Jambi, Batang Hari, Bungo dan Sarolangun) dalam rangka mengevaluasi peningkatan akses penduduk terhadap air minum Berkualitas, dimana akses air minum yang berkualitas dari tahun ke tahun juga terjadi peningkatan yang tidak begitu significant namun demikian terjadi rata-rata peningkatan setiap tahunnya sebesar kurang lebih 0,43%. Peningkatan ini tidak cukup significant, disebabkan mulai tahun 2010 adanya perubahan definisi indikator yaitu dari cakupan air bersih menjadi akses air minum yang berkualitas dan juga terjadi perubahan kriteria, dengan capaian pertahun sebagai berikut :

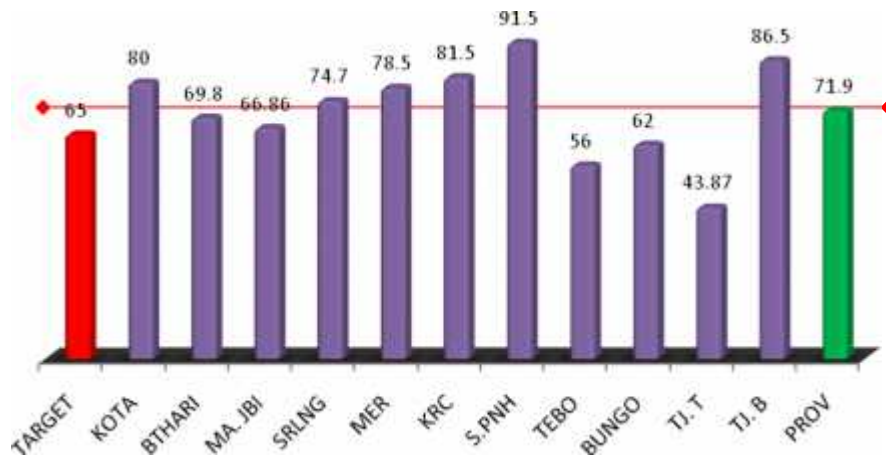
Grafik 3.2. Cakupan Akses Air Minum yang berkualitas Tahun 2003-2014 Provinsi Jambi



Untuk tahun 2014 ini pencapaian sebesar 71,93% sudah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 65%, jika dibandingkan tahun sebelumnya terjadi peningkatan 0,08%. Akan tetapi masih ada beberapa kabupaten kota yang masih dibawah target tahun ini yaitu : Kabupaten Tebo, Tanjung Timur, dan Bungo, sebagai berikut :



Diagram 3.1. Capaian Akses Air Minum Yang Berkualitas Per Kabupaten/Kota Tahun 2014



Tabel 3.9. Perbandingan dan Capaian Kinerja Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan, Pedesaan, serta Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2010 s.d. 2014

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Periode capaian kinerja			Capaian Kinerja			Capaian Target s.d. 2014	Target Akhir RPJMD
			2011	2012	2013	2014		% Capaian		
						Target	Realisasi			
1.	Persentase Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan	44,32	44,32	44,62	42,72	62,90	42,72	67,92	42,72	68,87

Sumber : MDGs & Hasil pengolahan data tahun 2015

Dengan adanya akses berkelanjutan terhadap sambungan air minum layak ini, secara tidak langsung mengubah pola hidup masyarakat Provinsi Jambi dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan sebagai dasar menuju kualitas hidup yang lebih baik. Salah satu upaya untuk mengubah perilaku masyarakat adalah melalui pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini merupakan komponen fisik sarana dan prasarana air minum.

c. Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak

Gambar 3.8. Potret kebutuhan akses sanitasi layak

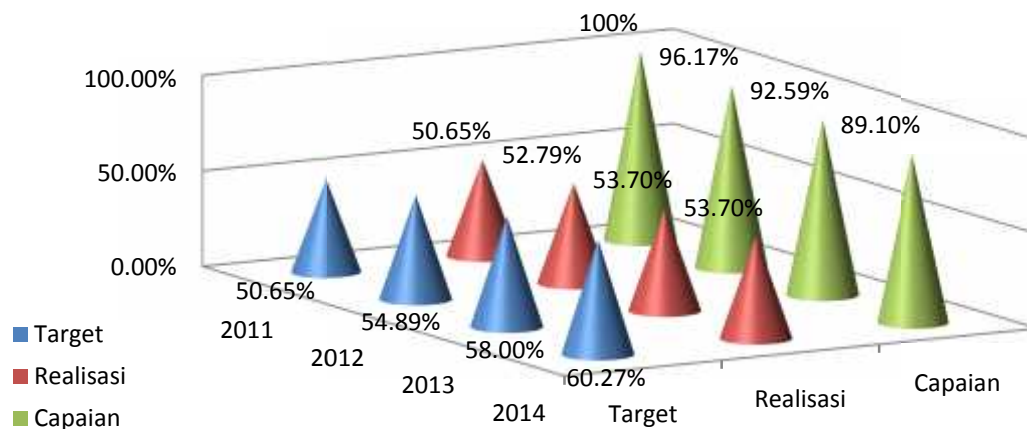


Terkait dengan proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak, tentunya tidak terlepas dengan pentingnya akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar layak, perkotaan, pedesaan, perkotaan dan pedesaan (target mdgs). Akses rumah tangga terhadap fasilitas sanitasi dasar layak secara nasional terus meningkat, tapi secara umum masih terdapat variasi antar provinsi. Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi dasar layak beragam dari 22,97 persen hingga 84,57 persen, dengan rata-rata nasional 57,60 persen pada tahun 2013. Peningkatan terjadi jauh lebih tinggi di pedesaan dibandingkan perkotaan. Pada tahun 2014 atas capaian 2013, proporsi rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi dasar layak meningkat dari 53,64 persen pada tahun 2009 menjadi



72,54 persen, sedangkan di pedesaan meningkat dari 11,10 persen pada tahun 2009 menjadi 38,97 persen. Pada tahun 2013 sebanyak 10 dari 33 provinsi memiliki proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi dasar layak di atas rata-rata nasional dan provinsi dengan proporsi tertinggi adalah Bali, DI Yogyakarta, dan Kepulauan Riau. Sedangkan provinsi dengan proporsi terendah adalah Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Kalimantan Tengah. Untuk Provinsi Jambi, capaian proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan pada kondisi awal RPJMD yakni tahun 2010 sebesar 40,93% dan mengalami kenaikan sebesar 9,72% menjadi 50,65% tahun 2011. Pada tahun 2012 kondisi capaian masih sebesar 52,79% dan mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi 53,70%, dan tahun 2014 berdasarkan data susenas BPS masih berada pada angka memperoleh angka realisasi sebesar 53,70%,

Diagram 3.3. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan Tahun 2011 - 2014



Untuk target pada indikator ini, telah ditetapkan persentase capaian indikator kinerja sesuai dengan target MDGs. Lebih lanjut mengenai perbandingan capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sanitasi Dasar Layak, Perkotaan, Pedesaan, serta Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2010 s.d. 2014

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Periode capaian kinerja			Capaian Kinerja			Capaian Target s.d. 2014	Target Akhir RPJMD
			2011	2012	2013	2014		% Capaian		
						Target	Realisasi			
1.	Persentase Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sanitasi Dasar Layak, Perkotaan dan Pedesaan	40,93 (MDG's)	50,65	52,79	53,70	60,27	53,70	89,10	53,70	62,41

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2015

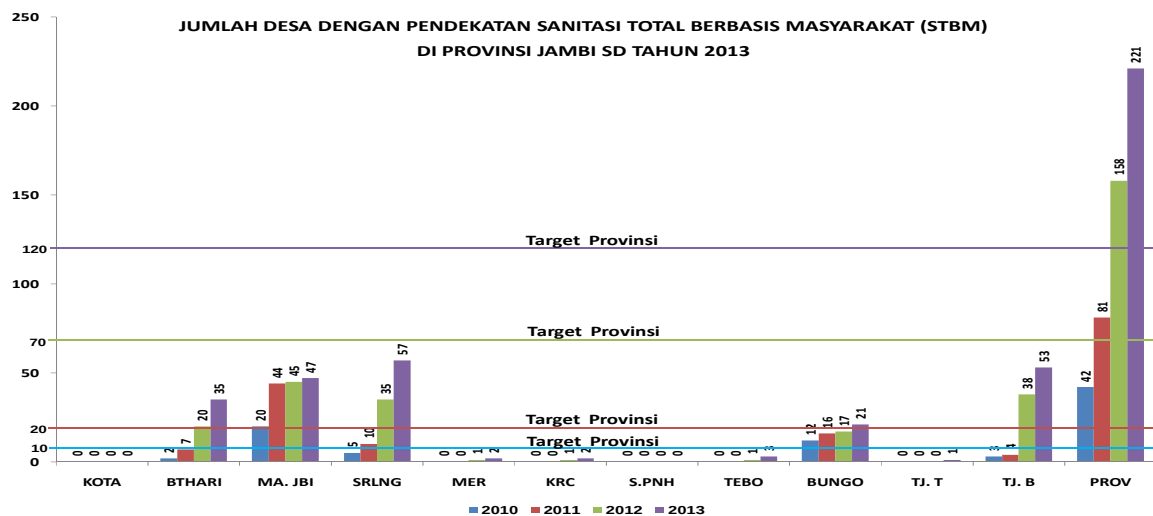
Analisis capaian kinerja tersebut di atas tidak terlepas dari keberhasilan pencapaian pelaksanaan desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat tahun 2014 telah tercapai sesuai target. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku bersih sehat. Sebagai indikator pencapaian STBM, salah satunya adalah adanya deklarasi masyarakat desa bebas buang air besar sembarangan (Open Defecation Free/ODF), dengan capaian dalam bentuk :



1. Pelaksanaan STBM yang dilakukan secara intensif melalui proyek CWSH yang terencana, terkoordinasi secara lebih baik.
2. Pembiayaan yang berbasis masyarakat dan dukungan pembiayaan oleh ADB sesuai kebutuhan.
3. Adanya community fasilitator (desa)
4. Adanya dukungan pemerintah daerah (Bupati) secara intensif.

Target desa yang telah melaksanakan pendekatan STBM sampai dengan tahun 2013 sebesar 120 desa dan terealisasi 221 desa, dengan rincian sbb :

Diagram 3.4. Jumlah Desa yang Melaksanakan STBM 2010 - 2013



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2013

Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dimana pada tahun 2011 ditargetkan 20 desa realisasi 81 desa, sedangkan untuk tahun 2012 ditargetkan sebanyak 70 desa dan realisasi sebanyak 158 desa, dan pada tahun 2013 ditargetkan 120 desa realisasinya 221. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Community Water Services and Health Project (CWSHP) di 5 Kabupaten yaitu Muaro Jambi, Batang Hari, Bungo, Sarolangun, dan Tanjab. Barat, Tugas Perbantuan dan yang bersumber dari APBD.

Dalam rangka pencapaian tujuan MDGs target ke 10, yaitu Penurunan sebesar separuh proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas dasar, maka telah dilakukan program Desa Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan 5 Pilarnya sebagai indikator yaitu : 1) Stop Buang Air Besar Sembarangan; 2) Cuci Tangan Pakai Sabun; Mengelola Air Minum dan Makanan Yang Aman; 4) Mengelola Sampah Dengan Benar; dan 5) Mengelola Limbah Cair Rumah Tangga Dengan Aman, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI. nomor: 852/menkes/sk/ix/2008.

Pada tahun 2014 telah dilaksanakan pemberdayaan desa lingkungan bersih dan sehat (LBS) yang sudah dimulai sejak tahun 2010 dengan menggunakan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan upaya yang telah dilakukan antara lain :

1. Melatih kader kesehatan lingkungan desa LBS sebanyak 15 orang per desa
2. Mendorong desa melaksanakan pemberdayaan bidang sanitasi (STBM), serta
3. Menyediakan sarana prasarana alat untuk mendukung pemberdayaan desa lingkungan bersih sehat FRP.

Perkembangan desa yang menerapkan STBM dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.11. Desa yang menerapkan STBM di Provinsi Jambi

TAHUN	KERINCI	MERANGIN	SAROLANGUN	TEBO	TJ. TIMUR	Bungo	MAJAMBI	Batanghari
2010	1. Ds. Koto Periang	1. Pelakar Jaya	1. Ds. Perdamaian					
2011	1. Ds. Pendung Tl. Genting	1. Ds. P. Baru		1. Desa Teriti	1. Ds. Kota Baru			
	2. Ds. Koto Rendah	2. Ds. Lubuk Gaung						
2012	1. Ds. Koto Periang	1. Ds. Tj. Lamin		1. Ds. Mangun Jayo	1. Desa Periang			
2013		1. Renah Medan	1. Bernai Dalam	1. Rimbo Mulyo	1. Kota Raja	1. Suka Makmur		1. Sungkai
2014		1. Tanjung Rejo	1. B. Murau		1. B. Tempurung	1. S. Sekapur. P	1. Ks. Kota Karang	
	4	6	3	3	4	2	1	1

Terlaksananya STBM desa tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah kabupaten/kota. Untuk memotivasi kabupaten/kota maka dilakukan Penilaian Kabupaten/Kota Sehat yang dilaksanakan pada tahun ganjil yang diawali tahun 2005 dengan nama penghargaan adalah SWASTI SABA dan dengan tiga kriteria yaitu Padapa, Wiwerda dan Wistara. Kabupaten Kota yang telah melaksanakan penyelenggaraan kota sehat sesuai standard mulai tahun 2005 sampai dengan 2014 adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2005 dan 2007 Kabupaten Kerinci telah mendapatkan penghargaan berupa Klasifikasi Wiwerda, dikarena terjadi pemekaran maka kabupaten Kerinci memulai dari awal kembali pada tahun 2013.
2. Kabupaten Merangin sampai kegiatan pembentukan form klupaten pada tahun 2007, akan tetapi sampai saat ini belum ada aktifitas pengembangannya.
3. Target tahun 2014 ini telah tercapai yaitu semua Kabupaten kota telah difasilitasi pengembangan KKS. Untuk lebih jelasnya seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.12. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS)

No.	KAB. / KOTA	TAHUN (LANGKAH KEGIATAN)									Langkah
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2013	2014	
1	Kerinci	8		8					1	1	1. Sosialisasi 2. Pembentukan Tim Pembina 3. Lokakarya KKS 4. Pembentukan Forum KKS 5. Pembentukan Forum Kec. 6. Pembentukan Pokja Desa 7. Pelaksanaan Kegiatan 8. Penilaian Swati Saba tahun ganjil
2	Kota Sei Penuh								1	1	
3	Merangin			4						1	
4	Sarolangun								2	4	
5	Batanghari								1	1	
6	Muaro Jambi								1	1	
7	Tanjab Timur									1	
8	Tanjab barat								4	4	
9	Tebo								1	1	
10	Bungo								1	5	
11	Kota Jambi				4					1	

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi 2014

Peningkatan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi Peningkatan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan yaitu :

1. Dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah/swasta



2. Penduduk yang telah mengerti tentang penggunaan sanitasi yang layak

Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan yaitu :

1. Aksesibilitas
2. Penyuluhan kepada masyarakat

Capaian kinerja di atas, merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan peningkatan proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak. Dalam tahun 2014, program yang dilakukan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 5 program, yakni :

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
2. Program penyediaan dan pengelolaan air baku/tanah
3. Program pengendalian banjir
4. Program pembangunan saluran drainase
5. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Permasalahan :

1. Keandalan sistem jaringan irigasi merupakan pilar penting yang memberikan kontribusi bagi optimalisasi produksi pangan daerah dan ketahanan pangan nasional. Masalah utama dalam rangka mengoptimalkan jaringan irigasi adalah pembebasan lahan menuju sumber-sumber produksi pangan.
2. Pencapaian target proporsi penduduk dengan akses terhadap sumber air minum Provinsi Jambi pada tahun 2015 mempunyai dimensi tantangan yang beraneka ragam, antara lain sebagai berikut :
 - a. Cakupan pembangunan yang sangat besar.
 - b. Keterbatasan sumber pendanaan.
 - c. Penurunan kualitas dan sumber air baku.
 - d. Mengingat jumlah kepadatan penduduk di kawasan perkotaan lebih tinggi masalah kemiskinan yang diderita penduduk turut menjadi penyebab rendahnya kemampuan penduduk untuk mengakses air minum yang layak, serta
 - e. Lemahnya kemampuan manajerial operasional air minum.
3. Berkaitan dengan masalah sanitasi dasar, terdapat beberapa tantangan dalam rangka mencapai target penurunan proporsi penduduk dengan akses fasilitas sanitasi dasar yang layak pada tahun 2015, yakni :
 - a. Pengetahuan penduduk tentang kualitas lingkungan yang masih rendah.
 - b. Belum adanya kebijakan komprehensif lintas sektor yang berupaya menyediakan fasilitas sanitasi dasar yang layak dan sehat menyebabkan penanganan masalah sanitasi kurang diatasi.
 - c. Rendahnya kualitas bangunan tangki septik di perkotaan.
 - d. Masih rendahnya masyarakat di kawasan perkotaan yang mendapatkan pelayanan sistem pembuangan air limbah (sewerage system).
 - e. Tidak adanya pelayanan sanitasi yang layak berdampak pada kualitas kesehatan yang rendah.

Solusi :

1. Perlu ketegasan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengendalikan laju alih fungsi lahan yang begitu cepat demi keberlangsungan penguatan ketahanan pangan nasional, sehingga akses jaringan irigasi menjadi lebih optimal menuju sentra pangan.
2. Melihat pencapaian target MDGs khususnya bidang air minum yang masih stagnan, maka upaya yang bisa dilakukan antara lain berlandaskan pada pilar-pilar peningkatan pengetahuan akan penyediaan air minum, penguatan kerjasama para Pemerintah Provinsi Jambi dengan pihak-



pihak terkait seperti PDAM, serta pengembangan kemampuan masyarakat lokal dalam penyediaan air minum, serta konservasi sumber air baku.

3. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, jajaran eksekutif, jajaran legislatif, dan pelaku dunia usaha agar memahami bahwasanya sanitasi berkaitan erat dengan kualitas hidup. Bila masyarakat telah menyadari pentingnya sanitasi, khususnya berkaitan dengan kesehatan dan produktivitas, maka kebutuhan terhadap prasarana dan sarana sanitasi akan meningkat.
4. Meningkatkan kualitas sarana sanitasi yang diberikan dalam bentuk penyediaan dana dan pendampingan dalam pembangunan sarana yang memenuhi kriteria teknis dan standar kesehatan yang ditetapkan tetapi sekaligus mudah dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat.
5. Membangun sistem pengolahan tinja individual dengan menggunakan tangki septik yang memenuhi syarat. Tangki septik yang buruk menyebabkan kebocoran sehingga meningkatkan pencemaran terhadap sumber air minum dari sumur/pompa.

4. Sasaran Pemerataan Akses Terhadap Pendidikan Berkualitas Meningkat

Komponen penting dari pembangunan pendidikan adalah perluasan akses pendidikan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Perluasan akses ini menjadi kunci karena berbagai hambatan baik teknis maupun non teknis, menjadikan pemenuhan hak atas pendidikan yang sudah dijamin oleh konstitusi bisa jadi tidak terpenuhi. Sasaran ini menegaskan bahwa pemerintah akan mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan untuk memastikan pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan indikator angka partisipasi murni (APM), persentase angka melek huruf, serta angka rata-rata lama sekolah sebagai penanda perluasan akses pendidikan.

Persentase Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

Tabel 3.13. Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar 2014

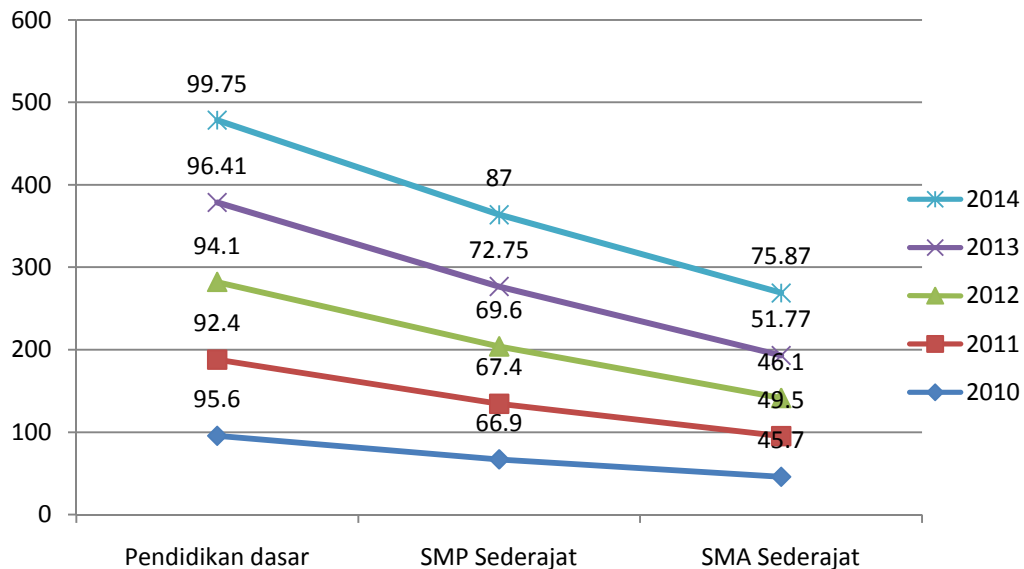
NO.	Kabupaten/Kota	Jumlah SD		Jumlah SMP	
		Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa
1.	Kota Jambi	219	64,224	62	25,192
2.	Kota Sungai Penuh	73	10,096	13	4.424
3.	Kab. Batanghari	211	32,330	51	9,075
4.	Kab. Bungo	230	41.982	60	13.066
5.	Kab. Kerinci	228	25.756	55	9,093
6.	Kab. Tanjab Barat	209	37.885	60	9,692
7.	Kab Merangin	309	47.883	89	11,956
8.	Kab. Sarolangun	230	35.717	67	9.404
9.	Kab. Tebo	239	41,302	56	11,558
10.	Kab. Muaro Jambi	246	42.508	76	13.174
11.	Kab. Tanjab Timur	206	24.824	46	7.125
JUMLAH		2.400	404.507	633	123.780

Upaya peningkatan akses pendidikan, terutama bagi siswa miskin dari sisi ekonomi sangat ditentukan oleh kebijakan yang dirumuskan dengan baik dan dibangun dengan proses partisipatif. Dalam upaya tersebut pemerintah menganut kebijakan yang berpihak pada siswa miskin. Kebijakan yang berpihak kepada siswa miskin bertujuan untuk mengupayakan siswa miskin menikmati layanan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah tanpa terancam putus sekolah. Kebijakan Pendidikan



Menengah Universal (PMU) yang telah dicanangkan oleh Mendikbud RI telah memperluas kesempatan dan jangkauan partisipasi semua golongan untuk memperoleh layanan pendidikan. Capaian APM pendidikan dasar sampai dengan menengah dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.3. Capaian APM tingkat pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan atas



Penyelenggaraan Program Pendidikan Menengah di Provinsi Jambi juga ditempuh dengan meningkatkan sarana dan prasarana belajar dalam rangka pemenuhan kebutuhan bidang pendidikan. Pembangunan infrastruktur beserta alat penunjang belajar serta beberapa kegiatan pembinaan anak didik seperti pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA, penyelenggaraan Paket C, kegiatan pembinaan peserta FLSSN, SMA, kegiatan lomba seni Nasional, lawatan sejarah, kegiatan Pembangunan Bisnis center.

Dari upaya-upaya yang sudah dilakukan tersebut berdampak terhadap target capaian indikator kinerja bidang pendidikan pada RPJMD antara lain Angka Partisipasi Murni pada jenjang pendidikan menengah SMA sederajat sebesar 78%.

Tabel 3.14. Perbandingan Capaian Kinerja Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar s.d. Pendidikan Menengah Atas Tahun 2010 s.d. 2014

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Periode capaian kinerja			Capaian Kinerja			Capaian Target s.d. 2014	Target Akhir RPJMD
			2011	2012	2013	2014 Target	2014 Realisasi	% Capaian		
1.	Persentase Angka Partisipasi Murni Pendidikan dasar	95,61	92,36	94,15	96,43	99,5	98,4	98,89	99,75	100
2.	Persentase Angka Partisipasi Murni SMP sederajat	66,91	67,43	69,56	72,73	87	69,87	80,31	87	90
3.	Persentase APM pendidikan menengah (SMA sederajat)	45,7	48,55	46,42	51,77	65	74,93	115,27	75,87	78

Ketersediaan Sekolah

Bagian penting dari perluasan akses pendidikan adalah ketersediaan sarana pendidikan yang memadai, seperti gedung sekolah yang layak bagi penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Data dalam



di bawah ini menunjukkan bahwa untuk jenjang SD/MI, rasio gedung sekolah per 10.000 penduduk telah mengalami peningkatan pada tahun 2010, dari sebelumnya 71/10.000 penduduk menjadi 73/10.000 penduduk. Kondisi ini terjaga hingga tahun 2014. Namun untuk jenjang SLTP, mengalami fluktuasi karena mengalami penurunan pada tahun 2010 dari 37/10.000 penduduk menjadi 36/10.000 penduduk, walaupun sudah meningkat dan menjadi lebih baik pada tahun 2012 (menjadi 38/10.000 penduduk).

Tabel 3.15. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Provinsi Jambi Tahun 2010-2014

No.	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014
I	SD/MI					
1.	Jumlah sekolah	2.204	2.360	2.382	2.382	2.400
2.	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	403.980	404.120	404.300	404.405	404.507
3.	Rasio (per 10.000)	71	73	73	73	73
II	SMP/MTs					
1.	Jumlah sekolah	460	476	487	487	495
2.	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	120.200	123.405	123.650	123.700	123.780
3.	Rasio (per 10.000)	37	36	38	39	39

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi 2014

Permasalahan :

- Sasaran perluasan aksesibilitas pendidikan perlu memperhatikan fluktuasi rasio guru dan murid serta ketersediaan gedung sekolah, karena dampaknya bagi kelancaran dan peningkatan kualitas belajar mengajar.
- Disparitas antar kabupaten/kota, sebagaimana ditunjukkan dalam angka APM dan APK, perlu dijawab dengan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai di berbagai kabupaten/kota.

Solusi :

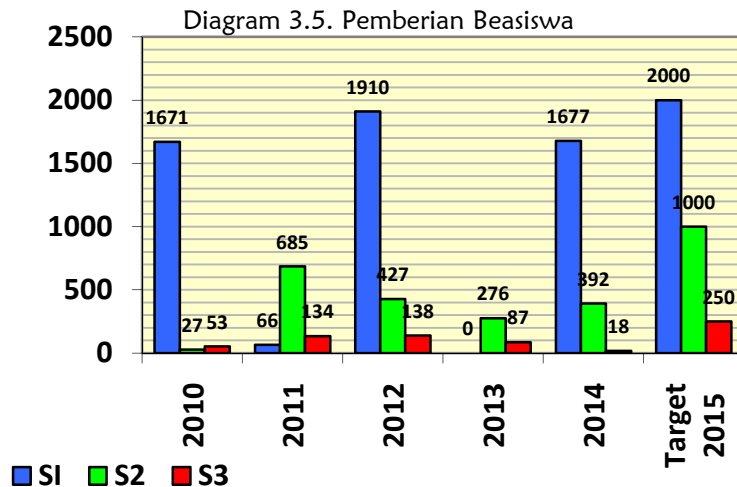
- Pemerintah Propinsi Jambi memiliki peran strategis untuk mengkoordinasikan program dan capaian kinerja antar kabupaten/ kota, termasuk untuk meminimalkan ketimpangan antar wilayah pada aspek pendidikan.
- Pemberian beasiswa, bantuan siswa miskin, pemberian bantuan biaya pendidikan mahasiswa, dan pemberian jaminan pendidikan bagi siswa miskin untuk pelajar/mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Pemberian Beasiswa

Capaian kinerja yang mendapat apresiasi cukup baik oleh masyarakat Provinsi Jambi adalah pemberian beasiswa melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Beasiswa diberikan bagi mahasiswa berprestasi, dan mahasiswa dengan program studi pilihan. Hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya bantuan beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi kepada mahasiswa dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 tercatat bantuan yang telah diberikan yakni, S1 : 2.671 orang, S2 : 27 orang, dan S3 : 53 Orang.



Gambar 3.9. Pemberian Beasiswa



orang, bantuan beasiswa bagi mahasiswa S2 sebanyak 276 orang. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan pemberian bantuan beasiswa dengan jumlah S1 : 1.677 Orang, S2 : 392, dan S3 : 18.

Dengan diberikannya bantuan beasiswa tersebut, saat ini telah memberikan dampak yang positif bagi pembangunan provinsi Jambi. Sebagian besar alumni yang diberikan beasiswa tersebut telah memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dengan menjadi tenaga pengajar, berkiprah di pemerintahan yang berdampak pada profesionalitas kinerja aparatur. Bahkan ada beberapa alumni yang menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan maupun di perusahaan swasta.

Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Provinsi Jambi, maka dilaksanakan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, peningkatan koleksi bahan pustaka yang variatif, peningkatan pelayanan perpustakaan keliling, meningkatkan minat baca dan budaya baca masyarakat Jambi yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan, serta melestarikan informasi tentang kebudayaan daerah Jambi sebagai bagian dari kebudayaan nasional agar dapat selalu ada dan dapat diketahui dan bermanfaat bagi generasi berikutnya.

Untuk mendukung program tersebut, telah dilakukan upaya strategis, diantaranya :

1. Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar,
2. Pengembangan Minat Baca dan Budaya Baca,
3. Pengembangan Koleksi Deposit dan Pelestarian Karya Cetak/ Karya Rekam Khasanah Budaya Rakyat Jambi,
4. Pengembangan, Pengolahan Sistem Otomasi dan Koleksi Bahan Perpustakaan,
5. Pengembangan Kapasitas Tenaga Pengelola Perpustakaan,
6. Pelestarian bahan Pustaka,
7. Pelestarian Transformasi Digital Bahan Pustaka,
8. Pameran Buku.

Gambar 3.10. Suasana Perpustakaan Provinsi Jambi



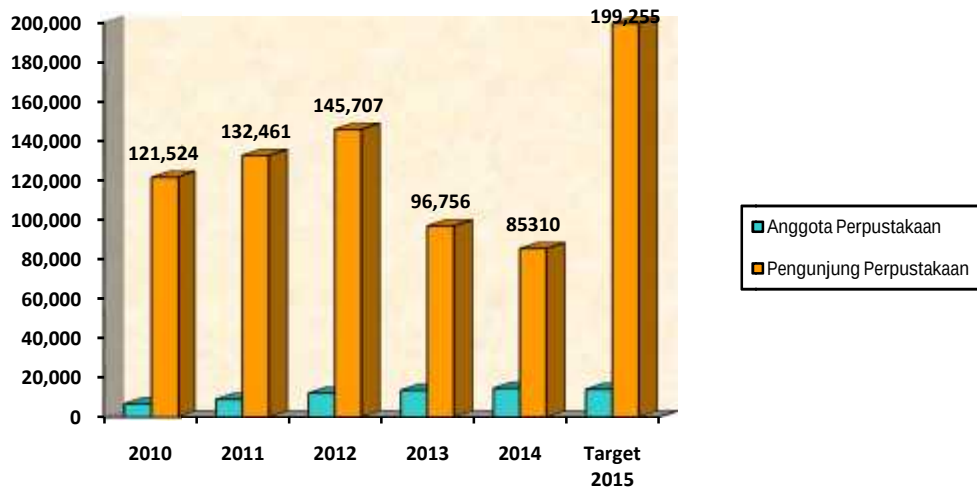
Capaian dari program ini adalah meningkatnya jumlah anggota perpustakaan dari 8.951 orang di tahun 2011 menjadi 12.084 orang pada tahun 2012 dan mengalami peningkatan jumlah pengunjung pada tahun 2013 sebesar 13.506 orang dan pada tahun 2014 sebesar 14.540. Dari sisi peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan, pengunjung perpustakaan pada tahun 2010 sebanyak



121.524, 2011 sebanyak 132.461, pada tahun 2012 sebanyak 145.707 orang, dan mengalami penurunan jumlah pengunjung pada tahun 2013 menjadi 96.756 orang, dan pada tahun 2014 sebanyak 85.310 orang.

Lebih lanjut perbandingan capaian peningkatan jumlah anggota dan pengunjung perpustakaan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Diagram 3.6. Peningkatan Jumlah Anggota dan Pengunjung Perpustakaan 2010 – 2014



Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Hasil Pengolahan Data 2014

Upaya yang telah dilakukan agar meningkatkan jumlah pengunjung antara lain dengan cara melaksanakan perpustakaan keliling dan sirkulasi layanan bahan Perpustakaan hingga pelayanan kepada Pemustaka, semata-mata tidak terlepas dari kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Meningkatnya budaya baca dikalangan masyarakat berdampak positif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran gerakan masyarakat gemar membaca.

Capaian keberhasilan kinerja peningkatan pengunjung perpustakaan di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan peningkatan akses terhadap pendidikan. Dalam tahun 2014, program yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini terdiri dari 2 program, yakni :

1. Program pengembangan budaya membaca dan pembinaan perpustakaan
2. Pelestarian dan pemeliharaan bahan pustaka

5. Sasaran Layanan Kesehatan Masyarakat Meningkat, terutama Bagi Masyarakat Kurang Mampu

a. Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita

Pembangunan Kesehatan sebagaimana kita ketahui bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan mempunyai peran penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam komitmen Internasional yang dituangkan dalam Millennium Development Goals (MDGs) dimana dalam pencapaian MDGs tersebut sektor kesehatan tercantum Indikator tujuan MDGs yaitu : Penurunan Prevalensi kekurangan gizi pada Balita, Menurunkan kematian Ibu dan Anak, serta Meningkatkan Kesehatan Ibu.

Penanganan pangan dan gizi merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan nasional. Pangan dan gizi terkait langsung dengan status kesehatan masyarakat. Perwujudan ketahanan pangan dan gizi tidak dapat dilepaskan dari upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan individu dan masyarakat, serta peningkatan daya saing SDM, yang selanjutnya menjadi daya saing bangsa. Indonesia telah berada dalam jalur yang benar (*on track*) untuk mencapai MDGs.



Upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana disebutkan di dalam undang-undang kesehatan No 36 tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi dan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Capaian prevalensi kekurangan gizi pada balita di Provinsi Jambi tahun s.d. tahun 2014 sebagai berikut :



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010 -2014 telah menetapkan 4 sasaran pembangunan kesehatan yaitu 1). Meningkatkan umur harapan hidup, 2). Menurunkan angka kematian bayi, 3). Menurunkan angka kematian ibu dan 4) Menurunkan prevalensi gizi kurang. Besaran masalah gizi masyarakat diukur dengan mengukur status gizi anak balita berdasarkan indeks Berat badan menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) dan Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB).

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Daerah tahun 2010 dimana diperoleh besaran masalah gizi masyarakat di Provinsi Jambi untuk prevalensi gizi kurang indeks (BB/U) sebesar 19,6%, prevalensi kurus indeks (BB/TB) sebesar 20% dan prevalensi pendek (TB/U) sebesar 30,2%.

Tabel 3.17. Target penurunan masalah gizi masyarakat

No.	Tahun/Indikator	Kondisi 2010	Target Capaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Gizi Kurang (Berat badan kurang menurut umur)	19.6	18.5	18	17	16	15
2.	Kurus (Berat badan kurang menurut tinggi badan) = Akut	20.0	19	18	17	16	15
3.	Pendek (Tinggi Badan Rendah menurut umur) = Kronis	30.2	30	29	28	27	26

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi 2014

Atas dasar penurunan target dimaksud, maka penanganan penurunan kasus gizi buruk terutama pada balita menjadi perhatian yang sangat penting bagi Provinsi Jambi. Berikut disajikan jumlah kasus gizi buruk pada balita di Provinsi Jambi :

Tabel 3.18. Kasus Gizi Buruk Provinsi Jambi yang Mendapatkan Perawatan

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Dirawat	Jenis Kelamin		Jumlah Meninggal	Pindah
			Lk	Pr		
1.	Kerinci	8 Orang	2	6	1 Orang	0 Orang
2.	Kota Sungai Penuh	2 Orang	2	0	0 Orang	0 Orang
3.	Merangin	17 Orang	6	11	1 Orang	0 Orang



4.	Sarolangun	12	Orang	8	4	1	Orang	0	Orang
5.	Bungo	2	Orang	1	1	0	Orang	0	Orang
6.	Tebo	12	Orang	5	7	2	Orang	1	Orang
7.	Batanghari	5	Orang	3	2	0	Orang	0	Orang
8.	Tanjab Timur	4	Orang	2	2	1	Orang	0	Orang
9.	Tanjab Barat	2	Orang	0	3	0	Orang	0	Orang
10.	Kota Jambi	8	Orang	2	6	1	Orang	1	Orang
11.	Muaro Jambi	7	Orang	5	2	0	Orang	0	Orang
	Jumlah	79	Orang	36	44	7	Orang	2	Orang

Sumber : Laporan Bulanan Kasus Gizi Buruk Kabupaten/Kota Tahun 2014

Pada tabel tersebut dapat dilihat jumlah kasus gizi buruk di Provinsi Jambi tahun 2014 sebanyak 79 kasus, angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 101 kasus, dan sebanyak 7 orang meninggal. Semua kasus gizi buruk mendapat perawatan (100%), adapun perawatan yang diberikan berupa rawat inap atau rawat jalan. Bagi penderita pasca perawatan pemerintah Provinsi Jambi memberikan bantuan berupa formula pemulihan yang diberikan kepada 33 anak. Dari jumlah pasien gizi buruk yang dirawat, jumlah penderita gizi buruk yang pada tahun 2014 tergolong cukup tinggi jika dibandingkan pasien meninggal pada tahun 2013 sebanyak 2 orang, dengan demikian terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2012 (4 orang) dan tahun 2011 (7 orang).

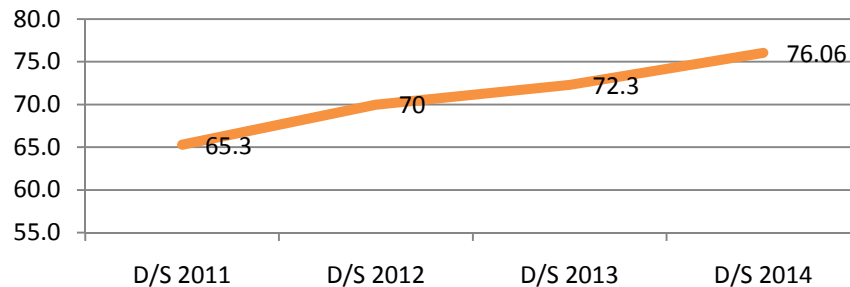


Penyebab terjadinya kasus gizi buruk pada balita di Provinsi Jambi disebabkan oleh masalah konsumsi yang kurang, kelainan kongenital dan atau adanya infeksi seperti : cacangan, pneumoni, TB paru, kelainan ginjal, kelainan jantung, talasemia, katarak, BBLR dan ISPA. Masalah lain yang ditemukan masih rendahnya kemampuan dan pengetahuan orang tua dalam mengasuh anak terutama dalam hal pemberian makan, kesehatan perorangan dan kesehatan lingkungan akibat kemiskinan.

Pelaksanaan pemantauan pertumbuhan balita di Provinsi Jambi yang bertujuan memantau peningkatan pelayanan gizi sesuai dengan Prosedur Pemantauan Pertumbuhan Balita dengan perkembangan s.d. tahun 2014 sebagai berikut :



Grafik 3.4
Hasil Pelaksanaan Pemantauan Pertumbuhan Balita
di Provinsi Jambi Tahun 2011 - 2014



Tabel 3.19. Hasil Pelaksanaan Pemantauan Pertumbuhan Balita di Provinsi Jambi Tahun 2014

NO	KAB/KOTA	S	K	D	N	T	O	B
1	KERINCI	26,785	22,456	17,644	15,235	604	1,208	598
2	SEI. PENUH	9,364	9,364	7,917	7,384	138	185	209
3	MERANGIN	34,369	31,877	23,415	18,388	1,760	1,292	1,012
4	SAROLANGUN	19,991	19,977	19,287	16,866	1,300	573	548
5	BATANG HARI	26,495	25,918	21,370	18,154	1,077	1,515	608
6	MA JAMBI	32,345	32,345	29,188	25,060	1,076	2,254	747
7	TJ. TIMUR	18,628	17,268	15,058	13,013	831	814	365
8	TJ. BARAT	21,606	20,289	18,447	16,877	437	646	490
9	TEBO	29,629	29,506	19,406	16,007	1,057	1,866	707
10	BUNGO	29,361	28,663	23,455	19,486	1,373	1,848	614
11	JAMBI	49,483	47,362	31,517	23,704	3,074	3,464	653
	PROVINSI	298,055	285,024	226,703	190,173	12,727	15,666	6,551

NO	KAB/KOTA	D'	BGM	2T	D/S	N/D'	N/S	K/S	BGM/D
1	KERINCI	15,838	66	42	65.87	96.19	56.88	83.84	0.24
2	SEI. PENUH	7,522	94	29	84.55	98.16	78.86	100.00	0.37
3	MERANGIN	21,112	247	82	68.13	87.10	53.50	92.75	0.35
4	SAROLANGUN	18,166	79	86	96.48	92.84	84.37	99.93	0.45
5	BATANG HARI	19,247	241	66	80.66	94.32	68.52	97.82	0.31
6	MA JAMBI	26,187	150	49	90.24	95.69	77.48	100.00	0.17
7	TJ. TIMUR	13,880	110	77	80.84	93.76	69.86	92.70	0.51
8	TJ. BARAT	17,311	126	51	85.38	97.49	78.11	93.90	0.28
9	TEBO	16,833	67	15	65.50	95.09	54.03	99.58	0.07
10	BUNGO	20,992	108	34	79.89	92.83	66.37	97.62	0.14
11	JAMBI	27,399	260	162	63.69	86.51	47.90	95.71	0.52
	PROVINSI	204,487	1,547	693	76.06	93.00	63.80	95.63	0.31

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi 2014

Pada tabel diatas dapat dilihat hasil pelaksanaan pemantauan pertumbuhan balita di Provinsi Jambi tahun 2013 berupa cakupan partisipasi masyarakat (D/S) sebesar 76,06%, yang naik timbangannya (N/D') sebesar 93,00%, keberhasilan penimbangan (N/S) sebesar 60,27%, balita yang mempunyai KMS (K/S) sebesar 95,63%, jumlah balita di Bawah Garis Merah (BGM) datang ke penimbangan (BGM/D) sebesar 0,31%.



Tabel 3.20. Perbandingan Capaian Kinerja Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita Tahun 2010 s.d. 2014

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Periode capaian kinerja			Capaian Kinerja			Capaian Target s.d. 2014	Target Akhir RPJMD
			2011	2012	2013	2014		% Capaian		
						Target	Realisasi			
1.	Prevalensi kekurangan gizi pada balita (kasus gizi buruk tertangani)	100%	100%	100% (63 kasus)	100% (6 kasus)	100%	100% (79 kasus)	99,97	100% (148 kasus tertangani)	100%

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2014

Capaian keberhasilan kinerja prevalensi kekurangan gizi di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan peningkatan akses terhadap peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Dalam tahun 2014, program yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini terdiri dari 8 program, yakni :

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan.
3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
4. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
5. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
6. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
7. Program Upaya Kesehatan Perorangan.
8. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.

Permasalahan :

Permasalahan yang ditemui dalam prevalensi kekurangan gizi pada balita ini antara lain :

1. Penerapan pola perilaku hidup bersih dan sehat untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman risiko penyakit masih belum sepenuhnya baik. Termasuk didalamnya adalah pola umum gizi seimbang (PUGS), kesehatan lingkungan (sanitasi dan akses air bersih), pencegahan penyakit menular, aktifitas fisik, dan penggunaan obat.
2. Implementasi BPJS untuk jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara per 1 Januari 2014 menimbulkan beberapa tantangan, termasuk di wilayah Provinsi Jambi. Berbagai tantangan ini mencakup proses integrasi antara berbagai skema jaminan kesehatan yang sudah ada sebelumnya, sosialisasi kebijakan yang belum optimal ke segenap lapisan masyarakat, hingga sistem pendukung untuk pelaksanaan kebijakan yang belum sepenuhnya tersedia dan berjalan

Solusi :

Langkah antisipatif dalam mengatasi permasalahan tersebut guna mencapai target yang telah ditentukan antara lain :

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat. Hal ini bisa dilakukan antara lain melalui pemberdayaan masyarakat melalui posyandu, desa/kelurahan siaga, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi keagamaan.
2. Dalam konteks masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki ikatan kekerabatan dan jejaring sosial yang kuat, pemenuhan hak masyarakat akan kesejahteraan dan jaminan sosial bisa dilakukan dengan mensinergikan program dan layanan yang disediakan pemerintah dengan upaya sejenis yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat. Peran pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator diperlukan untuk memastikan adanya jaminan yang memadai bagi masyarakat atas hak-hak dasarnya untuk hidup secara layak dan bermartabat.
3. Upaya-upaya untuk penerapan universal coverage melalui program BPJS perlu disinergikan dengan pendayagunaan dan pemberdayaan baik aparatur pemerintah di wilayah Provinsi Jambi,



organisasi masyarakat yang terkait maupun juga peran media massa untuk sosialisasi kebijakan yang efektif. Begitu juga integrasinya dengan sistem dan penyediaan layanan publik sehingga kualitas layanan kesehatan yang universal bisa didapatkan masyarakat secara baik dan memadai.

c. Persentase Puskesmas Berkinerja Baik

Capaian persentase Puskesmas dengan kinerja yang baik dengan menilai Puskesmas yang melaksanakan Manajemen Puskesmas. Adapun Manajemen Puskesmas terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu : P1 (Perencanaan) , P2 (Lokakarya mini/ Lokmin) dan P3 (Evaluasi Kinerja Puskesmas). Pada tahun 2014 ada sebanyak 6 Kabupaten/ Kota yang memiliki pukesmas dengan kinerja yang baik yaitu Kab. Merangin, Kota Jambi, Kab. Muaro Jambi, Kab. Bungo, Kab. Kerinci, dan Kab. Batanghari. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21. Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Manajemen Puskesmas 2014

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jlh Pusk	Pelaks Perenc Tk.Pusk	Pelaks. Lokmin Triw		Pelaks.Penilaian Kinerja Pusk.
				LP	LS	
1.	Kota Jambi	20	20	20	0	20
2.	Muara Jambi	19	19	18	0	19
3.	Tanjab Barat	16	16	16	0	16
4.	Tanjab Timur	17	17	17	0	17
5.	Batang Hari	17	17	17	6	17
6.	Tebo	16	16	16	0	16
7.	Bungo	18	18	18	15	18
8.	Sarolangun	13	13	13	0	13
9.	Merangin	21	20	20	0	21
10.	Kerinci	18	18	18	0	18
11.	Kota Sei.Penuh	6	6	6	0	6
Total		181	180	179	21	181

Jika dilihat dari kabupaten/kota yang melaksanakan manajemen mutu sebagai berikut :

Tabel 3.22. Jumlah Puskesmas Dalam Pelaksanaan Mutu Tahun 2014

No.	NAMA KABUPATEN/KOTA	JLH PUSK	PENERAPAN MUTU		
			QA	ISO	LAINNYA
1.	KOTA JAMBI	20	20		
2.	MUARA JAMBI	19	19		
3.	TANJAB BARAT	16	16		
4.	TANJAB TIMUR	17	17	-	
5.	BATANG HARI	17	17	1	
6.	TEBO	16	12		
7.	BUNGO	18	18	-	
8.	SAROLANGUN	13	13	-	-
9.	MERANGIN	21	21	-	-
10.	KERINCI	18	16	2	
11.	KOTA SEI.PENUH	6	5	-	1
TOTAL		181	174	2	1

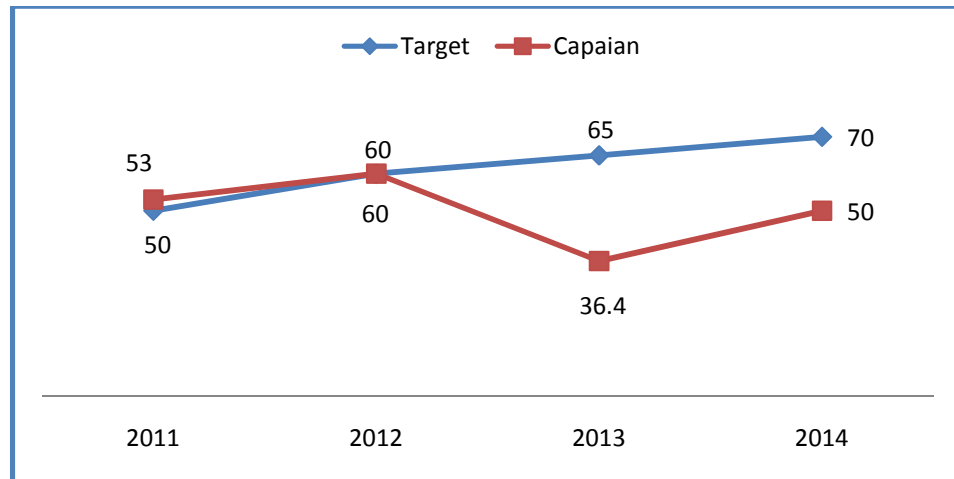
Sumber : Bidang Yankes Kab/Kota

Dari dua tabel di atas terlihat capaian pelaksanaan manajemen puskesmas dan penerapan manajemen mutu puskesmas pada tahun 2014 sudah cukup baik. Selain penerapan penilaian manajemen dan pelaksanaan mutu tersebut, turut pula didukung oleh ketersediaan tenaga kesehatan



dokter dan tenaga kesehatan lainnya baik tingkat bidan desa, puskesmas maupun Kab/Kota yang cukup merata, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Grafik 3.4. Trend Cakupan Puskesmas berkinerja Baik Provinsi Jambi Tahun 2011-2014



Cakupan puskesmas dengan kinerja yang baik dengan menilai pukesmas yang melaksanakan manajemen pukesmas. Adapun manajemen pukesmas terbagi atas 3 bagian yaitu P1 (perencanaan), P2 (lokakarya mini/ lokmin dan P3 (evaluasi kinerja pukesmas). Cakupan kinerja puskesmas sebagian besar belum mencapai target, capaian tertinggi adalah Kota Sei Penuh 50% dan Kab. Merangin, terendah adalah Kota Sungai Penuh 11,11%.

Pada tahun 2014 sebagian besar puskesmas belum mempunyai kinerja baik hal ini disebabkan distribusi tenaga kesehatan dokter dan tenaga kesehatan lainnya baik tingkat bidan desa, Puskesmas maupun Kab/Kota dalam melaksanakan program sehingga capaian program yang telah ditetapkan bersama masih ada yang belum tercapai, sebagaimana ketersediaan tenaga medis sebagai berikut :

Tabel 3.23. Ketersediaan Tenaga Medis Puskesmas Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Puskesmas				
			Ada Dr.	Tidak Ada Dr.	Ada Drg.	Tidak Ada Drg.	Dr ≥ 1
1	KOTA JAMBI	20	20	0	17	3	17
2	KERINCI	18	18	0	9	9	2
3	SUNGAI PENUH	6	6	0	4	2	3
4	MERANGIN	21	20	1	11	10	10
5	BATANG HARI	17	17	0	17	0	1
6	TANJAB BARAT	16	15	1	8	9	4
7	BUNGO	18	18	0	6	12	8
8	SAROLANGUN	13	13	0	9	4	7
9	TEBO	16	15	1	8	8	7
10	MUARO JAMBI	19	19	0	16	2	16
11	TANJAB TIMUR	17	17	0	2	15	5
	PROVINSI	181	173	3	107	74	80

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Dengan demikian pada tahun 2014 pencapaian persentase Puskesmas dengan kinerja yang baik sebesar 50% dari 181 puskesmas yang ada di kabupaten/kota dalam provinsi Jambi belum mencapai target, dimana targetnya adalah 70%. Hasil pencapaian ini naik sebesar 13,6% dari pencapaian pada tahun 2013 yakni sebesar 36,4%. Peningkatan pencapaian ini didukung oleh program dan upaya strategis yakni :



1. Pemilihan tenaga teladan di Puskesmas
2. Penilaian Puskesmas berprestasi
3. Perjalanan teladan ke Pusat
4. Koordinasi perencanaan program bina Gizi & KIA dan BOK tingkat provinsi
5. Konsultasi teknis ke pusat
6. Sosialisasi prgram BOK ke Kab/ Kota
7. Pembinaan/ monitoring dan evaluasi program bina gizi& KIA dan BOK
8. Rapat koordinasi Yankestradkom provinsi dengan Kab/Kota/ RS/PKM di Kabupaten.

Tabel 3.24. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Puskesmas Yang Berkinerja Baik Tahun 2010 s.d. 2014

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Periode capaian kinerja			Capaian Kinerja			Capaian Target s.d. 2014	Target Akhir RPJMD
			2011	2012	2013	2014		% Capaian		
						Target	Realisasi			
1.	Persentase Puskesmas yang berkinerja baik	50	50	60	36,4	70	50	71,42	60	85

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi & Hasil pengolahan data 2015

Capaian keberhasilan kinerja peningkatan puskesmas berkinerja baik di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan peningkatan akses terhadap peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Dalam tahun 2014, program yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini terdiri dari 7 program, yakni :

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan.
3. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
4. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
5. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan.
6. Program Upaya Kesehatan Perorangan.
7. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya.

Permasalahan :

Permasalahan yang ditemui dalam capaian kinerja puskesmas berkinerja baik di Provinsi Jambi ini antara lain :

1. Pada kegiatan perencanaan setiap tahunnya sering kali tidak berjalan sehingga kegiatan berjalan apa adanya sesuai kebiasaan yang dianggap baik/sudah biasa, bahkan terasa sekali bahwa tidak pernah adanya upaya pengembangan.
2. Belum sepenuhnya menerapkan kendali mutu pelayanan yang disebabkan kurangnya pengetahuan, peralatan, dan perhatian tersita pada upaya pengobatan, dapat dikatakan bahwa Puskesmas lebih sibuk pada masalah-masalah manajerial daripada kasus-kasus klinik serta rendahnya disiplin/etos kerja staff, menjadikan unsur manajemen ini tidak berjalan yang berimbas pada terhambatnya kinerja Puskesmas untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan.
3. Sarana dan prasarana yang ada di dalam Puskesmas sangat terbatas, baik berupa alat medis maupun obat-obatan. Hal ini terjadi akibat dari sumber pendanaan/keuangan yang dimiliki Puskesmas relatif terbatas sehingga mutu pelayanan puskesmas pun menjadi rendah karena tidak sesuai dengan standart kesehatan.
4. Jumlah tenaga medis yang sangat sedikit mengakibatkan ketidakmampuannya melaksanakan program dari Dinas Kesehatan. Misalnya program Posyandu yang tidak tepat sasaran. Jumlah tenaga medis sedikit karena insentif dari pemerintah daerah.



Solusi :

Langkah antisipatif dalam mengatasi permasalahan tersebut guna mencapai target yang telah ditentukan antara lain :

1. Meningkatkan komitmen dan kemauan untuk meningkatkan/meratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien di Puskesmas, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan/revitalisasi kader PKK, pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yang komprehensif, serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah.
2. Meningkatkan kesejahteraan pegawai karena berkaitan dengan satu-satunya pendapatan resmi mereka adalah gaji. Untuk mencapai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas di perlukan pimpinan yang mau memotivasi pegawainya dengan cara memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Meningkatkan sarana prasarana standar pelayanan serta penguatan anggaran kegiatan agar pelaksanaan program-program peningkatan kesehatan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

6. Sasaran Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Meningkat

a. Menurunnya Rumah Tangga Sangat Sangat Miskin

Data BPS Provinsi Jambi mencatat, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan) di Provinsi Jambi pada Maret 2014 berjumlah 263,80 ribu jiwa atau 7,92%. Bila dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan yang sama Tahun 2013 berjumlah 277,74 ribu jiwa, maka jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 13,9 ribu jiwa.

Dari sisi jumlah, penduduk miskin di daerah perdesaan cenderung lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di perkotaan. Pada posisi September 2014 penduduk miskin perdesaan mencapai 172,82 ribu jiwa atau 7,54% dari total penduduk miskin, sementara di perkotaan jumlah penduduk miskin sebanyak 104,92 ribu jiwa atau 10,41% . Pada kondisi bulan Maret 2014 jumlah penduduk miskin di perdesaan sebesar 163,68 ribu jiwa, sedangkan diperkotaan sebesar 100,12 ribu jiwa, hal ini diartikan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi, baik yang berada di Perdesaan maupun yang diperkotaan telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin.

Salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2014, adalah pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau disingkat PMKS. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan bagi masyarakat yang memiliki latar belakang sosial yang kurang beruntung, antara lain kecacatan, keterlantaran, ketunaan, keterbelakangan untuk dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Selain itu dalam mengatasi masalah kemiskinan di Provinsi Jambi Tahun 2014, upaya beberapa instansi terkait di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi telah berkontribusi positif melalui kegiatan pelatihan bagi pencari kerja di BPTT dan Kegiatan Pelatihan Samisake oleh Kabupaten /Kota dalam Provinsi Jambi.

Diagram 3.9. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi

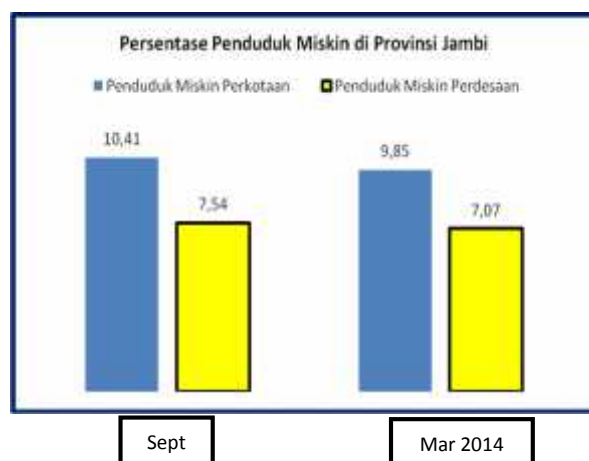
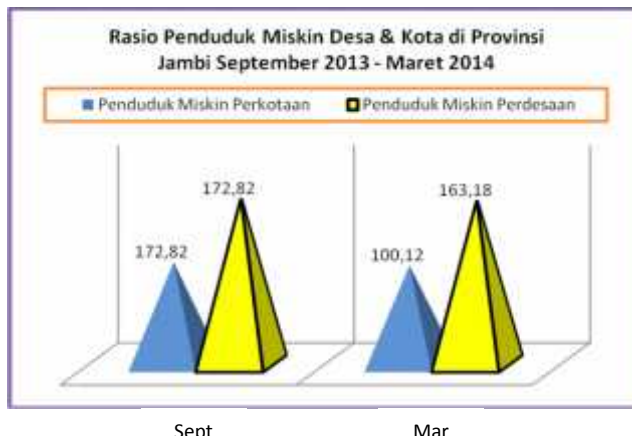




Diagram 3.10. Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota

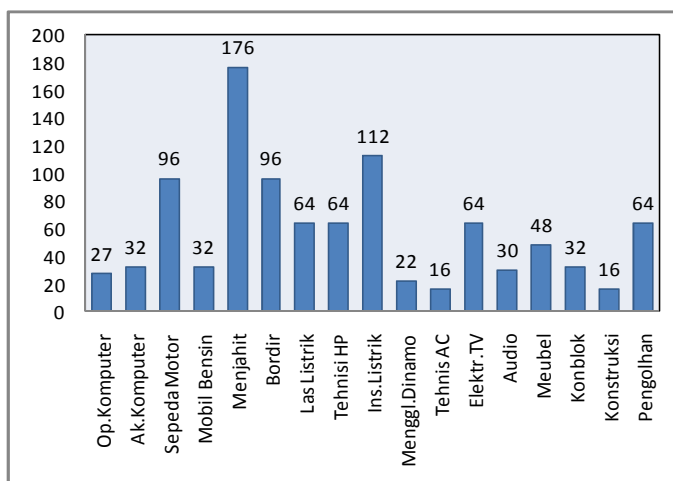


keterampilan agar dapat kembali ke masyarakat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dalam bidang pemberdayaan sosial, Pemerintah Provinsi Jambi menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan bagi pemberdayaan dan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin, pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, dan pemberdayaan kelembagaan sosial yang merupakan mitra pemerintah dalam membantu mengatasi masalah kesejahteraan sosial di Provinsi Jambi, diantaranya lembaga sosial, BKKKS, Karang Taruna dan Orsos lainnya. Selain itu, juga dilakukan pelayanan dalam membantu mengatasi masalah korban bencana sosial dan korban bencana alam yang terjadi selama tahun 2014, serta pemulihan orang terlantar.

Menurunnya persentase rumah tangga sangat miskin di Provinsi Jambi sesungguhnya tidak terlepas dari angka kesempatan kerja bagi penduduk. Secara umum, Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya antara lain dengan melaksanakan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, program peningkatan kesempatan kerja, dan program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Dengan program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut telah berdampak pada penurunan jumlah pengangguran dari 45.947 orang pada tahun 2013 turun menjadi 39.270 orang pada tahun 2014.

Diagram 3.11. Jumlah Peserta Pelatihan Samisake Tahun 2014



Sumber : UPTD. BPTT Disosnakertrans Provinsi Jambi, 2014

Melalui pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja dengan upaya pelatihan bagi 1.296 orang peserta dimana 1.110 diantaranya dari KK miskin program Samisake berasal dari 63 Kecamatan di 11 Kabupaten/Kota. Upaya ini telah meningkatkan keterampilan seluruh peserta latih sebagai bekal keterampilan yang memadai untuk bersaing pada pasar kerja, baik pasar kerja formal maupun untuk membuka lapangan usaha sendiri secara mandiri.

Selanjutnya telah dilakukan pula peningkatan kesempatan kerja dengan cara melaksanakan Pameran Bursa Kerja Job Fair 2014 diikuti oleh 65 perusahaan terdiri dari perusahaan yang

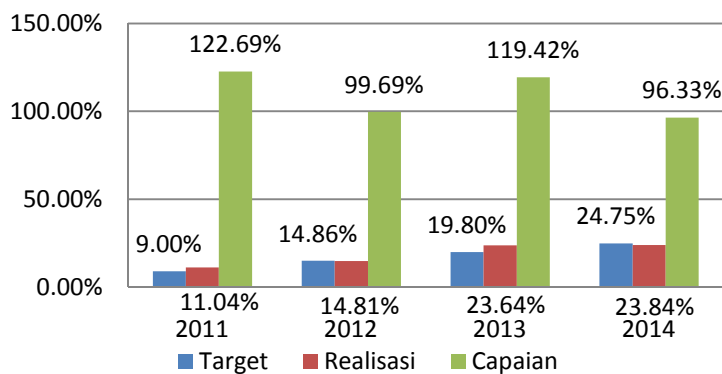
bergerak disektor perkebunan dan pabrik kelapa sawit, migas, industri pulp, jasa perbankan, finance; Pengembangan Kesempatan Kerja Dalam dan Luar Negeri dan Monitoring Penggunaan TKA; Perluasan Kesempatan Kerja Sektor Informal bagi Masyarakat Melalui Pembentukan Kelompok



Wirausaha Baru (WUB); Perencanaan Tenaga Kerja Mikro; Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penempatan; Pengumpulan, Pengolahan Analisis, Penyebaran Informasi Pasar Kerja; Pengembangan Masyarakat Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna; dan Pengelolaan Program Aplikasi Permenaker 18 Tahun 2011 Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan Program Satu Milyar Satu Kecamatan yang telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Program ini pada prinsipnya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terbatas kemampuannya di 131 kecamatan, dengan kegiatan yaitu bedah rumah, pemberian beasiswa samisake, bantuan UMKM, alsintan, sertifikat gratis, Jamkesmasda Provinsi, bantuan *dump truck* dan kendaraan roda 3, pelatihan tenaga kerja bagi KK miskin dan bantuan ternak sapi.

Diagram 3.12 Persentase hunian layak bagi masyarakat



Penurunan angka kemiskinan ini tidak terlepas dari hasil capaian kinerja pada tahun 2013 lalu, dimana telah diberikan bantuan bedah rumah sebanyak 9.915 unit, sedangkan tahun 2014 sebanyak 387 unit (23,84%), beasiswa tahun 2013 sebanyak 11.324 siswa dan tahun 2014 sebanyak 17.390 siswa, peningkatan jumlah UMKM tahun 2013 sebanyak 81.552 penerima sebanyak 82.243 penerima pada tahun 2014, bantuan kendaraan roda 3 dari

10 unit tahun 2011 menjadi 44 unit pada tahun 2013. Disamping kegiatan bantuan diatas, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Pemkab/Kota telah memberikan bantuan pemberian sertifikat gratis, yang sampai tahun 2014 sebanyak 501 persil.

Pemerintah Provinsi Jambi juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada perusahaan maupun BUMN/BUMD yang telah berpartisipasi dalam kegiatan bedah rumah melalui dana CSR, yang selama 2 tahun lalu telah terealisasi sebanyak 549 unit, masing-masing 282 unit tahun 2012 dan 263 unit di tahun 2014.

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Jambi pada bulan September 2014 sebesar 281,75 ribu jiwa (8,39 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2014 yang berjumlah 263,80 ribu jiwa (7,92 persen), berarti jumlah penduduk miskin naik sebesar 18 ribu jiwa.

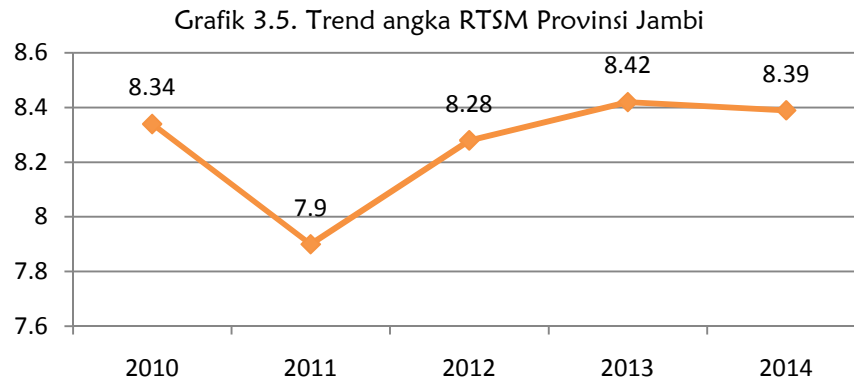
Pada bulan September 2014, persentase penduduk miskin perkotaan mencapai 10,67 persen sedangkan di perdesaan mencapai 7,39 persen. Garis Kemiskinan menunjukkan tren sedikit meningkat akibat pengaruh inflasi pada nilai pengeluaran penduduk. Garis Kemiskinan Maret 2014 sebesar Rp. 318.262/kapita/bulan meningkat menjadi Rp. 329.181/kapita/bulan pada September 2014. Peran konsumsi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peran konsumsi bukan makanan. Pada bulan September 2014, kontribusi Garis

Gambar 3.11. Potret Kemiskinan





Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) di Provinsi Jambi sebesar 77,38 persen.



Pada periode September 2014 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 1,124 mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode Maret 2014 yang menunjukkan angka sebesar 1,048, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,232 pada September 2014 sedikit menurun dari Maret 2014 yang mencapai 0,234. Hal ini memberikan indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan, sementara ketimpangan pengeluaran penduduk miskin relatif stabil pada kondisi sedang.

Tabel 3.25. Perbandingan dan Capaian Kinerja Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sangat Miskin Tahun 2010 s.d. 2014

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Periode capaian kinerja			Capaian Kinerja			Capaian Target s.d. 2014	Target Akhir RPJMD
			2011	2012	2013	2014		% Capaian		
						Target	Realisasi			
1.	Persentase menurunnya rumah tangga sangat miskin (tingkat kemiskinan)	8,34	7,9	8,28	8,42	8,30	8,39	97,73	7,9	5

Sumber : Dinas Sosnakertrans, UMKM Provinsi Jambi & Hasil pengolahan data 2015

Capaian keberhasilan kinerja penurunan rumah tangga sangat miskin di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan peningkatan bagi masyarakat kurang mampu. Dalam tahun 2014, program yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini terdiri dari 11 program, yakni :

1. Program pengembangan perumahan.
2. Program pengembangan kawasan pemukiman.
3. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
4. Program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.
5. Program pembinaan anak terlantar.
6. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma.
7. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo.
8. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (narapidana, PSK, narkoba, dll).
9. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
10. Program bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial.
11. Program peningkatan kesempatan kerja.



Permasalahan :

Permasalahan yang ditemui dalam capaian kinerja penurunan rumah tangga sangat miskin di Provinsi Jambi ini antara lain :

1. Secara fungsional, keterbatasan kewenangan dan ketersediaan anggaran yang relatif terbatas merupakan masalah yang paling mendasar dalam upaya penurunan RTSM.
2. Bertambahnya warga pendatang yang akhirnya menetap dan menjadi penduduk wilayah Provinsi Jambi dengan tingkat perekonomian yang tergolong masuk dalam kategori RTSM.

Solusi :

Langkah antisipatif dalam mengatasi permasalahan tersebut guna mencapai target yang telah ditentukan yakni :

Perlu adanya sinergisitas program dan dukungan anggaran antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran.

b. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak dan masing-masing dimensi direpresentasikan oleh indikator. Dimensi umur panjang dan sehat direpresentasikan oleh indikator angka harapan hidup; dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah; serta dimensi kehidupan yang layak direpresentasikan oleh indikator kemampuan daya beli yang dilihat dari pengeluaran perkapita. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi pembangunan manusia ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Perkembangan komponen IPM yang meliputi peningkatan dan kontribusi setiap komponen terhadap IPM secara umum sebagai berikut :

Tabel 3.26. Komponen Pendukung IPM Provinsi Jambi

Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM		Peringkat IPM		Reduksi Shortfall
	(tahun)		(persen)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)						
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012-2013
JAMBI	69,44	69,61	96,20	96,85	8,20	8,32	640,82	644,05	73,78	74,35	13	13	2,20
Kerinci	71,09	71,19	97,26	97,27	8,27	8,38	642,65	645,68	75,11	75,49	3	3	1,52
Merangin	68,83	69,15	97,53	97,54	7,65	7,69	634,70	637,61	72,85	73,28	9	10	1,60
Sarolangun	69,71	69,85	94,98	95,35	7,55	7,60	646,48	650,05	73,61	74,08	6	7	1,80
Batanghari	69,56	69,80	97,58	97,59	7,92	7,95	639,40	642,88	73,83	74,25	4	4	1,61
Muara Jambi	69,39	69,49	96,84	97,60	8,17	8,21	637,32	640,61	73,59	74,10	7	6	1,94
Tanjung Jabung Timur	71,09	71,23	92,44	92,44	6,39	6,53	640,95	645,12	72,52	73,03	11	11	1,84
Tanjung Jabung Barat	70,05	70,29	97,93	97,94	7,60	7,69	636,24	640,23	73,70	74,21	5	5	1,92
Tebo	69,37	69,47	95,22	96,27	7,43	7,60	637,47	641,12	72,69	73,38	10	9	2,55
Bungo	67,81	67,95	96,34	96,68	8,18	8,20	642,95	645,78	73,05	73,44	8	8	1,45



Kota Jambi	69,95	70,15	99,07	99,08	10,56	10,57	649,09	653,23	77,08	77,52	2	2	1,91
Kota Sungai Penuh	71,09	71,19	97,28	98,15	9,68	9,69	661,60	664,55	77,63	78,11	1	1	2,16

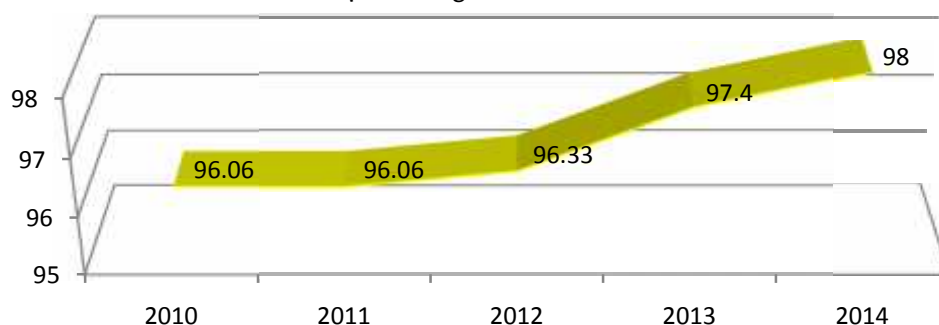
Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk di bidang kesehatan. Angka rata-rata harapan hidup Provinsi Jambi pada tahun 2012 mencapai 69,44 tahun, dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Jambi berimbas pada kenaikan rata-rata angka harapan hidup pada tahun 2013 menjadi 69,61 tahun.

Dilihat dari indikator pendidikan yang merepresentasikan dimensi pengetahuan dalam IPM adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas sumber daya manusia. Angka melek huruf menggambarkan persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang mampu baca tulis. Sementara indikator rata-rata lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal. Pada tahun 2012, angka melek huruf Provinsi Jambi berada pada angka 96,20%, dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 96,85%. Begitu pula dengan angka rata-rata lama sekolah mengalami kenaikan dari tahun 2012 sebesar 8,2 tahun menjadi 8,32 tahun.

Angka Melek Huruf

Target penuntasan buta aksara merupakan bagian dari fokus pembangunan untuk peningkatan *human capital*, mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara, maupun karena daya ungkit pendidikan terhadap tujuan pembangunan yang lain seperti pembangunan dan pemerataan ekonomi dan sosial. Terlebih lagi, dalam RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015, penegasan akan pentingnya pendidikan juga bisa ditemukan dalam sasaran ke-6 (enam) tentang meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, dimana peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan memajukan ilmu pengetahuan telah menjadi arah bagi pembangunan di Provinsi Jambi.

Grafik. 3.6. Capaian Angka Melek Huruf Provinsi Jambi



Sebagai upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang karena sebab tertentu tidak mendapatkan pelayanan pendidikan formal di Jambi yang bertujuan meningkatkan penyelenggaraan, mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal di Jambi, maka Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan berbagai upaya mendukung pendidikan non formal antara lain :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Keaksaraan
2. Melaksanakan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan
3. Melakukan Seleksi Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal Berprestasi
4. Mempublikasi dan mensosialisasikan Pendidikan Non Formal
5. Membina manajemen pengelola PKBM Se-Provinsi Jambi



6. Menyelenggarakan UPTD BPLS
7. Pembinaan dan pengembangan rumah pintar
8. Membina dan mengembangkan PKBM/TBM
9. Pemberdayaan tenaga kependidikan Non Formal
10. Melaksanakan workshop/orientasi tutor penyelenggara keaksaraan dasar

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja tersebut digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.27. Capaian Angka Melek Huruf dan Angka Buta Aksara

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan nonformal	Pendidikan Non Formal dan Informal :			
	a. Angka Melek Huruf Usia > 15 Tahun	97,9%	98,0	110
	b. Penduduk Buta Aksara Usia > 15 Tahun	1%	1%	-
	c. PKBM Tervalidasi	170 Lbg	355	208,82
	d. TBM Tervalidasi	116 Lbg	112	96,51
	e. Lembaga Kursus Terakreditasi	2 Lbg	2	100

Berdasarkan tabel diatas jika dilihat dari realisasi pencapaian, terlihat realisasi telah melewati target target yang telah ditetapkan dengan persentase pencapaian target Angka Melek Huruf > 15tahun sebesar 98% berada di atas target yang ditetapkan tahun 2014, sehingga persentase diatas masuk dalam kategori sangat baik, begitu juga jika dilihat dari realisasi pencapaian target Penduduk Buta Aksara Usia > 15 Tahun sebesar 1% yang menunjukkan telah mencapai target yang ingin dicapai yaitu sebesar 1 %. Keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya upaya pembinaan dan pengembangan PKBM/TBM dan pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan yang ada di Provinsi Jambi yang ditunjukan oleh persentase pencapaian target PKBM/TBM Tervalidasi sebesar 208,82 % yang melebihi target, TBM tervalidasi persentase pencapaian target sebesar 96,51 % dan juga lembaga kursus terakreditasi dengan persentase pencapaian target sebesar 100 %. sehingga persentase diatas masuk dalam kategori *sangat baik*.

Permasalahan :

1. Mayoritas penduduk yang masih buta huruf adalah penduduk berusia lanjut. Kelompok ini seringkali tidak terjangkau dalam upaya-upaya pengentasan buta aksara, karena pendidikan tidak dianggap penting bagi kelompok usia sekolah ataupun usia produktif.
2. Walaupun persentase penduduk melek huruf sudah semakin membaik di semua kabupaten/kota, kesenjangan antar wilayah masih menjadi persoalan. Wilayah seperti Kab. Merangin memiliki angka melek huruf yang jauh di bawah wilayah lain seperti Kota Jambi.

Solusi :

1. Strategi yang tepat untuk memfokuskan program pengentasan buta huruf pada kelompok lansia adalah dengan cara pelibatan kelompok lansia yang mengakar di masyarakat. Selain itu, juga perlu mempromosikan pentingnya pendidikan bagi lansia kepada masyarakat luas melalui media yang efektif.
2. Fokus pengembangan pendidikan dengan dukungan bagi daerah-daerah dengan capaian melek huruf yang tertinggal. Koordinasi yang efektif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memegang kewenangan untuk penyelenggaraan pendidikan dasar perlu dilakukan. Juga upaya-upaya untuk menjaga dan meningkatkan capaian melek huruf dari tahun ke tahun.



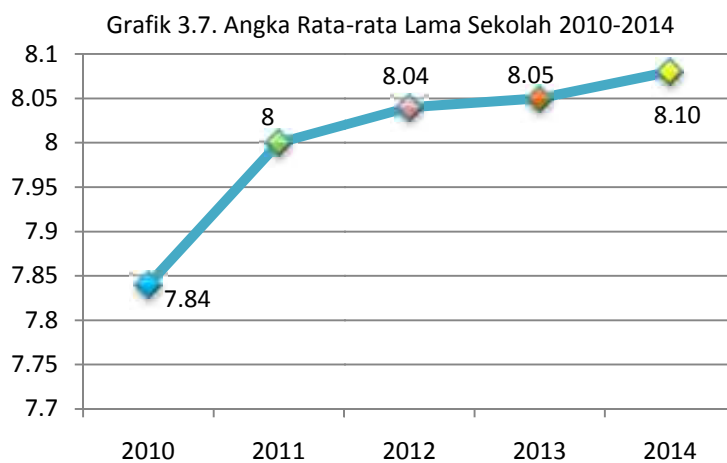
Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Seperti juga angka melek huruf, komponen penting dari pembangunan pendidikan adalah perluasan akses pendidikan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Perluasan akses ini menjadi kunci karena berbagai hambatan baik teknis maupun non teknis, menjadikan pemenuhan hak atas pendidikan yang sudah dijamin oleh konstitusi bisa jadi tidak terpenuhi. Sasaran ini menegaskan bahwa pemerintah akan mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan untuk memastikan pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan indikator peningkatan rata-rata lama sekolah sebagai penanda perluasan akses pendidikan. Rata-rata lama sekolah ini menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Gambar 3.12. Proses Belajar Siswa



Program Pendidikan Dasar 9 Tahun bertujuan untuk menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang bermutu dan mengurangi angka putus sekolah, sangat berpengaruh pada Angka Rata-Rata Lama Sekolah. Saat ini angka rata-rata lama sekolah Provinsi Jambi sebesar 8,10 tahun, dan sudah melebihi target yang telah ditetapkan oleh RPJMN pada tahun 2014 sebesar 8,08 tahun. Akan



tetapi, Pemerintah Pusat sejak tahun 2012 telah mencanangkan wajib belajar 12 tahun, sehingga Pemerintah Provinsi Jambi harus bekerja keras untuk mencapainya. Dalam kaitan pencapaian target tersebut diatas, pemerintah Provinsi Jambi tetap mendorong Kabupaten/Kota untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan. Disamping itu, Pemerintah Provinsi Jambi tetap berkomitmen meningkatkan infrastruktur pendidikan sesuai dengan kewenangan, salah satunya melalui dana transfer ke daerah.

Melalui indikator peningkatan angka rata-rata lama sekolah selama 4 (empat) tahun terakhir juga mengalami peningkatan dari 7,8Th pada tahun 2010 menjadi 7,9Th pada tahun 2011, pada tahun 2012 mengalami peningkatan angka rata-rata lama sekolah menjadi 8,04Th, pada tahun 2013 telah mencapai angka 8,05Th, dan pada tahun 2014 telah menjapai 8,10Th.

Pada grafik di atas terlihat capaian tahun 2014 rata-rata lama sekolah adalah 8,10 tahun, telah melebihi target tahun 2014 sebesar 8,08 tahun. Pencapaian ini juga telah mencapai 100,24% dari rencana target kinerja pada akhir RPJMD pada tahun 2015 yaitu rata-rata lama sekolah sebesar 8,5 tahun.

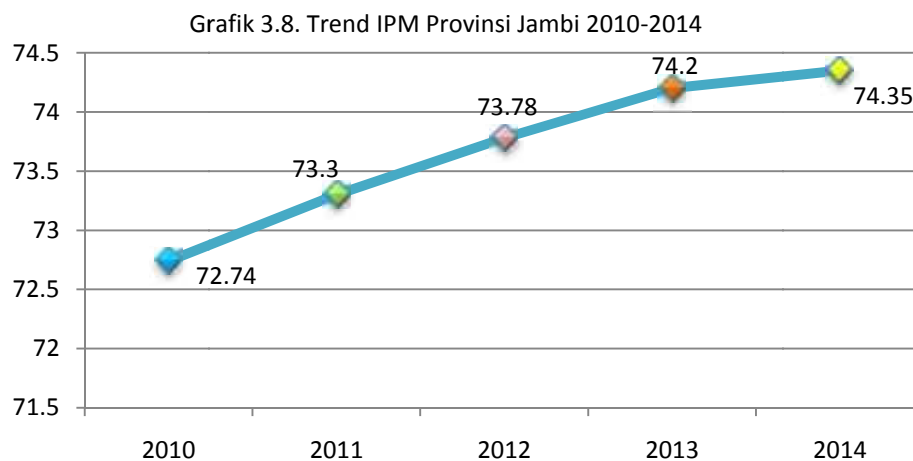
Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk di Provinsi Jambi, selama 2010-2014 terjadi peningkatan kualitas pendidikan yaitu dari 7,84 tahun di tahun 2010 menjadi 8,10 di tahun 2014. Peningkatan rata-rata lama sekolah di Provinsi Jambi ini dapat dimaknai bahwa penduduk Provinsi



Jambi semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Namun demikian, seperti halnya angka melek huruf, peningkatan hanya naik sebesar 0,1% dari tahun 2012 ke tahun 2013. Oleh sebab itu ke depan perlu menjadi perhatian untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif.

Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran perkapita masyarakat provinsi Jambi yang dilihat dari rata-rata kemampuan daya beli, merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli. Dengan demikian kemampuan daya beli masyarakat antar satu wilayah dengan wilayah lain berbeda. Perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah masih belum sebanding. Pengeluaran perkapita masyarakat provinsi Jambi rata-rata pada tahun 2012 sebesar Rp. 640,82ribu dan mengalami kenaikan pada tahun 2013 sebesar Rp. 644,05ribu.



Dari rata-rata keempat komponen yang berkontribusi terhadap angka IPM provinsi Jambi, maka pada tahun 2012 sampai 2013 yakni sebesar 73,20 dan 74,35. Angka IPM ini menjadikan Provinsi Jambi berada di peringkat 13 untuk seluruh wilayah Indonesia.

Tabel 3.28. Perbandingan dan Capaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010 s.d. 2014

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Periode capaian kinerja			Capaian Kinerja			Capaian Target s.d. 2014	Target Akhir RPJMD
			2011	2012	2013	2014 Target	2014 Realisasi	% Capaian		
1.	Indeks Pembangunan Manusia	72,74	73,3	73,78	74,35	74,4	74,35	99,92	74,35	74,5

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2014

Capaian keberhasilan peningkatan indeks pembangunan manusia di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan peningkatan perlindungan kesejahteraan sosial. Dalam tahun 2014, program yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini terdiri dari 13 program, yakni :

1. Program wajib belajar 12 tahun
2. Program pendidikan non formal
3. Program pendidikan luar biasa
4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
5. Program Pengawasan Obat dan Makanan.
6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
7. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.



9. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
10. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
11. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan.
12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.
13. Program Upaya Kesehatan Perorangan.

Permasalahan :

Permasalahan yang ditemui dalam capaian kinerja indeks pembangunan manusia Provinsi Jambi lebih ditekankan pada upaya peningkatan angka harapan hidup Provinsi Jambi antara lain :

1. Fluktuasi angka putus sekolah sebagaimana data Provinsi Jambi di berbagai jenjang pendidikan menunjukkan perlunya perhatian untuk menjawab persoalan putus sekolah. Sebagian persoalan ini perlu dijawab dengan upaya sinergis lintas bidang dan juga lintas aktor, seperti menjawab persoalan pekerja anak ataupun putus sekolah karena kejadian kehamilan yang tidak dikehendaki.
2. Meningkatnya usia harapan hidup memunculkan isu baru terkait dengan persoalan kependudukan, seperti isu kesejahteraan bagi lansia, termasuk layanan kesehatan dan jaminan sosial bagi lansia.
3. Penerapan pola perilaku hidup bersih dan sehat untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman risiko penyakit masih belum sepenuhnya baik. Termasuk didalamnya adalah pola umum gizi seimbang (PUGS), kesehatan lingkungan (sanitasi dan akses air bersih), pencegahan penyakit menular, aktifitas fisik, dan penggunaan obat.
4. Walaupun rasio sarana dan prasarana kesehatan sudah melampaui standar nasional, data dari tahun ke tahun menunjukkan fluktuasi (pada rasio dokter dan dokter spesialis per satuan penduduk) dan penurunan rasio sarana dan prasarana kesehatan (puskesmas dan rumah sakit). Hal ini perlu menjadi perhatian upaya pembangunan kesehatan, termasuk yang diselenggarakan oleh pihak swasta, untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan masyarakat.
5. Implementasi BPJS untuk jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara per 1 Januari 2014 menimbulkan beberapa tantangan, termasuk di Provinsi Jambi. Berbagai tantangan ini mencakup proses integrasi antara berbagai skema jaminan kesehatan yang sudah ada sebelumnya, sosialisasi kebijakan yang belum optimal ke segenap lapisan masyarakat, hingga sistem pendukung untuk pelaksanaan kebijakan yang belum sepenuhnya tersedia dan berjalan.

Solusi :

Langkah antisipatif dalam mengatasi permasalahan tersebut guna mencapai target yang telah ditentukan antara lain :

1. Kajian dan pengembangan strategi yang efektif untuk menjawab akar persoalan putus sekolah. Peran pemerintah bukanlah faktor tunggal namun menentukan karena menjadi katalisator dan fasilitator atas peran berbagai pihak baik unsur pemerintah maupun swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat. Hal ini bisa dilakukan antara lain melalui pemberdayaan masyarakat melalui posyandu, desa/kelurahan siaga, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi keagamaan.
3. Dalam konteks masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki ikatan kekerabatan dan jejaring sosial yang kuat, pemenuhan hak lansia akan kesejahteraan dan jaminan sosial bisa dilakukan dengan mensinergikan program dan layanan yang disediakan pemerintah dengan upaya sejenis yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat. Peran pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator diperlukan untuk memastikan adanya jaminan yang memadai bagi lansia atas hak-hak dasarnya untuk hidup secara layak dan bermartabat. Selain upaya perlindungan pemenuhan kebutuhan khusus, juga mencakup upaya untuk pengakuan dan membuka ruang partisipasi lansia dalam pembangunan. Upaya ini menjadipenting karena isu tentang pengabaian kapasitas lansia seringkali justru memperkuat kerentanan lansia itu sendiri. Faktanya, banyak potensi dan



kapasitas lansia yang bisa dikuatkan dan dikembangkan sebagai salah satu pilar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

4. Upaya-upaya untuk penerapan universal coverage melalui program BPJS perlu disinergikan dengan pendayagunaan dan pemberdayaan baik aparatur pemerintah di wilayah Provinsi Jambi, organisasi masyarakat yang terkait maupun juga peran media massa untuk sosialisasi kebijakan yang efektif. Begitu juga integrasinya dengan sistem dan penyediaan layanan publik sehingga kualitas layanan kesehatan yang universal bisa didapatkan masyarakat secara baik dan memadai.

7. Sasaran Investasi Meningkatkan

a. Investasi PMA dan Nilai Investasi PMDN

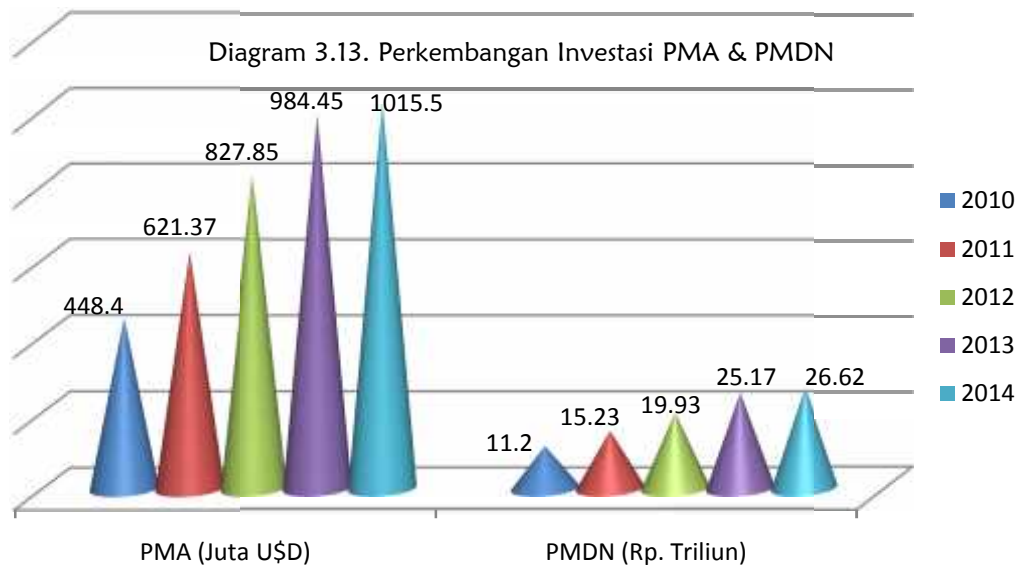
Pelaksanaan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama bertujuan untuk menumbuhkan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif sehingga terciptanya kemitraan dunia usaha, kemitraan antar usaha dalam rangka pengembangan penanaman modal di Provinsi Jambi. Upaya mewujudkan sasaran dari program peningkatan promosi dan kerjasama ini, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu telah melaksanakan beberapa upaya antara lain :

- a. Meningkatkan Kerjasama strategis (kemitraan) untuk pengembangan investasi dan pemutakhiran data informasi investasi daerah,
- b. Memfasilitasi serta Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal,
- c. Meningkatkan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal,
- d. Melaksanakan Pameran dan Temu usaha di dalam negeri; Kegiatan Pameran dan Temu usaha di Luar Negeri,
- e. Profile Peluang Investasi di Provinsi Jambi.

Peningkatan Kerjasama strategis (kemitraan) antara pengusaha besar dengan UMKM sebagai upaya pengembangan investasi di provinsi jambi tahun 2014 dalam rangka untuk memfasilitasi pertemuan melalui kegiatan temu usaha kemitraan antara usaha kecil menengah dan koperasi dengan usaha besar dalam provinsi Jambi. Untuk menginventarisir mitra usaha potensial di provinsi jambi, dalam rangka menarik investor potensial ke daerah serta menciptakan sutau pertemuan yang dapat mendorong dan mendukung iklim investasi sehingga terbentuknya kemitraan usaha baru antara penanaman modal dengan pemerintah. Selain itu, pelaksanaan Jambi Bisnis Forum (JBF) adalah sebagai branding untuk penyebaran citra positif daerah khususnya provinsi jambi dalam rangka menarik lebih banyak investor potensial ke daerah serta menciptakan suatu pertemuan yang dapat mendorong dan mendukung iklim investasi.

Pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) yang mencerminkan nilai investasi di Jambi mencapai Rp 4,30 triliun dengan pangsa 18,41% dari total PDRB Jambi, relatif sama dengan pangsa pada triwulan yang sama tahun 2013 (18,61%). Investasi mengalami pertumbuhan 6,13% (yoy) dengan andil pertumbuhan mencapai 1,16%. Namun demikian, secara triwulanan, investasi mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan kecenderungan tingginya realisasi investasi di akhir tahun dan banyaknya proyek investasi yang masih dalam tahap pengadaan di awal tahun.

Sejak tahun 2012 lalu, investasi di Jambi terus menunjukkan peningkatan yang disebabkan oleh tingginya pembangunan fisik baik oleh pemerintah ataupun swasta. Kondisi ini juga didukung oleh peningkatan kredit investasi yang mencapai 47,75% (yoy). Sementara menurut pendapat pengusaha melalui hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), optimisme pengusaha dalam memandang kondisi bisnis masih cukup baik. Hal ini terlihat dari masih positifnya indeks situasi bisnis yaitu sebesar 23,40% 8. Dari 150 responden yang disurvei, 68,09% responden menyatakan bahwa situasi bisnis kedepan relatif stabil, sementara 27,66% menyatakan akan baik dan hanya 4,26% yang menyatakan akan memburuk.



Jumlah investasi Jambi yang dicatat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp. 26,62 Triliun. Investasi tersebut meningkat dibandingkan posisi yang sama tahun lalu yang realisasinya sebesar Rp 0. Sejalan dengan hal tersebut, investasi asing melalui penanaman modal asing (PMA) juga meningkat 48,21% dari tahun lalu menjadi USD 1.015 juta. Investasi Jambi sebagian besar dialokasikan pada sektor pertanian.

Berbagai upaya yang telah dilakukan telah meningkatkan realisasi investasi PMDN sampai dengan akhir September 2014 sebesar Rp. 26,62 Triliyun mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2013 yakni sebesar Rp. 25,17 Triliyun, sedangkan realisasi untuk investasi PMA pada tahun 2013 sebesar 7,72 Triliyun juga mengalami peningkatan menjadi Rp9,3 Triliyun pada tahun 2014.

Tabel 3.29. Perbandingan dan Capaian Kinerja Nilai Investasi PMA dan Nilai Investasi PMDN Tahun 2010 s.d. 2014

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Periode capaian kinerja			Capaian Kinerja			Capaian Target s.d. 2014	Target Akhir RPJMD
			2011	2012	2013	2014		% Capaian		
						Target	Realisasi			
1.	Investasi PMA	Rp5,05 T USD448,4	Rp6,98 T USD621,3	Rp7,49 T USD827,8	Rp7,72T USD984,4	Rp8 T USD1.001	Rp9,3 T USD1.015	101	Rp9,3 T USD1.015	Rp1,101 USD1.161
2.	Investasi PMDN	Rp 11,2 Triliun	15,23 Triliun	19,93 Triliun	25,17 Triliun	Rp. 16,52 Triliun	26,62 Triliun	161	26,62 Triliun	18,36 Triliun

Sumber : BPMD & PPT Provinsi Jambi, 2014

Capaian keberhasilan peningkatan nilai investasi di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan peningkatan akses terhadap nilai investasi. Dalam tahun 2014, program yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini terdiri dari 4 program, yakni :

1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
3. Program penyiapan potensi sumber daya, sarana, dan prasarana daerah
4. Program pengembangan kemitraan

Permasalahan :

Permasalahan yang ditemui dalam capaian kinerja peningkatan investasi di Provinsi Jambi ini antara lain :



1. Adanya keengganan para pelaku UMKM untuk meminjam modal usaha melalui perbankan, ini disebabkan karena suku bunga yang tinggi dan persyaratan yang memberatkan bagi pelaku UMKM.
2. Tidak semua Kabupaten/ Kota mempunyai institusi penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai layanan kemudahan bagi investor untuk mengurus perizinan dalam rangka menanamkan modalnya di Prov. Jambi.
3. Belum tersedianya data rencana dan realisasi PMA dan PMDN baik pada instansi terkait ataupun pemerintah Kabupaten /kota.
4. Belum adanya kesamaan persepsi antar investor dengan aparaturnya daerah mengenai kebijakan serta peraturan terkait dengan PMA dan PMDN.
5. Belum tersedianya data rencana dan realisasi PMA/PMDN baik pada instansi terkait ataupun pemerintah Kabupaten/ Kota.
6. Belum adanya kesamaan persepsi antar investor dengan aparaturnya daerah mengenai kebijakan serta peraturan terkait dengan PMA/PMDN.
7. Masih rendahnya kualitas produk pameran.

Solusi :

Langkah antisipatif dalam mengatasi permasalahan tersebut guna mencapai target yang telah ditentukan antara lain :

1. Melakukan inventarisasi data dan potensi/peluang investasi untuk diperbaharui dan dikembangkan.
2. Pembentukan instansi penanaman modal di Kabupaten/ Kota dan pelaksanaan RKPPMD yang tepat waktu.
3. Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan secara berkala dan memberikan teguran jika ada pelanggaran.
4. Penyatuan pandangan dalam pelaksanaan promosi dan dilakukan koordinasi terpadu dengan instansi terkait.
5. Pengintensifan sumberdaya yang ada dalam penyusunan bahan promosi.
6. Penyederhanaan prosedur perizinan perusahaan PMA/PMDN dengan membentuk pelayanan terpadu satu pintu, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota

b. Nilai Ekspor

Dalam rangka meningkatkan nilai ekspor, telah dilaksanakan program peningkatan dan pengembangan ekspor yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor non migas Provinsi Jambi baik volume maupun nilai ekspor, sehingga apabila nilai ekspor Jambi meningkat akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus juga membuka lapangan pekerjaan dan mendatangkan devisa bagi negara.

Realisasi nilai ekspor non migas 2014 mengalami penurunan sebesar 26,58 persen yaitu dari target US\$ 1.800 juta menjadi US\$ 1.422 juta bila dibandingkan dengan realisasi periode yang sama pada tahun 2013. Begitu juga bila dibandingkan dengan target 2014 mengalami penurunan sebesar 26,58 persen. Penurunan nilai tersebut terutama disebabkan karena penurunan nilai ekspor yang cukup signifikan dari kelompok pertanian terutama komoditi pinang sebesar 1,57 persen dan kelompok industri terutama komoditi kayu lapis dan olahan lainnya sebesar 1,20 persen. Kinerja tersebut tidak terlepas dari perkembangan permasalahan ekonomi yang terjadi di AS dan kawasan eropa serta menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi Negara mitra dagang utama Indonesia sehingga berimplikasi terhadap kinerja ekspor dan impor Provinsi Jambi. Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Jambi menurut Kelompok Komoditi posisi November 2014 dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

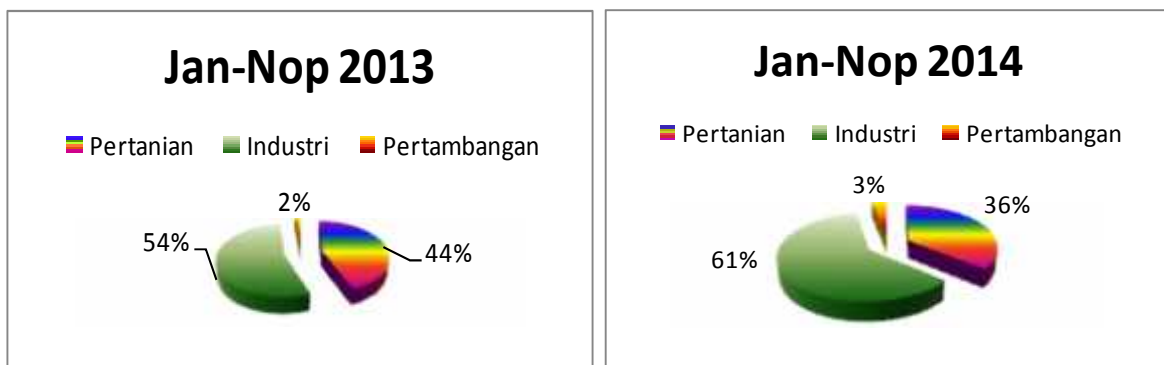


Tabel 3.30. Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Jambi Menurut Kelompok Komoditi

Kelompok Komoditi	Nilai Ekspor		% Perubahan Jan-Des 2014 terhadap Jan-Nop Tahun 2013
	Kumulatif Jan-Nop 2013	Kumulatif Jan-Nop 2014	
Pertanian	28.207.924	23.003.558	(18,45)
1. Pinang	28.032.588	22.734.600	(18,90)
2. Kopi, Teh, Rempah-rempah	173.701	243.106	39,96
3. Lainnya	1.635	25.852	1.481,16
Industri	936.288.563	837.267.744	(10,58)
1. Minyak Nabati	160.394.002	104.612.640	(34,78)
2. Karet Olahan	617.936.563	505.073.200	(18,26)
3. Kayu Lapis dan Olahan Lainnya	16.510.836	17.590.696	6,54
4. Kertas/Pulp	139.291.501	209.386.122	50,32
5. Arang	674.302	245.785	(63,55)
6. Lainnya	1.481.359	359.299	(75,75)
Pertambangan	880.739.209	576.872.787	(34,50)
1. Migas	731.475.316	486.731.524	(33,46)
2. Pertambangan Lainnya	149.263.893	90.141.263	(39,61)
3. Batubara	149.263.893	90.141.263	(39,61)
4. Lainnya	0	0	0
Total Ekspor	1.437.235.696	1.282.430.000	(12,12)
Total Ekspor Non Migas	1.113.760.380	950.412.565	(14,67)
Total Ekspor Non Migas & Batubara	964.496.487	860.271.302	(10,81)

Sumber : Disperindag Provinsi Jambi 2014

Gambar 3.13. Struktur Nilai Ekspor Provinsi Jambi Jan-Nop 2013 dan Jan-Nop 2014



Sumber : Disperindag Provinsi Jambi 2014

Melihat gambar tersebut di atas terlihat bahwa komoditi ekspor Provinsi Jambi masih didominasi oleh sektor industri komoditi Karet, Minyak Nabati (CPO dll), Pulp dan produk Tissue. Adapun negara tujuan ekspor komoditas dari Provinsi Jambi selama kurun waktu tersebut mencapai 13 Negara, dengan 6 negara tujuan utama ekspor Thailand, Jepang, China, Malaysia, India dan Amerika Serikat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.31. Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Jambi Menurut Negara Tujuan Utama

Negara Tujuan Utama	Nilai Ekspor		% Perubahan Jan-Des 2014 terhadap Jan-Des Tahun 2013
	Kumulatif Jan-Nop 2013	Kumulatif Jan-Nop 2014	
Asean	211.194.566	48.194.840	(77,18)
1. Singapura	167.641.041	109.385.782	(34,75)
2. Malaysia	539.831.248	450.745.284	(16,50)
3. Thailand	16.036.151	13.709.454	(14,51)



Asean lainnya	14.065.812	15.171.871	7,86
	15.353.876	13.097.853	(14,69)
Uni Eropa	2.589.469	11.235.927	333,91
4. Jerman	61.802.603	49.140.963	(20,49)
5. Perancis			
6. Inggris	173.498.131	151.963.429	(12,41)
Uni Eropa lainnya	274.717.409	213.333.221	(22,34)
Negara Utama Lain	56.863.644	35.734.488	(37,16)
7. Cina	135.010.738	84.792.858	(37,20)
8. Jepang	6.109.271	29.704.529	386,22
9. Amerika Serikat	39.534.552	49.805.756	25,98
10. India	25.426.471	19.290.178	(24,13)
11. Australia			
12. Korea Selatan			
13. Taiwan			
Total 13 Negara	1.661.836.228	1.232.456.016	(25,84)
Lainnya	105.560.714	141.837.656	34,37
Total Ekspor	1.845.235.696	1.437.144.089	(22,12)

Secara umum migas nilai ekspor melalui pelabuhan di Provinsi Jambi pada Bulan Nopember 2014 mengalami penurunan. Penurunan ekspor terjadi karena tidak ada ekspor migas yang melalui pelabuhan Jambi. Penurunan ekspor adalah ekspor ke Negara Thailand, sedangkan ekspor Jambi ke Negara lain mengalami peningkatan. Seperti ekspor ke Malaysia, Jerman, China, Amerika Serikat, India dan Korea Selatan.

Diagram 3.14. Perkembangan nilai Ekspor Provinsi Jambi 2010-2014



Sumber : Disperindag Provinsi Jambi 2014

Berdasarkan realisasi yang telah diperlihatkan oleh peningkatan nilai ekspor, maka dapat dievaluasi bahwa peningkatan sebagaimana tersebut di atas disebabkan oleh bergairahnya sektor ekonomi khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan serta terciptanya suasana kondusif yang tercipta di Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai ekspor.

Tabel 3.32. Perbandingan dan Capaian Kinerja Nilai Ekspor Tahun 2010 s.d. 2014

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Periode capaian kinerja			Capaian Kinerja			Capaian Target s.d. 2014	Target Akhir RPJMD
			2011	2012	2013	2014		% Capaian		
						Target	Realisasi			
1.	Peningkatan Nilai Ekspor	USD 1.209.672	USD 2.383.555	USD 1.659.055	USD 1.354.135	USD 1.800.000	USD 1.282.430	71,25	USD 2.383.555	USD 2.000.000

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2014



Memperhatikan tabel di atas terlihat bahwa nilai ekspor non migas Provinsi Jambi dari tahun ke tahun mengalami naik turun. Adapun faktor penyebabnya antara lain :

1. Menurunnya permintaan di beberapa Negara mitra dagang Indonesia diakibatkan oleh menurunnya harga beberapa komoditas utama ekspor Indonesia.
2. Kebijakan bea keluarnya produk ekspor yang kadang mengalami perubahan.
3. Kondisi perlambatan perekonomian di wilayah eropa yang menjadi pasar ekspor utama Indonesia.
4. Daya saing produk Indonesia menurun dan ditambah pula masalah retribusi fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).

Untuk meningkatkan pertumbuhan nilai ekspor Provinsi Jambi khususnya dan Indonesia umumnya, maka upaya yang perlu dilakukan dalam pengembangan ekspor antara lain :

1. Meningkatkan rangkaian kebijakan dan program yang difokuskan pada peningkatan kualitas SDM eksportir serta kualitas produk ekspor Indonesia.
2. Perlunya diversifikasi Negara mitra dagang serta produk ekspor / komoditas.
3. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing nasional agar Indonesia dapat menjaga nilai ekspor dan menghasilkan produk berkualitas ditingkat internasional.
4. Memfasilitasi eksportir dan UKM dalam melakukan pengembangan dan adaptasi produk guna meningkatkan kualitas dari produk ekspor utama dan produk potensial.
5. Meningkatkan industri hilir dengan membangun pabrik pengolah sehingga Provinsi Jambi khususnya dan Indonesia pada umumnya dapat mulai melakukan ekspor untuk produk olahan bahan mineral. Upaya hilir ini dapat melahirkan antara lain :
 - a. Membuka lapangan pekerjaan.
 - b. Keuntungan inovasi pada produk bernilai tambah tinggi bagi Negara kita.
 - c. Melakukan multiplier effect beberapa kemandirian dalam sektor ekspor nasional.
 - d. Peningkatan penerimaan Negara.

Capaian kinerja peningkatan nilai ekspor ini merupakan upaya yang dilakukan melalui program :

1. Program peningkatan dan pengembangan ekspor
2. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
3. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
4. Program pengembangan standarisasi nasional
5. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
6. Program pengembangan industri kecil dan menengah
7. Program penataan struktur industri

c. Persentase Koperasi Berkualitas / berprestasi

Melalui Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi yang bertujuan meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif. Secara organisasi usaha, diharapkan memiliki daya saing ekonomi sebanding dengan badan usaha lainnya. Dengan demikian diharapkan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat primer dan sekunder tertata dan berfungsi dengan baik; infrastruktur pendukung pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas; lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efektif dan mandiri; serta praktek berkoperasi yang baik (*best practices*) semakin berkembang di kalangan masyarakat luas.

Untuk mendukung program tersebut, maka telah dilaksanakan beberapa langkah strategis diantaranya :

1. Mengembangkan jaringan kemitraan usaha koperasi,
2. Pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi,
3. Pembinaan dan pengembangan kader koperasi,



4. Pembinaan dan pengembangan usaha koperasi,
5. Peningkatan Kualitas Produk Usaha Anggota Koperasi.

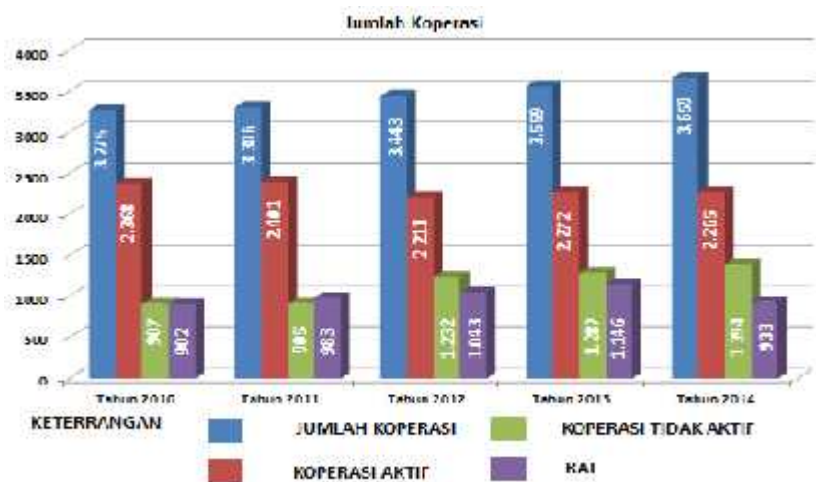
Koperasi Berkualitas merupakan koperasi yang dikelola secara profesional, mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat. Terdapat tiga cara untuk mewujudkan koperasi Berkualitas. Pertama, melakukan klasifikasi semua koperasi. Diikuti cara kedua, masuk dalam klasemen yang dilakukan dari lembaga independen dari luar. Lalu ketiga, mampu mendorong koperasi-koperasi yang berada pada jaringannya untuk menjadi koperasi berprestasi.

Capaian dari program ini yaitu terwujudnya

pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah serta Koperasi secara dinamis dan berkelanjutan. Hal tersebut digambarkan dari peningkatan jumlah koperasi dari 3.559 unit di tahun 2013 menjadi 3.559 pada tahun 2013 atau naik sebesar 2,73%, sedangkan Target RPJMD tahun 2014 sebanyak 3.995 unit koperasi. Sedangkan untuk Koperasi yang dapat melaksanakan RAT juga mengalami penurunan

sebesar 22,82 % dari 1.152 pada tahun 2013 koperasi menjadi 933 pada tahun 2014, jumlah tersebut tidak mencapai target dalam RPJMD Provinsi, dimana pada tahun 2014 ditetapkan sebanyak 1.011 koperasi. Perkembangan jumlah koperasi dapat dilihat pada diagram 3.14.

Diagram 3.15. Jumlah koperasi, koperasi aktif, koperasi RAT, koperasi tidak aktif



Berdasarkan diagram di atas, terlihat perkembangan koperasi pada tahun 2010 berjumlah koperasi 3.275 dengan rincian 2.368 koperasi aktif, 907 koperasi tidak aktif serta 902 koperasi yang melaksanakan RAT. Tahun 2011 jumlah koperasi 3.306 dengan rincian 2.401 koperasi aktif, 905 koperasi tidak aktif serta 983 koperasi yang melaksanakan RAT. Tahun 2012 jumlah koperasi 3.443 dengan rincian 2.211 koperasi aktif, 1.232 koperasi tidak aktif serta 1.043 koperasi yang melaksanakan RAT. Tahun 2013 jumlah koperasi 3.559 dengan rincian 2.272 koperasi aktif, 1.287 koperasi tidak aktif serta 1.146 koperasi yang melaksanakan RAT. Tahun 2014 jumlah koperasi 3.659 dengan rincian 2.265 koperasi aktif, 1.394 koperasi tidak aktif serta 933 koperasi yang melaksanakan RAT.

Adapun indikator keberhasilan lainnya yaitu dengan terpilihnya beberapa Koperasi di Provinsi Jambi, yang mendapat prestasi di tingkat nasional, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.33. Perkembangan Prestasi Koperasi Tingkat Nasional Tahun 2014

No.	Kelompok>Nama Koperasi	Kelompok Koperasi	Alamat
1.	Primkop Kartika Dara Jingga	Konsumen	Kota Jambi
2.	Kopkar PT. Putra Sumber Utama Timber (PSUT)	Produsen	Muaro Jambi
3.	Primkop Kartika Alam Sakti	Produsen	Sungai Penuh
4.	Koperasi Maju Bersama	Jasa	Muaro Jambi

Sumber : Dinas Koperasi Provinsi Jambi



Perbandingan kinerja persentase koperasi aktif dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.34. Perbandingan dan Capaian Kinerja Persentase Koperasi Berkualitas Tahun 2010 s.d. 2014

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Periode capaian kinerja			Capaian Kinerja			Capaian Target s.d. 2014	Target Akhir RPJMD
			2011	2012	2013	2014		% Capaian		
						Target	Realisasi			
1.	Persentase koperasi berkualitas (berprestasi)	69,49 (902 unit)	71,50 (983 unit)	72 (1.053 unit)	73,50 (1.146 unit)	73,50 (1.146 unit)	72,6 (933 unit)	98,77	74,51	78

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2014

Angka pertumbuhan koperasi yang ditargetkan sebesar 1% pada akhir tahun 2014 terealisasi pertumbuhan koperasi yang sebesar 1,1% data ini merupakan perkembangan koperasi dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014, dimana jumlah koperasi yang ada pada wilayah Provinsi Jambi sejumlah 3.559 unit pada tahun 2013 meningkat menjadi 3.659 pada Tahun 2014. Namun persentase koperasi berkualitas berbanding terbalik dengan jumlah keseluruhan koperasi di tiap tahunnya, dengan realisasi tahun 2014 sebesar 72,6% atau dengan jumlah sebesar 933 unit koperasi.

Capaian peningkatan koperasi berkualitas di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan peningkatan koperasi berkualitas. Dalam tahun 2014, program yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini terdiri dari 5 program, yakni :

1. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
2. Program pengembangan kemitraan
3. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
4. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
5. Program peningkatan kegiatan usaha mikro kecil menengah

d. Peningkatan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah.

Melalui Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah yang bertujuan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan serta meningkatkan profesionalisme SDM guna meningkatkan daya saing UMKM, dilakukan berbagai upaya strategis diantaranya :

- a. Memfasilitasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan kemitraan di Provinsi Jambi,
- b. Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bagi KUKM,
- c. Melatih pengurus/pengelola Koperasi/KUD,
- d. Pendataan dan Pemuktahiran Data UMKM se Provinsi Jambi,
- e. Pelatihan Manajemen Usaha Kecil.

Dalam rangka memperkuat dan mempermudah dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan setiap peluang dan potensi sumber daya lokal yang ada secara optimal sesuai tuntutan pasar, maka telah dilakukan upaya antara lain ;

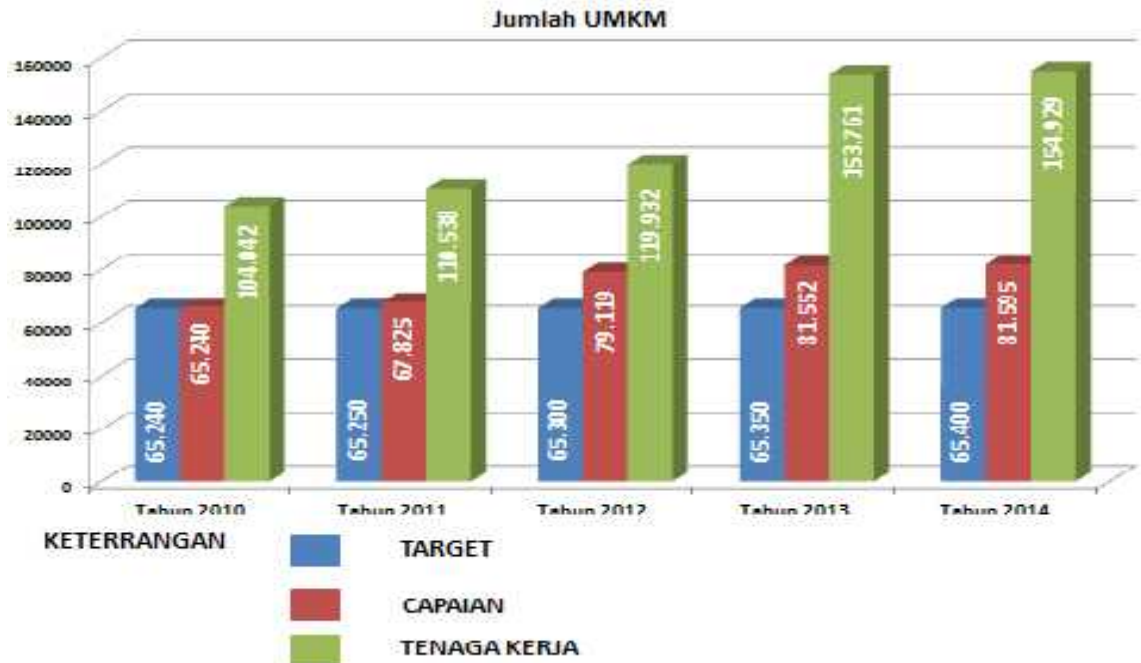
- a. Pemberdayaan UMKM melalui One Village One Product (OVOP)
- b. Mengembangkan promosi produk UMKM tingkat nasional, regional dan luar negeri
- c. Mengembangkan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan koperasi dan UMKM
- e. Pemberdayaan dan Pengembangan KSP/USP Kop Penerima Dana Bergulir
- f. Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Bagi PMK
- g. Pemberdayaan KSP/USP Kop dan LKM berwawasan Gender penerima dana bergulir
- h. Peningkatan keterampilan bagi pengelola KSP/USP-Koperasi
- i. Sosialisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Pemanfaatan Dana KUR dan LPDB di Provinsi Jambi

Capaian pelaksanaan program ini telah menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif dan meningkatnya kesadaran berwirausaha sebagai budaya serta mengembangkan kewirausahaan di



kalangan masyarakat. Jumlah UMKM mengalami peningkatan dari 81.552 Unit pada tahun 2013, meningkat menjadi 81.959 Unit pada tahun 2014, atau mengalami peningkatan 0,49%. Rincian lebih detail, dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Diagram 3.16. Perkembangan UMKM tahun 2013 dan 2014



Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2010 target perkembangan UMKM di Provinsi Jambi sebanyak 65.240 UMKM dengan capaian 65.240 UMKM serta penyerapan tenaga kerja sebanyak 104.042 orang, tahun 2011 target perkembangan UMKM di Provinsi Jambi sebanyak 65.250 UMKM dengan capaian 67.825 UMKM serta penyerapan tenaga kerja sebanyak 110.538 orang, tahun 2012 target perkembangan UMKM di Provinsi Jambi sebanyak 65.300 UMKM dengan capaian 79.119 UMKM serta penyerapan tenaga kerja sebanyak 119.932 orang, tahun 2013 target perkembangan UMKM di Provinsi Jambi sebanyak 65.350 UMKM dengan capaian 81.552 UMKM serta penyerapan tenaga kerja sebanyak 153.761 orang, tahun 2014 target perkembangan UMKM di Provinsi Jambi sebanyak 65.400 UMKM dengan capaian 81.595 UMKM serta penyerapan tenaga kerja sebanyak 154.929 orang.

Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah ini tentunya tidak terlepas dari Pertumbuhan usaha industri kecil, menengah, yang ditandai dengan : Pertumbuhan Produksi, Pertumbuhan Penjualan, Pertumbuhan Pendapatan, Pertumbuhan Laba.

Angka pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil (IMK) akan disajikan menurut 7 (tujuh) jenis industri, antara lain industri makanan, industri pakaian jadi, industri kayu, barang dari kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, industri barang galian bukan logam, industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya dan Pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil triwulanan (y-on-y) pada triwulan III Tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 3,65 persen dibandingkan dengan triwulan III tahun 2013. Demikian juga angka pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil untuk nasional mengalami peningkatan sebesar 5,18 persen.



Tabel 3.35. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan (*y-on-y*) Triwulan III Tahun 2014

No	Kode KBLI	Jenis Industri	Pertumbuhan (%)	
			Triwulanan (<i>y-on-y</i>)	
			Provinsi Jambi	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	10	Industri Makanan	12,32	6,67
2	14	Industri Pakaian Jadi	-4,16	1,78
3	16	Industri Kayu, Barang dari Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	16,82	0,05
4	20	Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia	8,34	-4,66
5	23	Industri Barang Galian Bukan Logam	2,39	2,52
6	25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	-0,66	3,30
7	31	Industri Furnitur	11,85	8,88
IMK (Industri Mikro dan Kecil)			3,65	5,18

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2014

Dari ketujuh jenis industri tersebut, jenis industri yang mengalami kenaikan antara lain :

1. Industri kayu, barang dari kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, naik sebesar 16,82 persen. Sedangkan angka pertumbuhan nasional naik sebesar 0,05 persen.
2. Industri makanan, naik sebesar 12,32 persen. Sedangkan untuk angka pertumbuhan nasional meningkat sebesar 6,67 persen.
3. Industri furniture, naik sebesar 11,85 persen, sedangkan angka pertumbuhan nasional hanya mengalami kenaikan sebesar 8,88 persen.
4. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, naik sebesar 8,34 persen, sementara angka pertumbuhan nasional mengalami penurunan sebesar 4,66 persen.

Adapun penurunan terjadi di beberapa jenis industri antara lain :

1. Industri pakaian jadi, turun sebesar 4,16 persen. Sementara angka pertumbuhan nasional meningkat sebesar 1,78 persen.
2. Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya, turun sebesar 0,66 persen.
3. Sedangkan angka pertumbuhan nasional mengalami peningkatan sebesar 3,30 persen.
4. Industri barang galian bukan logam, turun sebesar 2,39 persen, demikian juga angka pertumbuhan nasional turun sebesar 2,52 persen.

Pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil triwulanan (*q-to-q*) pada triwulan III tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 4,44 persen dibandingkan dengan triwulan II tahun 2014. Sedangkan angka pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil secara nasional, mengalami penurunan sebesar 3,43 persen pada triwulan III tahun 2014 dibandingkan dengan triwulan II tahun 2014. Pertumbuhan produksi industri manufaktur Mikro dan Kecil per triwulannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 3.36. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan (q -to- q) Triwulan III Tahun 2014 Provinsi Jambi

No	Kode KBLI	Jenis Industri	Pertumbuhan (%)	
			Triwulanan (q -to- q)	
			Provinsi Jambi	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	10	Industri Makanan	-6,79	-6,24
2	14	Industri Pakaian Jadi	-6,40	-5,10
3	16	Industri Kayu, Barang dari Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	11,03	-4,30
4	20	Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia	0,25	1,41
5	23	Industri Barang Galian Bukan Logam	3,22	5,26
6	25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	-13,75	-5,15
7	31	Industri Furnitur	6,18	1,09
IMK (Industri Mikro dan Kecil)			-4,44	-3,43

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2014

Jenis industri yang mengalami penurunan pada triwulan III tahun 2014 dibandingkan dengan triwulan II tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Industri barang logam bukan mesin dan peralatannya (kode 25), turun sebesar 13,75 persen. Demikian juga halnya dengan angka pertumbuhan nasional yang mengalami penurunan sebesar 5,15 persen.
2. Industri makanan, turun sebesar 6,79 persen. Sedangkan angka pertumbuhan nasional turun sebesar 6,24 persen.
3. Industri pakaian jadi, turun sebesar 6,40 persen. Sedangkan angka pertumbuhan nasional mengalami penurunan sebesar 5,10 persen.
4. Industri furniture (kode 31), turun sebesar 6,18 persen. Adapun angka pertumbuhan nasional yang mengalami kenaikan sebesar 1,09 persen.
5. Industri barang galian bukan logam (kode 23), turun sebesar 3,22 persen. Demikian juga halnya dengan angka pertumbuhan nasional mengalami penurunan yaitu sebesar 5,26 persen.

Adapun jenis industri yang mengalami kenaikan adalah :

1. Industri kayu, barang dari kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, naik sebesar 11,03 persen. Sementara untuk angka pertumbuhan nasionalnya mengalami penurunan sebesar 4,30 persen.
2. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia (kode 20), naik sebesar 0,25 persen, sedangkan angka pertumbuhan nasional naik sebesar 1,41 persen.

Perkembangan kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur melalui perkembangan tingkat pendapatan. Secara umum, selama periode 2011 - 2013 tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Jambi mengalami peningkatan seperti yang ditunjukkan dengan semakin tingginya tingkat pengeluaran perkapita sebagai proxy pendapatan, baik secara nominal maupun riil. Pengeluaran nominal per kapita penduduk meningkat dari Rp 601.080 pada tahun 2011 menjadi Rp 684.943 pada tahun 2013.

Perkembangan tingkat kesejahteraan juga dapat diamati berdasarkan perubahan persentase pengeluaran yang dialokasikan untuk non-makanan, dimana semakin tinggi persentase pengeluaran



non-makanan dapat mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan. Berdasarkan data yang tersedia, terlihat bahwa persentase pengeluaran untuk non-makanan meningkat lebih tinggi untuk non-makanan meningkat lebih tinggi selama periode 2011-2013, dibanding dengan peningkatan pada kelompok makanan.

Peningkatan pendapatan menjadi salah satu penanda keberhasilan pembangunan terutama dari aspek ekonomi. Walaupun pendekatan pembangunan telah mengalami perkembangan yang lebih melihat pentingnya pengembangan kapabilitas manusia, namun aspek ekonomi – yang diwakili antara lain oleh pendapatan – tetaplah menjadi bagian kunci dalam pembangunan itu sendiri.

Peningkatan pendapatan juga menggambarkan bagaimana manfaat terhadap akses pembangunan telah dirasakan oleh warga negara. Namun demikian, penting untuk diperhatikan, bahwa sebagaimana halnya banyak capaian pembangunan, peningkatan pendapatan juga bukan hanya merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau negara sendiri. Peran dari pihak non negara, seperti swasta dan masyarakat adalah pilar kunci yang menyumbang pada capaian peningkatan pendapatan.

Gambar 3.14. Pelatihan Kewirausahaan



Peningkatan pendapatan ditargetkan naik dari Rp 6,68 juta per kapita per tahun menjadi Rp 7 juta per kapita per tahun. Realisasinya mencapai nilai pendapatan sebesar Rp 6,94 juta per kapita per tahun, atau sebanyak 99,14% dari target yang dicanangkan. Ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik untuk tahun 2014. Selain itu, bila disandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini telah menyumbang sebanyak 81,65% dari target akhir RPJMD untuk meningkatkan pendapatan sebanyak Rp8.5 juta per kapita per tahun pada tahun 2015.

PDRB sebagai ukuran produktifitas mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. Secara nominal Provinsi Jambi hanya menyumbang dibawah 1 persen terhadap pembentukan PDB. Sementara pendapatan perkapita menunjukkan bahwa pendapatan perkapita penduduk Provinsi Jambi cukup baik, hal ini dapat dilihat dari angka PDRB perkapita yang selalu meningkat bahkan sudah melebihi 26 juta pada tahun 2013. Dalam 5 tahun terakhir peningkatan angka PDRB dua kali lipat, sehingga secara otomatis PDRB perkapita pun meningkat relatif lebih tinggi. Pada tahun 2011 PDRB perkapita masyarakat Jambi hanya sebesar 19,9 juta dan pada tahun 2013 ini telah mencapai angka 26,0 juta, atau naik sebesar 30 persen.

Untuk melihat perbandingan capaian kinerja peningkatan jumlah unit usaha mikro dan kecil dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.37. Perbandingan dan Capaian Kinerja Peningkatan Jumlah Unit Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2010 s.d. 2014

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Periode capaian kinerja			Capaian Kinerja			Capaian Target s.d. 2014	Target Akhir RPJMD
			2011	2012	2013	2014		% Capaian		
						Target	Realisasi			
1.	Peningkatan pelaku unit usaha mikro dan kecil	65.240 unit (79,56 %)	67.825 unit (82,71 %)	79.119 unit (96,48 %)	81.552 unit (99,45 %)	81.570 unit (99,47 %)	81.595 unit (99,50%)	100,03	81.595 unit (99,50 %)	82.000 unit (100%)

Sumber : Disperindag Provinsi Jambi 2014



Capaian keberhasilan peningkatan koperasi berkualitas di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan peningkatan terhadap peningkatan investasi. Dalam tahun 2014, program yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini terdiri dari 8 program, yakni :

1. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM
2. Program penguatan permodalan UMKMK
3. Program peningkatan pemasaran hasil UMKMK
4. Program penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif
5. Program pengembangan standarisasi nasional
6. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
7. Program pengembangan industri kecil dan menengah
8. Program penataan struktur industri

Permasalahan :

1. Belum optimalnya pembinaan Industri Kecil, Menengah dan Besar (IKMB) yang disebabkan luasnya wilayah dan banyaknya pelaku usaha industri yang harus dibina merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program ini, disamping belum optimalnya dukungan keterkaitan mitra antara usaha besar dan BUMN baik berupa penyediaan bahan baku, modal dan pasar.
2. Terbatasnya akses pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka akses pasar, produktifitas, alih teknologi dan desain.

Solusi :

Meningkatkan mitra usaha dengan usaha besar dan BUMN, memasyarakatkan sistem teknologi informasi dan melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota dalam upaya pembinaan IKM.

e. Laju Inflasi Provinsi Jambi

Inflasi Provinsi Jambi dilihat dari perhitungan inflasi dari Kota Jambi sebagai pusat ibukota serta Kabupaten Bungo yang menjadi acuan pengukuran inflasi dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Laju inflasi kota Jambi tahun 2014 sebesar 8,72 persen, sedangkan laju inflasi Kabupaten Bungo, Jambi, tahun 2014 sebesar 8,99 persen. Laju inflasi di kota Jambi dan Kabupaten Bungo terjadi pada seluruh kelompok pengeluaran barang dan jasa.

Grafik Inflasi Jambi Tahun 2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

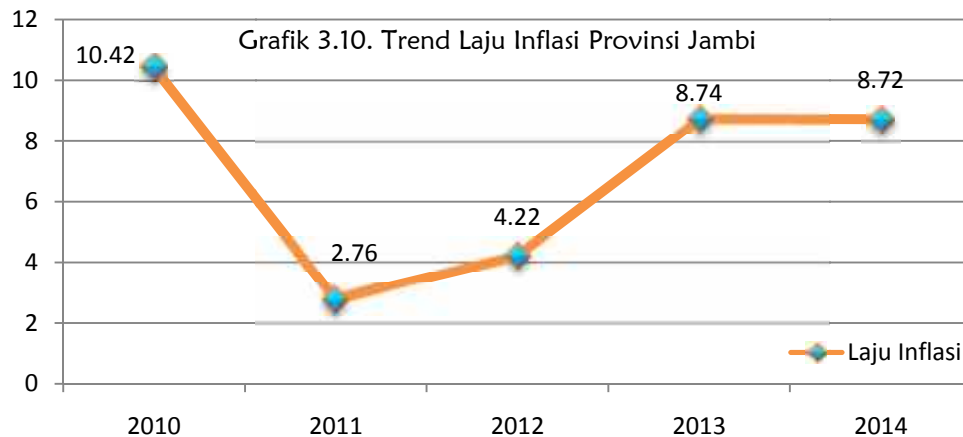


Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Jambi, BPS kota Jambi dan BPS Kabupaten Bungo di beberapa pasar tradisional dan pasar modern/swalayan, perkembangan harga eceran



beberapa komoditas Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan Desember 2014 menunjukkan adanya perubahan dibanding bulan November 2014. Dampaknya, bulan Desember itu kota Jambi mengalami inflasi sebesar 2,61 persen dengan IHK sebesar 120,04 dan Kabupaten Bungo mengalami inflasi sebesar 2,07 persen dengan IHK 119,06.

Berikut disajikan perkembangan inflasi di Provinsi Jambi tahun 2010 s.d. 2014



Inflasi di kota Jambi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada seluruh kelompok pengeluaran, inflasi pada kelompok bahan makanan sebesar 3,11 persen, kelompok makanan jadi seperti minuman, rokok dan tembakau besar sebesar 1,50 persen, kelompok perumahan air, listrik gas dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,00 persen, kelompok sandang sebesar 0,43 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,35 persen, kelompok pendidikan rekreasi dan olahraga sebesar 0,43 persen dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 5,63 persen.

Inflasi di Kabupaten Bungo juga terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada seluruh kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan sebesar 1,74 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,13 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,36 persen, kelompok pendidikan rekreasi dan olahraga sebesar 3,13 persen dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 6,60 persen. Komoditas utama yang memberikan andil terjadinya inflasi di kota Jambi bulan Desember 2014 diantaranya, bahan bakar jenis bensin, cabai merah, tarif listrik, angkutan dalam kota, beras, bayam, angkuta luar kota, rokok kretek filter, tomat dan bahan bakar jenis lainnya.



Gambar 3.15. Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Kota Jambi

Sementara komoditas utama yang memberikan andil terjadinya inflasi Kabupaten Bungo adalah kenaikan harga BBM, tarif listrik, beras, rekreasi, jengkol, cabai rawit, tarif kendaraan travel dan angkutan antar kota serta bahan bakar jenis solar. Dia juga mengungkapkan bahwa inflasi kota Jambi pada bulan terakhir 2014 berada pada urutan ke 10 se-Sumatera, sementara nilai inflasi Kabupaten Bungo berada pada urutan ke 16 se-Sumatera.



Tabel 3.38. Perbandingan dan Capaian Inflasi Provinsi Jambi Tahun 2010 s.d. 2014

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Periode capaian kinerja			Capaian Kinerja			Capaian Target s.d. 2014	Target Akhir RPJMD
			2011	2012	2013	2014		% Capaian		
						Target	Realisasi			
1.	Inflasi Provinsi Jambi	10,42	2,76	4,22	8,74	6,12	8,72	70,2	2,76	5,53

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2014

8. Sasaran Peningkatan Kunjungan Wisata dan Pertumbuhan Industri Pariwisata

a. Peningkatan Kunjungan Wisata dan Industri Pariwisata

Kebudayaan merupakan bagian penting dalam pembangunan karena terkait dengan persoalan karakter dan mental bangsa yang menentukan keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pertumbuhan industri pariwisata pada akhirnya nanti akan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisata.

Dalam rangka menumbuhkan sektor industri pariwisata dan kunjungan wisata, Pemerintah Provinsi Jambi memfokuskan upaya dengan mengoptimalkan sumber destinasi wisata yang mudah dijangkau jalur transportasi, antara lain dengan cara mengoptimalkan fungsi Museum Negeri Jambi, optimalisasi fungsi Taman Budaya Jambi, meningkatkan fungsi Museum Perjuangan Rakyat Jambi, serta pengembangan nilai dan geografis sejarah.

Gambar 3.16. Obyek wisata Percandian Muaro Jambi



Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya strategis diantaranya pendataan kebudayaan area Geopark Merangin bersama dengan tim Geologi dari Kementerian ESDM menuju pengembangan menjadi Global Geopark Network (GGN) serta telah bekerjasama pula dengan UNESCO. Sebagai informasi, pada tahun 2014 lalu telah dilakukan penelitian oleh pihak UNESCO. Selain itu, telah didata kebudayaan Seberang Kota Jambi, pendataan cagar budaya bawah air, penulisan buku sejarah, dan pendataan cagar budaya di Kabupaten Batanghari dan Kerinci, International Conference on Jambi Studies serta Malam Keagungan Melayu Jambi.

Dalam rangka meningkatkan fungsi Museum Negeri Jambi maka telah dilakukan survey rencana pengadaan koleksi ke 5 kabupaten/kota untuk memperoleh data koleksi yang perlu diselamatkan dan dilestarikan di museum dan survey pengelolaan data dan dokumentasi koleksi di 3 kabupaten, pengadaan bahan dan perawatan koleksi, pembuatan miniatur koleksi untuk sarana bimbingan dan publikasi, 3 pameran khusus dalam provinsi (pameran transportasi dan alat angkut tradisional Jambi, menelisik ragam hias koleksi museum dan pertunjukan seni tradisional dan pesona jalinan benang emas, serta melaksanakan pameran bersama di luar daerah dan pencetakan buku ragam pakaian pengantin Melayu Jambi.

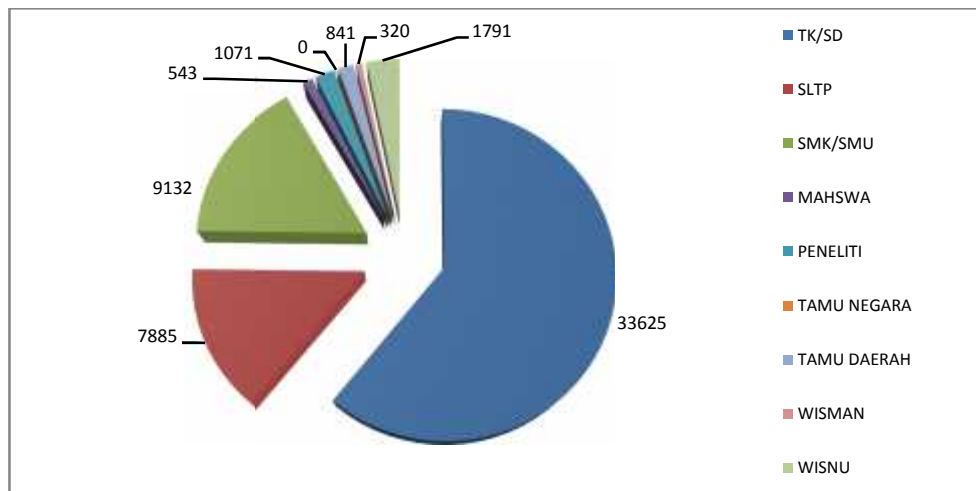
Tabel 3.39. Koleksi dan Kunjungan Wisatawan ke Museum Negeri Jambi (Museum Siginjei) Tahun 2012 – 2014

TAHUN	INDIKATOR							
	Koleksi	Tk/Sd	Sltp	Smu	Wis Man	Wis Nus	Lain2	Total
2012	3.100 buah	16.431	2.210	3.799	180	8.091	1.889	32.600
2013	3.371 buah	13.929	4.865	5.577	192	915	2.522	28.000
2014	3.371 buah	33.625	7.885	9.132	320	1.791	2.455	55.208

Sumber : UPTD Museum Negeri Jambi



Gambar 3.17. Proporsi Kunjungan wisatawan ke Museum Negeri Jambi (Museum Siginjei)



Sumber : UPTD Museum Negeri Jambi

Optimalisasi fungsi taman budaya dilaksanakan dengan berbagai upaya antara lain melaksanakan pergelaran Malam Keagungan Melayu Jambi 3 yang dihadiri 1.000 pengunjung, digelarnya dua karya seni yang hampir punah yakni Bekuaw dari Desa Pulau Aro dan tari Sayak Pisang dari Desa Air Batu dalam bentuk audio visual, pelaksanaan pergelaran yang didukung lebih 100 pendukung dan mengakomodir 7 kelompok seni, Festival Teater Remaja yang diikuti 12 sanggar seni, pergelaran seni didukung 100 pemain pada Festival Batanghari, terdapat dan terpetanya ragam hias batik serta sastra daerah Jambi dalam buku “Ragam Hias Batik dan Sastra Lisan Daerah Jambi”, terlatihnya 50 peserta pelatihan gendang Melayu Jambi yang terdiri dari pelajar, seniman, sanggar/kelompok seni, pergelaran seni pertunjukan Dul Muluk di Pekan Baru, pameran seni rupa diikuti 30 seniman dan lomba melukis ornamen diikuti 100 peserta, terbitnya website Taman Budaya Jambi www.tamanbudayajambi.co.id, dan apresiasi seni pertunjukan massal berupa pergelaran tari dan paduan suara diikuti 400 peserta.

Meningkatkan fungsi Museum Perjuangan Rakyat Jambi dengan cara menerbitkan naskah perjuangan rakyat Jambi, terselamatkannya benda bersejarah koleksi panglima pasukan Selempang Merah sebagai koleksi MPRJ, terwujudnya kerjasama antar pihak sekolah dengan MPRJ dalam berkreasi dan menanamkan cinta terhadap perjuangan bangsa, penyebaran informasi benda koleksi museum kepada masyarakat pada Festival Candi Muarojambi dengan jumlah kunjungan pada pameran sebanyak 300 orang dan pada pameran bersama di Yogyakarta serta bertambahnya koleksi MPRJ yaitu replika keris Siginjei dan keris Singa Merjaya.

Tabel 3.40. Jumlah Koleksi dan Kunjungan Wisatawan ke Museum Perjuangan Rakyat Jambi Tahun 2012 - 2014

Tahun	INDIKATOR							TOTAL
	KOLEKSI	TK/SD	SLTP	SMU	WIS MAN	WIS NUS	LAIN2	
2012	508 buah	7.468	2.695	1.814	42	4.407	195	16.621
2013	443 buah	3.955	1.151	722	23	2563	588	9.002
2014	6 buah	5.429	687	999	-	-	11.720	19.418

Sumber : UPTD Museum Perjuangan Rakyat Jambi

Keterangan : Koleksi MPRJ berupa foto-foto sebanyak 65 lembar dalam kondisi tidak layak dan beberapa dari koleksi tersebut berukuran kecil sehingga belum memenuhi syarat sebagai koleksi MPRJ, maka dari itu mengurangi jumlah koleksi secara keseluruhan dan pada jumlah kunjungan MPRJ mengalami penurunan disebabkan karena adanya kegiatan renovasi gedung.



Dari sisi Pengembangan Nilai dan Geografis Sejarah, telah dilakukan upaya penulisan sejarah lisan dalam bentuk dokumen yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian dan penulisan sejarah Jambi pada 3 Kabupaten Merangin, Sarolangun dan Tanjung Jabung Barat, pelaksanaan FGD tentang pengusulan kawasan situs percandian Muarajambi menuju UNESCO, pelatihan cara membaca dan menulis aksara Incung, dikenalnya Candi Muarajambi oleh 150 orang peserta city tour Seminar Internasional Sriwijaya, terinformasikannya cara konservasi koleksi naskah-naskah kuno pada 50 peserta.

Gambar 3.18. Kawasan Geopark Merangin Jambi

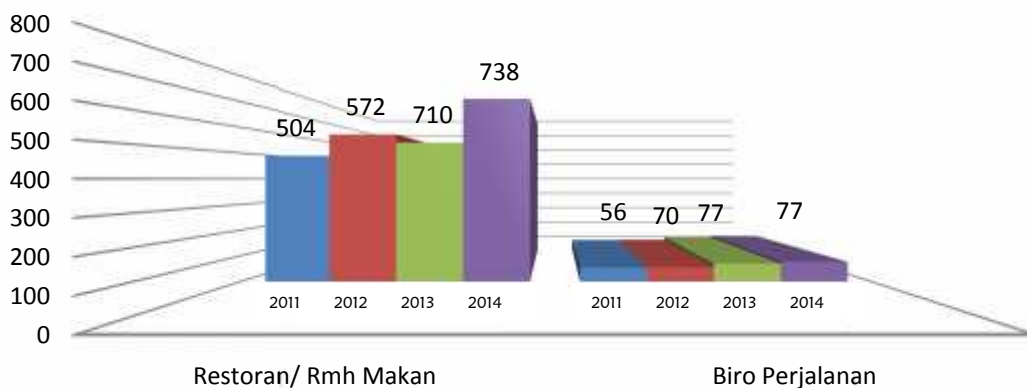


Khusus untuk Geopark Merangin Jambi, berdasarkan hasil evaluasi Tim Asesor UNESCO, Geopark Merangin Jambi belum memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Global Geopark Network. UNESCO memberi tambahan waktu selama tiga tahun untuk memperbaiki beberapa hal signifikan antara lain deliniasi kawasan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen pengelolaan kawasan.

Dengan dilaksanakannya berbagai event-event sebagaimana tersebut di atas, berdampak pada pertumbuhan industri pariwisata Provinsi Jambi. Perkembangan industri pariwisata secara bertahap menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Hal ini terbukti dengan bertambahnya jumlah hotel, restoran dan rumah makan, dan biro perjalanan wisata. Secara global perkembangan kunjungan wisatawan dan industri pariwisata di Provinsi Jambi dapat dilihat pada diagram berikut ini :

Diagram 3.17.

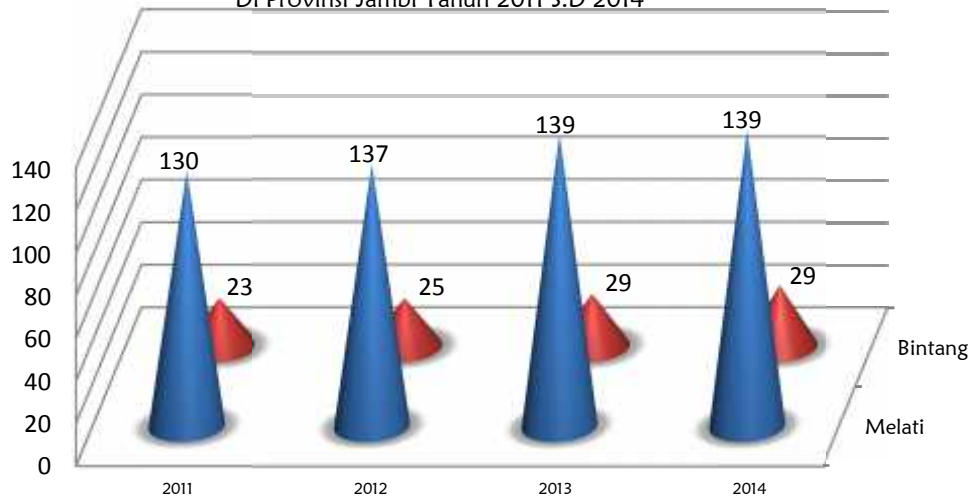
% Capaian Pertumbuhan Usaha Jasa Pariwisata
(Restoran, Rumah Makan Dan Biro Perjalanan)
DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 S.D 2014



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi 2014



Diagram 3.18.
Peningkatan Usaha Jasa Akomodasi
(Hotel Bintang Dan Hotel Non Bintang)
Di Provinsi Jambi Tahun 2011 S.D 2014



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi 2014

Dari dua grafik di atas dapat dilihat pertumbuhan industri pariwisata yang mencakup perhotelan, restoran/rumah makan, serta biro perjalanan wisata mengalami pergerakan positif di setiap tahunnya. Hal ini dirasa cukup menggembirakan karena industri pariwisata dapat berkontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.

Tabel 3.41. Perkembangan Kunjungan Wisata Ke Provinsi Jambi

No.	INDIKATOR	CAPAIAN PADA TAHUN				KETERANGAN
		2012	2013	2014	%	
I	WISATAWAN	(orang)	(orang)	(orang)		
a.	Mancanegara Terdiri dari :	9.231	9.919	10.056	1,38	Sumber data : 1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi 2. Jumlah Hotel di Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi
	1. Singapura	1.374	1.475	1.475	-	
	2. Malaysia	1.716	1.740	1.752	0,69	
	3. Thailand	9	11	11	-	
	4. Philipina	31	44	44	-	
	5. Brunei	-	-	-	-	
	6. China	2.733	2.935	2.954	0,65	
	7. Taiwan	1.101	1.108	1.128	1,81	
	8. Jepang	667	881	881	-	
	9. India	668	681	681	-	
	10. U S A	592	627	630	0,48	
	11. Australia	22	25	28	12,00	
	12. Eropa	214	249	295	18,47	
	13. Arab Saudi	45	64	64	-	
	14. Iran	9	13	13	-	
	15. Turki	6	9	9	-	
	16. Denmark	7	10	36	260,00	
	17. Korea	16	20	20	-	
	18. Jerman	21	27	35	29,63	
b.	Nusantara	1.278.240	1.444.049	1.520.000	5,99	
II.	HOTEL					
	- Bintang	25	29	29	0	
	- Melati	137	139	139	7	



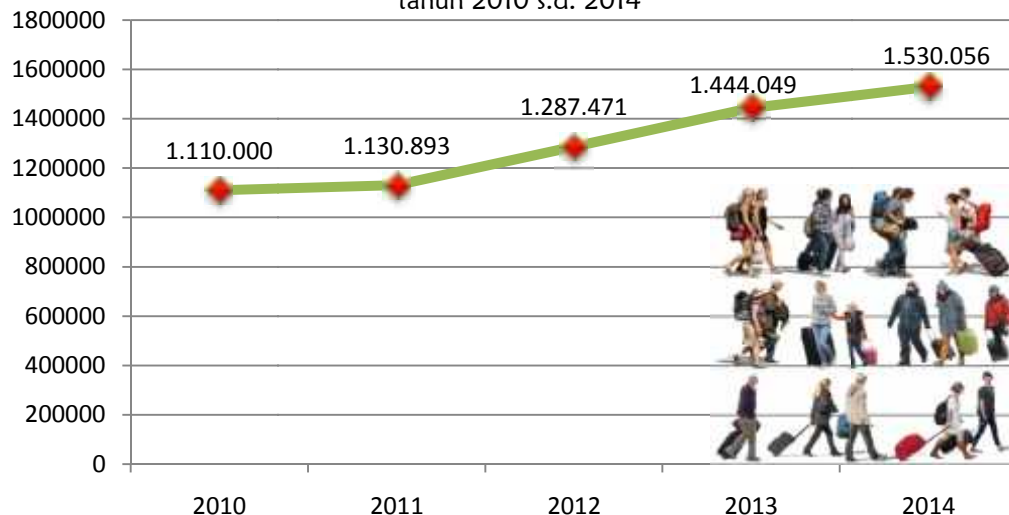
III.	Restoran / Rumah Makan	540	710	738	3,9	
IV.	Biro Perjalanan Wisata	70	77	77	0	

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Jambi 2014

Berdasarkan tabel di atas, kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Jambi mengalami peningkatan sebesar 1,38%, dimana pada tahun 2013 tercatat sebanyak 9.919 wisatawan dan meningkat sebanyak 10.056 wisatawan pada tahun 2014. Sedangkan kunjungan wisatawan nusantara mengalami peningkatan sebesar 5,99%, dimana pada tahun 2013 tercatat sebanyak 1.444.049 wisatawan dan pada tahun 2014 bergerak naik menjadi 1.530.056 wisatawan.

Dengan meningkatnya industri pariwisata dan jumlah kunjungan wisata ini membuktikan bahwa semakin membaiknya infrastruktur jalan menuju tempat-tempat wisata yang tentunya sangat mempengaruhi tingkat kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara, dan secara tidak langsung pula berdampak pada tumbuhnya industri pariwisata serta mendorong perekonomian industri kecil di Provinsi Jambi.

Grafik 3.11. Capaian Kunjungan Wisatawan Ke Provinsi Jambi tahun 2010 s.d. 2014



Persentase peningkatan industri pariwisata ini semata-mata tidak terlepas dari peningkatan potensi wisata yang ada, namun juga berasal dari kontribusi perusahaan yang menjalankan bisnisnya di Provinsi Jambi yang secara tidak langsung berdampak pada peningkatan hunian kamar hotel, restoran rumah makan dan lain-lain. Kondisi ini juga turut didukung oleh semakin membaiknya akses infrastruktur jalan menuju tempat-tempat wisata sehingga mempengaruhi tingkat kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara, dan secara tidak langsung pula berdampak pada tumbuhnya industri pariwisata serta mendorong perekonomian industri kecil di Provinsi Jambi.

Tabel 3.42. Perbandingan dan Capaian Kinerja Pertumbuhan Industri Pariwisata dan Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2010 s.d. 2014

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Periode capaian kinerja			Capaian Kinerja 2014			Capaian Target s.d. 2014	Target Akhir RPJMD
			2011	2012	2013	Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Pertumbuhan Industri Pariwisata	77,40	83,00	89,20	95,50	96	96,50	101,57	96,50	98
2.	Peningkatan jumlah kunjungan wisata	1.110.000 wisatawan	1.130.893 wisatawan	1.287.471 wisatawan	1.444.049 wisatawan	1.450.000 wisatawan	1.530.056 wisatawan	105,52	1.520.000 wisatawan	1.554.319 wisatawan



3.	Jumlah tamu menginap di hotel berbintang	23.550 orang	23.621 orang	23.755 orang	23.850 orang	24.000 orang	24.229 orang	100,95	24.229 orang	25.000 orang
4.	Lama tinggal wisatawan	1,4 hari	1,4 hari	1,4 hari	1,5 hari	1,5 hari	1,87 hari	124%	1,87 hari	2 hari

Sumber : DinasKebudayaan & Pariwisata Provinsi Jambi 2014

b. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Provinsi Jambi

Perkembangan pariwisata Provinsi Jambi dianalisis dari aspek penerimaan daerah dari sektor pariwisata. Penerimaan sektor pariwisata tidak terlepas dari peran pajak dan retribusi. Dengan menjumlahkan pajak seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan berbagai retribusi seperti retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat penginapan, retribusi tempat rekreasi dan pendapatan lain yang sah maka akan didapat penerimaan sektor pariwisata.

Salah satu sarana yang menunjang pariwisata di Jambi adalah usaha akomodasi hotel, yaitu hotel berbintang dan hotel non berbintang yang meliputi motel, penginapan, losmen atau pondok wisata. Hotel yang ada di Provinsi Jambi menyebar di seluruh Kabupaten dan Kota. Namun tidak semua Kabupaten mempunyai hotel berbintang. Bila diamati setiap tahunnya, usaha akomodasi di Provinsi Jambi mengalami perkembangan dalam hal jumlah maupun kualitasnya. Misalnya dengan memperhatikan kenyamanan tamu maka akan sangat menentukan jumlah wisatawan dan lama menginap. Seiring dengan pertumbuhan hotel, maka jumlah kamar yang tersedia juga meningkat.

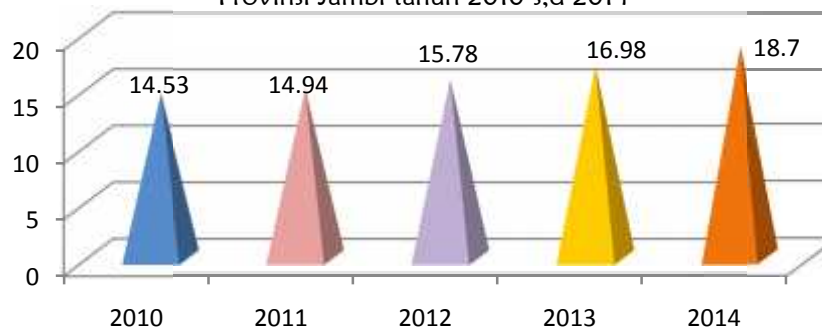
Gambar 3.19. Hotel berbintang di Kota Jambi



Jika dilihat dari sektor Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang pada Bulan November 2014 sebesar meningkat menjadi 47,36 persen, atau lebih tinggi dibanding TPK bulan sebelumnya, yang sebesar 42,42 persen, ini berarti terjadi peningkatan sebesar 4 persen dari tahun 2013. Jumlah tamu menginap pada hotel berbintang Bulan November 2014 sebanyak 24.229 orang, sedangkan Bulan Oktober 2014 sebanyak 22.051 orang atau meningkat sebesar 8,99 persen. Begitu juga dengan rasio tamu mancanegara terhadap tamu nusantara Bulan November 2014 sebesar 0,010. Dari sisi lama tinggal wisatawan rata-rata lama menginap tamu mancanegara dan tamu nusantara pada

hotel bintang Bulan sampai dengan bulan November 2014 adalah 1,87 hari.

Diagram 3.. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Provinsi Jambi tahun 2010 s,d 2014



Restoran dan rumah makan merupakan sebuah tempat usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum. Peningkatan jumlah restoran dan rumah makan yang mengakibatkan persaingan antar restoran cukup tinggi di Provinsi Jambi. Peningkatan jumlah penduduk merupakan peluang bagi pengusaha untuk membuka bisnis restoran. Meningkatnya jumlah bisnis makanan khususnya restoran di Kota Jambi tentunya menyebabkan



persaingan bisnis yang semakin ketat pada industri ini yang dicirikan dengan semakin meningkatnya permintaan dan jumlah pesaing baru. Setiap restoran akan menawarkan kepada konsumennya konsep yang berbeda-beda mulai dari menawarkan rasa (taste) makanan yang unik, tempat yang nyaman, keunikan tempat. Rumah makan maupun restoran yang ada di Kota Jambi harus mampu bersaing dengan memberikan nilai tambah dari menu makanan yang ditawarkan untuk dapat menyakinkan konsumennya.

Tabel 3.43. Perbandingan dan Capaian Kinerja Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2010 s.d. 2014

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Periode capaian kinerja			Capaian Kinerja			Capaian Target s.d. 2014	Target Akhir RPJMD
			2011	2012	2013	2014		% Capaian		
						Target	Realisasi			
1.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	14,53	14,94	15,78	16,98	17,5	18,7	106,85	14,50	19
2.	Perdagangan besar & eceran	9,5	9,91	10,16	12,64	14,5	15,23	105,03	15,23	15,5
3.	Hotel	10,95	11,83	10,23	7,35	9	9,50	105,55	9,50	10
	Restoran	5,05	5,38	7,23	7,58	8	8,65	108,12	8,65	9

Sumber : Jambi Dalam Angka 2014

Capaian keberhasilan peningkatan industri wisata, kunjungan wisata, serta kontribusi PDRB di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan peningkatan ragam budaya pariwisata daerah. Dalam tahun 2014, program yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini terdiri dari program, yakni :

1. Program pengembangan nilai budaya
2. Program pengelolaan kekayaan budaya
3. Program pengelolaan keragaman budaya
4. Program pengembangan kerjasama pengolahan kekayaan budaya
5. Program perencanaan pembangunan sosial budaya
6. Program pengembangan data dan informasi
7. Program pengembangan pemasaran pariwisata
8. Program pengembangan destinasi pariwisata
9. Program pengembangan kemitraan
10. Program pengembangan informasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi
11. Program transportasi udara

Permasalahan :

1. Potensi pariwisata Provinsi Jambi sebetulnya sangat terbuka dan masih mungkin dikembangkan lagi. Namun, beberapa yang dialami antara lain adalah jauhnya jarak wisata serta terbatasnya akses wisata alam yang sangat bagus untuk dikunjungi namun keterbatasan transportasi. Selain itu belum sinerginya antara event-event budaya dengan pola distribusi dan kalender musim pariwisata. Terdapat bulan-bulan dimana jumlah wisatawan meningkat seperti liburan sekolah atau liburan hari raya dan akhir/awal tahun. Pengelolaan event budaya yang disinergikan dengan momentum seperti ini akan bisa meningkatkan jumlah wisatawan yang lebih banyak lagi.
2. Pentingnya sektor pariwisata juga bisa dilihat dari dukungan dan kontribusi masyarakat dalam pengembangan nilai, keragaman dan kekayaan budaya yang ada. Namun demikian, upaya-upaya ini masih perlu disinergikan dan mendapatkan dukungan dari pemerintah, seperti dukungan kebijakan dan sarana-prasarana yang akan menjadi *enabling environment* bagi inisiatif masyarakat dalam pengembangan wisata berbasis budaya.



3. Seiring peningkatan kunjungan wisatawan, dinilai tingkat pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata yang profesional belum memadai sesuai dengan jumlah dan karakteristik wisatawan yang semakin beragam.

Solusi :

1. Memperluas pilihan wisata dengan memperbaharui destinasi wisata termasuk destinasi baru yang beragam tentunya dengan menyiapkan akses yang baik menuju destinasi wisata.
2. Sarana pendukung untuk meningkatkan kepuasan wisatawan, seperti sarana transportasi, ataupun sarana dan prasarana yang lain.
3. Pelembagaan partisipasi masyarakat dan dukungan bagi inisiatif masyarakat dalam pengembangan sarana dan destinasi wisata

9. Sasaran Pembangunan Pertanian dan ketahanan Pangan Dalam Pemenuhan Pangan Daerah Meningkat

a. Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan 5 program utama, yaitu Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Produksi Pertanian, Program Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur/ Sarana Prasarana Pertanian dan Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Pasca Panen dan Pemasaran Hasil TPH (Domestik dan Internasional).

Dari program utama tersebut, pada tahun 2013 yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Jambi mengalami peningkatan produksi padi sebesar 60.515 ton atau sebesar 9,68% jika dibandingkan tahun 2012, yaitu dari 625.154 ton GKG menjadi 685.680 ton GKG pada tahun 2012. Kenaikan produksi padi ini terjadi karena adanya peningkatan produktivitas sebesar 1,35 Kw/Ha (3,23%), serta didukung oleh peningkatan luas panen sebesar 9.328 Ha (6,24%).

Produktivitas padi di Provinsi Jambi telah melebihi target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013-2015, yaitu sebesar 42,99 Kw/Ha, dimana produktivitas yang telah dicapai saat ini telah mencapai 43,21 Kw/Ha. Hal tersebut disebabkan adanya peningkatan program SLPTT- Padi baik untuk kawasan pemantapan, Pengembangan dan Pertumbuhan, perbaikan jaringan irigasi, adanya peningkatan Indeks Pertanian (IP) yang sebelumnya IP 100 menjadi IP 200 dengan adanya kegiatan optimasi lahan, serta penggunaan agens hayati dalam pengendalian hama dan penyakit yang membantu meningkatkan produktivitas. Walaupun terdapat penundaan jadwal tanam dan pergeseran musim tanam disebabkan ketersediaan benih unggul bermutu yang tidak sesuai dengan jadwal tanam dan musim yang tidak dapat di prediksi, tetapi dampak dari kegiatan penumbuhan penangkar di Provinsi Jambi menimbulkan efek positif terhadap ketersediaan benih yang mana selama ini petani selalu menunggu bantuan benih subsidi dari pemerintah pusat yang selalu tidak tepat dengan jadwal tanam.

Komoditi jagung tahun 2013 sebagaimana yang dikeluarkan oleh BPS mengalami peningkatan produksi jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2012 dari 25.571 ton menjadi 26.038 ton pada tahun 2013 atau mengalami peningkatan sebesar 467 ton (1,83)%. Peningkatan produksi jagung ini terjadi karena adanya peningkatan produktivitas sebesar 0,90 Kw/Ha (2,32%) walaupun terjadi penurunan luas panen sebesar 32 Ha (0,49%). Hal ini disebabkan adanya peningkatan alokasi program SLPTT-Jagung di Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur dan Kerinci dan Bungo seluas 6.000 Ha.

Untuk komoditi Kedelai yang dikeluarkan oleh BPS mengalami penurunan produksi pada tahun 2013 jika dibandingkan tahun 2012 yaitu dari 3.516 ton pada tahun 2012 menjadi 2.625 ton, atau berkurang sebesar 891 ton (25,34%), yang disebabkan karena penurunan luas panen seluas 740 Ha (26,34%), tetapi produktivitas kedelai mengalami peningkatan sebesar 0,17 Kw/Ha (1,37 %) dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan produktivitas ini disebabkan dampak dari kegiatan SLPTT-Kedelai tahun sebelumnya yang berpengaruh terhadap peningkatan produksi per satuan hektar, tetapi penurunan luas panen dan produksi disebabkan banyaknya kegiatan SLPTT-Kedelai tahun 2013 yang tidak terlaksana.



Tabel 3.44. Perkembangan Realisasi Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Jambi Tahun 2013–2014

No.	Uraian	2013 (ATAP)	Aram II 2014	Perkembangan 2014 Terhadap 2013	
				(+/-)	(%)
1.	LUAS PANEN (Ha)				
	Padi	153.243	149.291	-3.952	2,58
	- Padi Sawah	129.341	125.093	-4.248	-3,28
	- Padi Ladang	23.902	24.198	-296	1,24
	Jagung	6.504	8.728	2.224	34,19
	Kedelai	1.877	6.276	4.399	234,36
	Kacang Tanah	1.203	1.187	-16	-1,33
	Kacang Hijau	343	154	-189	-55,10
	Ubi Kayu	2.744	2.005	-739	-26,93
	Ubi Jalar	3.076	2.753	-323	-10,50
2.	PRODUKTIVITAS (Kw/Ha)				
	Padi	43,36	45,19	1,83	4,21
	- Padi Sawah	45,60	47,79	2,19	4,79
	- Padi Ladang	31,27	31,79	0,51	1,64
	Jagung	39,50	50,95	11,45	28,99
	Kedelai	12,64	12,89	0,25	1,96
	Kacang Tanah	12,77	12,73	-0,03	-0,22
	Kacang Hijau	11,12	11,50	0,38	2,91
	Ubi Kayu	142,05	152,44	10,39	7,67
	Ubi Jalar	260,26	272,05	11,79	13,07
3.	PRODUKSI (Ton)				
	Padi	664.533	674.679	10.146	1,53
	- Padi Sawah	589.784	597.761	7.977	1,35
	- Padi Ladang	74.749	76.918	2.168	2,90
	Jagung	25.690	44.470	18.780	73,10
	Kedelai	2.372	8.087	5.715	240,90
	Kacang Tanah	1.536	1.511	-24	-1,58
	Kacang Hijau	381	177	-204	-53,55
	Ubi Kayu	38.978	30.563	-8.415	-21,59
	Ubi Jalar	80.057	74.895	-5.162	-6,45

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2014

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan PAD melalui sektor pertanian Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Pasca Panen dan Pemasaran Hasil TPH mempunyai tujuan antara lain : meningkatkan pengembangan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian serta meningkatkan promosi dan pelayanan informasi pasar.

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilaksanakan Pengembangan Penanganan Pasca Panen, Pengembangan Mutu, Standarisasi dan Sertifikasi Produk Tanaman Pangan, Pengembangan Pengolahan Hasil TPH dan Pengembangan Pemasaran Hasil TPH. Upaya itu dilakukan melalui Apresiasi Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Pangan, Temu Usaha Penggilingan Padi se-Indonesia serta Bintek Pelayanan Informasi Pasar dan Fasilitasi Petugas PIP.

Selanjutnya dari sisi Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi telah merealisasikan PAD dari sektor pertanian pada tahun 2014 nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 6,69 T atau mempunyai kontribusi sebesar 27,8% terhadap total PDRB Provinsi Jambi. Target dan Realisasi PAD Tahun 2014 dibandingkan 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :



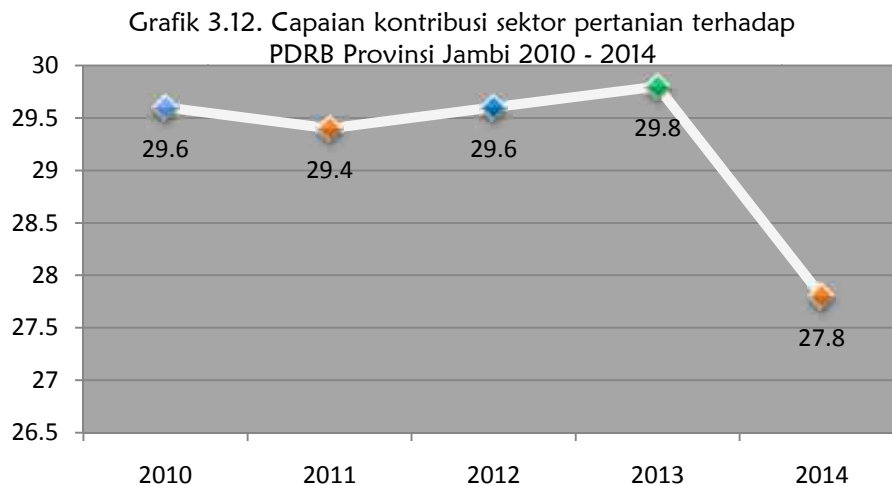
Tabel 3.45. Target dan Realisasi PAD Sektor Pertanian Tahun 2013 – 2014

dalam ribuan rupiah

No	BBI/Taman Anggrek	Tahun 2013			Tahun 2014			% Realisasi 2014 : 2013
		Sasaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sasaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	BBI Padi Sukajaya	15.000	15.530	103,5	56.000	50.036	100,1	360,82
2.	BBI Palawija Sebapo	14.500	29.150	201	45.000	47.370	105,3	162,5
3.	BBI Palawija Alai Ilir	3.000	3.780	126	-	-	-	-
4.	BBI Hortikultura Sungai Tiga	10.000	10.625	106,3	16.000	16.150	100,9	152
5.	BBI Kentang Kayu Aro	9.000	9.020	100,2	20.000	20.000	100	221,73
6.	BBU Kentang Jangkat	2.000	2.000	100	20.000	20.000	100	1.000,00
7.	Taman Anggrek	2.500	2.500	100	4.000	5.500	137,5	220
Jumlah		56.000	72.605	129,7	161.000	165.056	102,5	227,33

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Jambi

Kondisi ini telah meningkatkan PDRB dari sektor pertanian menjadi 27,8% pada tahun 2014. Capaian kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari tahun 2010 s.d. 2014 sebagai berikut :



Pengukuran kinerja capaian kinerja kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.46. Perbandingan Capaian Kinerja Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2010 s.d. 2014

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Periode capaian kinerja			Capaian Kinerja			Capaian Target s.d. 2014	Target Akhir RPJMD
			2011	2012	2013	2014		% Capaian		
						Target	Realisasi			
1.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	27,5	29,4	29,6	29,83	28,5	27,8	99,28	29,83	28 – 28,5

Sumber : Jambi Dalam Angka 2014

Capaian realisasi kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di atas turut didukung oleh upaya pelaksanaan berbagai program yang dilakukan terkait dengan peningkatan perekonomian daerah daerah. Dalam tahun 2014, program yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini terdiri dari program, yakni :



1. Program peningkatan kesejahteraan petani
2. Program peningkatan pemasaran produk pertanian
3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian
4. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian
5. Program pemberdayaan penyuluh pertanian
6. Program perbaikan dan penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana pertanian

b. Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. Nilai ini juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Mulai Desember 2013 dilakukan perubahan tahun dasar dalam penghitungan NTP dari tahun dasar 2007=100 menjadi tahun dasar 2012=100. Perubahan tahun dasar ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan/pergeseran pola produksi pertanian dan pola konsumsi rumah tangga pertanian di perdesaan, serta perluasan cakupan subsektor pertanian dan provinsi dalam penghitungan NTP agar penghitungan indeks dapat dijaga ketepatannya. Perbedaan antara NTP tahun dasar 2007=100 dengan NTP tahun dasar 2012=100 adalah meningkatnya cakupan jumlah komoditas baik pada paket komoditas It maupun Ib. Penghitungan NTP (2012=100) juga mengalami perluasan khususnya pada subsektor Perikanan. Selain NTP Perikanan secara umum yang dihitung di 33 provinsi termasuk Provinsi DKI Jakarta, Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) juga disajikan secara terpisah.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib), dimana komponen Ib hanya terdiri dari Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Dengan dikeluarkannya konsumsi dari komponen indeks harga yang dibayar petani (Ib), NTUP dapat lebih mencerminkan kemampuan produksi petani, karena yang dibandingkan hanya produksi dengan biaya produksinya.

Tabel 3.47. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jambi Per Subsektor serta Perubahannya Desember 2014 (2012=100)

Subsektor dan Subkelompok	November 2014	Desember 2014	Persentase Perubahan
Gabungan			
a. Nilai Tukar Petani (NTP)	95,68	95,06	-0,65
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	111,42	113,57	1,93
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	116,45	119,47	2,59
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	118,43	121,70	2,76
- Indeks BPPBM	110,41	112,80	2,17
Gabungan Tanpa Perikanan			
a. Nilai Tukar Petani (NTP)	95,50	94,92	-0,60
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	111,23	113,43	1,97
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	116,48	119,49	2,58
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	118,48	121,77	2,77
- Indeks BPPBM	110,34	112,66	2,10
1. Tanaman Pangan			
a. Nilai Tukar Petani (NTP)	95,15	94,71	-0,46
b. Indeks Diterima Petani (It)	112,05	114,47	2,16
- Padi	112,35	115,51	2,81
- Palawija	110,99	110,80	-0,17



c. Indeks Dibayar Petani (Ib)	117,76	120,87	2,64
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	119,37	122,69	2,78
- Indeks BPPBM	110,24	112,36	1,92
2. Hortikultura			
a. Nilai Tukar Petani (NTPH)	95,59	94,11	-1,55
b. Indeks Diterima Petani (It)	111,79	113,11	1,18
- Sayur-sayuran	103,47	105,09	1,57
- Buah-buahan	128,23	128,94	0,56
- Tanaman Obat	105,65	107,54	1,79
c. Indeks Dibayar Petani (Ib)	116,95	120,18	2,77
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	118,75	122,32	3,01
- Indeks BPPBM	108,28	109,89	1,49
3. Tanaman Perkebunan Rakyat			
a. Nilai Tukar Petani (NTPR)	94,78	94,31	-0,50
b. Indeks Diterima Petani (It)	110,90	113,29	2,16
- Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR)	110,90	113,29	2,16
c. Indeks Dibayar Petani (Ib)	117,01	120,13	2,67
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	117,94	121,10	2,68
- Indeks BPPBM	112,02	114,95	2,61
4. Peternakan			
a. Nilai Tukar Petani (NTPT)	98,22	98,10	-0,12
b. Indeks Diterima Petani (It)	110,79	112,92	1,92
- Ternak Besar	114,44	116,93	2,18
- Ternak Kecil	114,11	116,59	2,17
- Unggas	102,66	104,15	1,45
- Hasil Ternak	111,18	112,23	0,94
c. Indeks Dibayar Petani (Ib)	112,80	115,11	2,04
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	118,91	122,28	2,83
- Indeks BPPBM	107,09	108,41	1,22
5. Perikanan			
a. Nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan(NTNP)	101,69	99,50	-2,16
b. Indeks Harga yang Diterima Nelayan dan Pembudidaya Ikan (It)	117,33	118,18	0,73
c. Indeks Harga yang Dibayar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (Ib)	115,37	118,78	2,95
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	116,92	119,53	2,22
- Indeks BPPBM	112,52	117,21	4,17
5.1. Perikanan Tangkap			
a. Nilai tukar nelayan (NTN)	102,25	101,09	-1,13
b. Indeks Harga yang Diterima Nelayan(It)			
- Penangkapan	119,70	123,04	2,79
c. Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib)	117,07	121,71	3,97
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	117,00	119,58	2,21
- Indeks BPPBM	117,19	125,25	6,89
5.2. Perikanan Budidaya			
a. Nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi)			
b. Indeks Harga yang Diterima Pembudidaya Ikan (It)	101,09	97,72	-3,33



- Budidaya	114,81	113,02	-1,56
c. Indeks Harga yang Dibayar Pembudidaya Ikan (Ib)	113,57	115,66	1,84
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	116,85	119,47	2,25
- Indeks BPPBM	107,56	108,66	1,03

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada Desember 2014, NTP Provinsi Jambi turun sebesar 0,44 persen dibanding bulan sebelumnya yaitu dari 94,71 menjadi 95,15. Penurunan NTP pada Desember 2014 disebabkan perubahan indeks harga hasil produksi pertanian lebih kecil jika dibandingkan dengan perubahan indeks harga yang dibayar petani, terutama pada indeks harga yang barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Pada bulan Desember 2014, NTP turun pada seluruh subsektor, yaitu subsektor Tanaman Pangan turun sebesar 0,44 persen, subsektor Hortikultura turun sebesar 1,48 persen, subsektor Perkebunan Rakyat turun sebesar 0,47 persen, subsektor Peternakan turun sebesar 0,12 persen serta subsektor Perikanan turun sebesar 2,16 persen.

Indeks Harga yang Diterima Petani (It)

Indeks Harga yang Diterima Petani (It) menunjukkan perubahan harga komoditas pertanian yang dihasilkan petani. Pada bulan Desember 2014, indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 1,93 persen. Kenaikan It terjadi pada seluruh subsektor, yaitu subsektor Tanaman Pangan sebesar 2,16 persen, subsektor Hortikultura naik sebesar 1,18 persen, subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat naik sebesar 2,16 persen, subsektor Peternakan naik sebesar 1,92 persen serta subsektor Perikanan naik sebesar 0,73 persen.

Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)

Dari indeks harga yang dibayar petani (Ib) dapat dilihat fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat perdesaan khususnya petani yang merupakan bagian terbesar, serta fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Pada bulan Desember 2014 indeks harga yang dibayar petani (Ib) naik sebesar 2,59 persen dan kenaikan tersebut terjadi pada seluruh subsektor yaitu subsektor Tanaman Pangan sebesar 2,64 persen, subsektor Hortikultura sebesar 2,77 persen, subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 2,67 persen, subsektor Peternakan sebesar 2,04 persen serta subsektor Perikanan naik sebesar 2,95 persen.

Nilai Tukar Petani Menurut Subsektor

1. Subsektor Tanaman Pangan (NTPP)

Pada bulan Desember 2014 NTP untuk subsektor Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 94,71 atau turun 0,46 persen. Kenaikan indeks yang diterima petani lebih rendah dibandingkan perubahan indeks yang dibayar petani. Indeks yang diterima petani naik sebesar 2,16 persen dan indeks yang dibayar petani naik sebesar 2,64 persen.

2. Subsektor Hortikultura (NTPH)

Pada bulan Desember 2014, Nilai Tukar Petani untuk subsektor Hortikultura (NTPH) sebesar 94,11 atau turun 1,55 persen. Kenaikan indeks yang diterima petani lebih rendah dibandingkan indeks yang dibayar petani. Indeks yang diterima petani naik sebesar 1,18 persen dan indeks yang dibayar petani naik sebesar 2,77 persen.

3. Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR)

Pada bulan Desember 2014, NTP untuk subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) sebesar 94,31 atau turun 0,50 persen. Indeks yang diterima petani naik sebesar 2,16 persen sedangkan indeks yang dibayar petani naik sebesar 2,67 persen.

4. Subsektor Peternakan (NTPT)

Pada bulan Desember 2014, NTP untuk subsektor Peternakan (NTPT) sebesar 98,10 atau



turun 0,12 persen. Indeks yang diterima petani naik sebesar 1,92 persen dan indeks yang dibayar petani naik sebesar 2,04 persen.

5. **Subsektor Perikanan (NTNP)**

Pada bulan Desember 2014, NTP subsektor Perikanan (NTNP) sebesar 99,50 atau turun 2,16 persen. Indeks yang diterima nelayan dan pembudidaya ikan naik sebesar 0,73 persen dan indeks yang dibayar nelayan dan pembudidaya ikan naik sebesar 2,95 persen.

- Kelompok Perikanan Tangkap (NTN) Nilai Tukar Nelayan (NTN) turun sebesar 1,13 persen yaitu dari 102,25 menjadi 101,09 pada Desember 2014. Indeks yang diterima nelayan naik sebesar 2,79 persen dan indeks yang dibayar nelayan naik sebesar 3,97 persen.
- Kelompok Perikanan Budidaya (NTPi) Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) turun sebesar 3,33 persen yaitu dari 101,09 menjadi 97,72 pada Desember 2014. Indeks yang diterima pembudidaya ikan turun sebesar 1,56 persen dan indeks yang dibayar pembudidaya ikan naik sebesar 1,84 persen.

Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Perdesaan

Perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) Perdesaan mencerminkan angka inflasi/deflasi di wilayah perdesaan. Pada bulan Desember 2014, di Provinsi Jambi terjadi inflasi perdesaan sebesar 2,76 persen. Kenaikan indeks terjadi pada seluruh kelompok konsumsi rumah tangga.

Tabel 3.48. IHK Konsumsi Rumah Tangga

No	Konsumsi Rumah Tangga	Indeks Harga Konsumen (IHK) Perdesaan		
		November 2014	Desember 2014	Persentase Perubahan
1	Bahan Makanan	122,83	126,24	2,78
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	114,13	114,97	0,74
3	Perumahan	109,45	110,44	0,91
4	Sandang	112,62	113,81	1,05
5	Kesehatan	113,00	113,69	0,61
6	Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga	105,19	105,32	0,13
7	Transportasi dan Komunikasi	127,30	138,86	9,08
	Konsumsi Rumah Tangga	118,43	121,70	2,76

Jika dilihat menurut kelompok pengeluaran, inflasi terjadi pada seluruh kelompok pengeluaran, yaitu kelompok Bahan Makanan sebesar 2,78 persen; kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau sebesar 0,74 persen; kelompok Perumahan sebesar 0,91 persen; kelompok Sandang sebesar 1,05 persen ;

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) menurut Subsektor

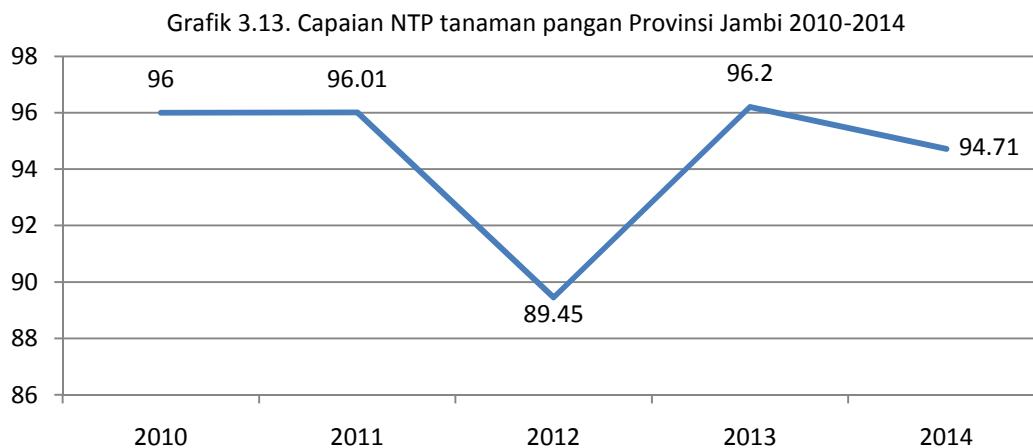
Pada Desember 2014, NTUP Jambi sebesar 100,68 yang berarti terjadi penurunan sebesar 0,23 persen. Hal ini karena It naik sebesar 1,93 persen sedangkan Indeks BPPBM naik sebesar 2,17 persen. Kelompok Kesehatan sebesar 0,61 persen; kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga sebesar 0,13 persen serta kelompok Transportasi dan Komunikasi sebesar 9,08 persen.



Tabel 3.49. Persentase Perubahan Indeks Harga Konsumen Perdesaan Provinsi Jambi Desember 2014 (2012=100)

No	Kelompok Konsumsi Rumah Tangga	Indeks Harga Konsumen (IHK) Perdesaan		Persentase Perubahan
		November 2014	Desember 2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bahan Makanan	122,83	126,24	2,78
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	114,13	114,97	0,74
3	Perumahan	109,45	110,44	0,91
4	Sandang	112,62	113,81	1,05
5	Kesehatan	113,00	113,69	0,61
6	Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga	105,19	105,32	0,13
7	Transportasi dan Komunikasi	127,30	138,86	9,08
Konsumsi Rumah Tangga		118,43	121,70	2,76

Jika dilihat menurut kelompok pengeluaran, inflasi terjadi pada seluruh kelompok pengeluaran, yaitu kelompok Bahan Makanan sebesar 2,78 persen; kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau sebesar 0,74 persen; kelompok Perumahan sebesar 0,91 persen; kelompok Sandang sebesar 1,05 persen.



Tabel 3.50. Perbandingan dan Capaian Kinerja NTP Tahun 2010 s.d. 2014

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Periode capaian kinerja			Capaian Kinerja			Capaian Target s.d. 2014	Target Akhir RPJMD
			2011	2012	2013	2014 Target	2014 Realisasi	% Capaian		
1	NTP tanaman pangan	96	96,01	89,45	96,2	97	94,71	97,63	96,2	104-106

Sumber : JDA 2014 & hasil pengolahan data 2015

Capaian keberhasilan peningkatan NTP di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan peningkatan NTP Provinsi Jambi. Dalam tahun 2014, program yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini terdiri dari program, yakni :

1. Program peningkatan kesejahteraan petani
2. Program peningkatan nilai tambah agribisnis
3. Program peningkatan pemasaran produk pertanian
4. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/kehutanan
5. Program pemberdayaan penyuluh pertanian
6. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

**Permasalahan :**

Menyikapi rendahnya NTP Provinsi Jambi pada tahun 2014, ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebabnya, yaitu :

1. Indeks harga yang dibayarkan oleh petani (baik untuk keperluan rumah tangga petani ataupun untuk keperluan produksi pertanian) peningkatannya lebih cepat daripada indeks harga yang diterima petani, sehingga kemampuan nilai tukar petani menjadi lebih rendah.
2. Terjadi transformasi pola konsumsi petani yang cenderung mengikuti pola konsumsi masyarakat perkotaan, dimana lebih banyak mengkonsumsi barang-barang yang sifatnya tidak produktif.
3. Kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah terbesar ada pada kegiatan pengadaan dan perdagangan saprota, alsintan, serta kegiatan pengolahan hasil dan perdagangan produk (*off-farm* dalam sistem agribisnis) yang jatuh pada mereka yang bukan petani, akibatnya nilai tambah yang dinikmati petani tetap kecil, sementara mereka yang berada pada ekonomi non-usaha tani menikmati nilai tambah yang besar.

Solusi :

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, beberapa hal yang perlu dilakukan ke depan, antara lain :

1. Mengurangi beban belanja konsumsi rumah tangga petani dengan memberdayakan atau memanfaatkan pekarangan rumah untuk pengembangan tanaman pangan seperti cabe, sayur-sayuran, ikan, dll.
2. Meningkatkan peran Koperasi Agribisnis yang bergerak di tiga sub sektor: hulu, kegiatan usahatani dan hilir, serta menangani satu aliran produk sebagai bisnis inti (*core business*) sesuai dengan keunggulan masing-masing wilayah kabupaten/lokalita. Dengan demikian, pengembangan suatu komoditas mulai dari hulu sampai hilir dapat dilakukan.
3. Memperbaiki jalur distribusi/transportasi dari sentra produksi ke pasar,
4. Membangun gudang atau *Supply Base* untuk hasil pertanian yang mudah rusak,
5. Memperbaiki tata niaga produk pertanian, dan
6. Membangun industri hilir untuk barang jadi atau barang setengah jadi beserta kegiatan perdagangannya sehingga nilai tambah produk dapat dikuasai oleh petani.

c. Ketersediaan Energi/kap/perhari, dan Pola Pangan Harapan**Ketersediaan Energi Tahun 2013 dan 2014.**

Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Provinsi Jambi Tahun 2013, ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita sebesar 3.217 Kkal/Kap/Hari, dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ditingkat ketersediaan sebesar 78,86 hal ini telah melebihi kecukupan gizi untuk energi ditingkat ketersediaan sebesar 2.200 Kkal/Kap/Hari, sedangkan perkiraan ketersediaan energi Tahun 2014 sebesar 3.164 Kkal/Kap/Hari, dengan skor PPH tingkat ketersediaan sebesar 90,82 (Angka Perkiraan), sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.51. Kondisi Ketersediaan Energi Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Provinsi Jambi Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014

No.	Kelompok Bahan Pangan	Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hari)		Ketersediaan Ideal (Kkal/Kap/Hari)
		2013*	2014**	
1.	Padi – Padian	1.434	1.481	1.100
2.	Umbi – Umbian	218	174	132
3.	Pangan Hewani	167	179	264
4.	Minyak Dan Lemak	757	827	220
5.	Buah Biji/Berminyak	177	225	66
6.	Kacang – Kacangan	98	103	110
7.	Gula	129	152	110
8.	Sayuran dan Buah	133	76	132
9.	Lain – Lain	-	-	66
Jumlah		3.113	3.217	2.200

Ket : 2013* ATAP 2012. 2014** ATAP 2013.



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ketersediaan Energi pada tahun 2013 sudah melebihi ketersediaan energi ideal sebesar 2.200 kkal/kap/hari, namun dari komposisi ketersediaan kelompok bahan pangan belum berimbang. Komposisi ketersediaan bahan pangan masih didominasi oleh kelompok sumber bahan pangan penghasil karbohidrat, minyak dan lemak, buah/biji berminyak dan gula, sementara ketersediaan bahan pangan hewani, kacang-kacangan serta sayur dan buah masih lebih rendah dari ketersediaan ideal berdasarkan pola pangan harapan (PPH).

Ketersediaan Pangan dari Kemampuan Produksi

Pengertian ketersediaan pangan dalam bahasan berikut ini adalah ketersediaan pangan untuk dikonsumsi masyarakat yang berasal dari produksi lokal yang merupakan selisih dari produksi daerah dikurangi dengan kebutuhan benih (khusus padi dan palawija), tercecer dan pakan. Ketersediaan pangan dari kemampuan produksi daerah, seperti yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.52. Kondisi Ketersediaan dari Kemampuan Produksi Tahun 2013 (angka tetap) dan 2014 (angka ramalan II), Jumlah Konsumsi Penduduk dan Kebutuhan Berdasarkan Pola Pangan Harapan

No.	Komoditas	Tahun 2013				Tahun 2014			
		Keterse- ediaan	Konsumsi Penduduk	Kebutuhan Berdskan PPH		Keterse- ediaan	Konsumsi Penduduk	Kebutuhan Berdskan PPH	
				Tingkat Ketersediaan	Tingkat Konsumsi			Tingkat Ketersediaan	Tingkat Konsumsi
1.	Padi	351,488	309,691	307,658	279,689	372,249	385,519	323,064	308,724
2.	Jagung	22,547	587	352	320	23,009	234	394	353
3.	Kedelai	3,059	17,150	27,311	24,829	2,094	16,885	30,772	27,566
4.	Kacang Tanah	1,423	848	3,713	3,376	1,387	502	3,794	3,399
5.	Kacang Hijau	355	1,206	2,988	2,716	218	1,046	3,323	2,977
6.	Ubi Kayu	37,368	26,051	68,802	62,547	32,177	16,718	78,093	69,958
7.	Ubi Jalar	70,450	62,364	23,357	21,233	65,500	3,310	25,510	23,749
8.	Daging	30,179	23,022	36,157	32,871	41,765	24,769	37,204	33,329
	- Ruminansia	10,623	3,008	5,935	5,396	10,345	4,347	6,837	6,125
	- Non Ruminansia	19,555	20,014	30,222	27,475	31,420	20,422	30,367	27,204
9.	Telur	11.952	26.500	40,980	37,274	13,175	30,628	45,572	40,825
10.	Ikan	92.548	101.728	98,646	89,678	95.272	68.431	75,997	98,678

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk tahun 2013 ketersediaan beberapa komoditas bahan pangan dari produksi lokal telah memenuhi konsumsi penduduk Provinsi Jambi, kecuali untuk komoditas kedelai, kacang hijau, telur dan ikan. Sementara itu pada tahun 2014 diperkirakan produksi kedelai, kacang hijau dan telur masih belum dapat memenuhi konsumsi penduduk.

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Cadangan pangan pemerintah daerah merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketahanan Pangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan. Khusus mengenai cadangan pangan pemerintah daerah, juga telah diatur sedemikian rupa dengan dikeluarkannya Pergub nomor 12 Tahun 2013.

Berdasarkan Pergub No.12 Tahun 2013 tersebut, untuk tahun 2013 cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jambi yang tersedia di Badan Ketahanan Pangan sebesar **70 ton** kerjasama dengan Perum Bulog, dan pada tahun 2014 telah dilaksanakan penambahan cadangan pangan sebanyak **20 ton**, sehingga total cadangan pangan pemerintah Provinsi Jambi menjadi **90 ton**, dan telah digunakan sebanyak 3,4 ton untuk membantu bencana alam di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, sehingga stok cadangan pangan pemerintah per 31 Desember 2014 sebesar **86,6 ton**.



Sementara jumlah Cadangan Pangan yang tersedia pada Perum Bulog Divre/sub Divre Jambi kondisi Januari s/d bulan Oktober 2014 seperti disajikan pada tabel 4.73 berikut ini :

Tabel 3.53. Kondisi Cadangan Pangan Beras (Stok yang dikuasai) Perum Bulog Divre /Sub Divre se- Jambi Bulan Januari s/d Oktober 2014.

No.	Bulan	Stock Dikuasai (Kg)
1.	Januari	5.991.453,38
2.	Pebruari	3.717.190,38
3.	Maret	4.199.105,38
4.	April	4.696.440,38
5.	Mei	6.744.072,38
6.	Juni	5.425.956,38
7.	Juli	6.178.461,38
8.	Agustus	5.359.218,00
9.	September	4.819.779,00
10.	Oktober	3.641.695,00

Sumber : Perum Bulog Provinsi Jambi

Pengembangan Desa Mandiri Pangan.

Penanggulangan kerawanan pangan diprovinsi Jambi dilaksanakan melalui Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Provinsi Jambi telah dimulai pada Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2012. Jumlah kelompok yang telah diberdayakan berjumlah 354 kelompok dengan jumlah KK miskin 8.111 KK di 87 Desa yang tersebar pada 11 Kabupaten/Kota, namun sejak Tahun 2013 tidak ada penambahan Desa Mandiri Pangan baru, sifat kegiatan hanya berupa pembinaan terhadap desa mandiri pangan yang telah ada. Untuk itu sangat diharapkan agar kabupaten/kota dapat mengalokasikan dana untuk desa mandiri pangan baru dalam rangka penanganan daerah rawan pangan melalui dana APBD II.

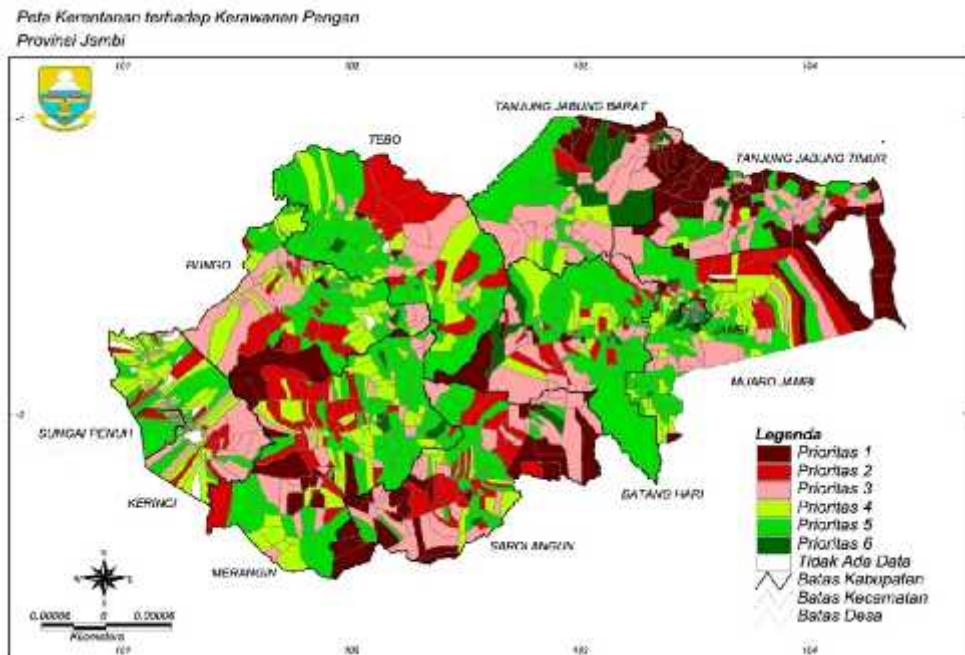
Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.

Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) dibuat berdasarkan 3 (tiga) filar ketahanan pangan (ketersediaan, akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan) dalam semua kondisi bukan hanya pada situasi kerawanan pangan saja. Selain itu FSVA juga bermaksud untuk mengetahui berbagai penyebab kerawanan pangan secara lebih baik atau kerentanan terhadap kerawanan pangan, bukan hanya kerawanan pangan itu sendiri. Tujuan utama pembuatan Peta Situasi Ketahanan Pangan adalah :

- Menyoroti titik-titik yang rentan rawan pangan kabupaten di Provinsi Jambi berdasarkan indikator Ketahanan Pangan yang ada.
- Mengidentifikasi penyebab kerawanan pangan di suatu wilayah/ kabupaten.
- Menyediakan petunjuk/informasi dalam mengembangkan strategi yang tepat untuk menganani kerawanan pangan kronis.
- Alat untuk perencanaan program berkaitan dengan ketahanan pangan.

Kategori/prioritas penanganan tingkat ketahanan dan kerentanan pangan ditunjukkan dengan menggunakan pola warna sebagai berikut :

Prioritas I Sangat Rawan	Prioritas II Rawan	Prioritas III Cukup Rawan	Prioritas IV Cukup Tahan	Prioritas V Tahan	Prioritas VI Sangat Tahan



Gambar 3.20. Peta Kerentanan Kerawanan Pangan

Indikator yang digunakan dalam menentukan tingkat Ketahanan dan Kerentanan Pangan antara lain :

1. Ketersediaan Pangan ; Jumlah warung/toko kelontong (tempat usaha untuk menjual barang keperluan sehari-hari secara eceran).
2. Akses Terhadap Pangan ; Persentase penduduk miskin, Jalan utama desa yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, Persentase rumah tangga tanpa akses listrik.
3. Pemanfaatan Pangan ; Jumlah sarana /fasilitas kesehatan, Jumlah kematian balita dan ibu melahirkan, Jumlah penderita gizi buruk.

Klasifikasi desa / kelurahan menurut prioritas penanganan kerentanan pangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.54. Klasifikasi Desa / Kelurahan Menurut Prioritas Penanganan Kerentanan Pangan.

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel	Prioritas 1 s.d 3 (Rentan Kerawanan Pangan)					Prioritas 4 s.d 6 (Tahan Pangan)	
				1	2	3	1 s.d 3	%	4 s.d 6	% tase
1.	Kerinci	12	208	-	31	23	54	25,96	154	74,04
2.	Sungai Penuh	5	69	-	5	16	21	30,43	48	69,57
3.	Merangin	24	212	14	39	22	75	35,38	137	64,62
4.	Sarolangun	10	142	25	29	35	89	62,68	53	37,32
5.	Bungo	17	146	3	22	31	56	38,36	90	61,64
6.	Tebo	12	106	2	16	10	28	26,42	78	73,58
7.	Muara Jambi	11	151	6	20	21	47	31,13	104	68,87
8.	Batang Hari	8	113	6	18	23	47	41,59	66	58,41
9.	Tanjab Barat	13	70	16	2	22	40	57,14	30	42,86
10.	Tanjab Timur	11	93	37	2	31	70	75,26	23	24,73
11.	Kota Jambi	8	62	-	4	1	5	8,06	57	91,94
	Jumlah	131	1.372	109	188	235	532	38,78	840	61,22

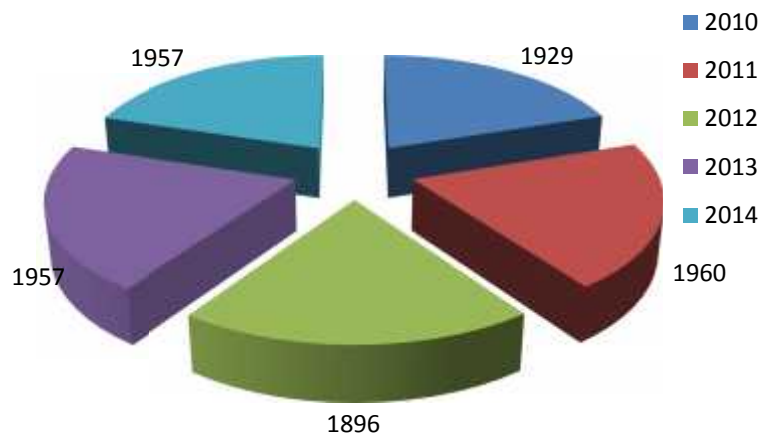
Sumber Data : BKP Provinsi Jambi.



Berdasarkan tabel diatas (data olahan Tahun 2013) terlihat bahwa secara umum Provinsi Jambi Cukup Tahan Pangan (61,22% tahan pangan dan 38,78% rentan rawan pangan), yang dapat digambarkan kedalam peta ketahanan pangan berikut :

FSVA Provinsi Provinsi Jambi Tahun 2012 mencakup 1.372 Desa/Kelurahan, 11 Kabupaten/Kota Dari 1.372 desa di ketahui bahwa daerah yang rentan kerawanan Pangan 525 desa 38,27% (Prioritas 1 = 106 desa 7,7%, Prioritas 2 = 185 desa 13,5%, Prioritas 3 = 234 desa 17,1%) dan daerah Tahan Pangan 847 Desa 61,73% (Prioritas 4 = 330 desa 24,1%, Prioritas 5 = 464 desa 33,8% dan Prioritas 6 = 53 desa 3,9%).

Gambar 3.21. Trend ketersediaan energi/kap/perhari



Kondisi konsumsi pangan penduduk provinsi Jambi selama beberapa tahun belakangan mengalami perubahan setiap tahunnya. Namun demikian masih terlihat bahwa sumber energi masih didominasi oleh bahan pangan asal beras (padi-padian), yaitu lebih dari 50 %. Berbagai upaya telah dilakukan guna meningkatkan kualitas konsumsi pangan telah memperlihatkan hasilnya, walaupun belum optimal yang dicerminkan oleh kualitas konsumsi tersebut. Untuk mengetahui kualitas konsumsi pangan penduduk berdasarkan atas skor Pola Pangan Harapan (PPH), dan pada Tahun 2013, skor PPH Provinsi Jambi sudah mencapai 83,33, dan jika dibandingkan dengan target dalam RPJMD untuk tahun 2014 sebesar 93,2 memang masih belum tercapai, namun jika dilihat pada target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan bahwa skor PPH tahun 2014 yaitu 90% dari 93,2 yakni sebesar 83,88, maka skor PPH Provinsi Jambi Tahun 2013 telah mencapai target, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.55. Skor Pola Konsumsi Pangan Harapan Aktual Provinsi Jambi Tahun 2013

No	Kelompok Pangan	Gram/ Kap /Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)								Skor Berdasar PPH
			Kalori	%	% AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Gap Skor AKE	
1	Padi-padian	279,8	1.087	55,54	54,35	0,5	27,77	27,18	25	2,18	25
2	Umbi-umbian	34,4	31	1,58	1,55	0,5	0,79	0,78	2,5	-1,73	0,78
3	Pangan Hewani	122,4	209	10,68	10,45	2	21,36	20,9	24	-3,1	20,9
4	Minyak dan Lemak	34,7	311	15,89	15,55	0,5	7,95	7,78	5	2,78	5
5	Buah/Biji Berminyak	9,8	53	2,71	2,65	0,5	1,35	1,33	1	0,33	1
6	Kacang-kacangan	16,6	39	1,99	1,95	2	3,99	3,9	10	-6,1	3,9
7	Gula	30,6	111	5,67	5,55	0,5	2,84	2,78	2,5	0,28	2,5
8	Sayur dan Buah	238,1	97	4,96	4,85	5	24,78	24,25	30	-5,75	24,25
9	Lain-lain	26,6	19	0,97	0,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total			1.957	100	101.49		82.06	83.28	100		83.33



Upaya yang dilakukan dalam memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat adalah dengan melakukan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan dengan meningkatkan kemampuan ibu-ibu mengolah pangan yang baik dan aman, pemanfaatan lahan pekarangan dan pengembangan pangan alternatif beras dari sumber karbohidrat tepung-tepungan. Bila kegiatan-kegiatan ini berjalan dengan baik maka diharapkan pada tahun 2015 pola pangan masyarakat Jambi telah mendekati Pola Pangan Harapan.

Tabel 3.56. Perbandingan Capaian Kinerja Ketersediaan Energi/kap/hari, dan Pola Pangan Harapan Tahun 2010 s.d. 2014

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Periode capaian kinerja			Capaian Kinerja			Capaian Target s.d. 2014	Target Akhir RPJMD
			2011	2012	2013	2014		% Capaian		
						Target	Realisasi			
1	Ketersediaan energi /kap/hari PPH	1.929 gr/Kap/Hr	1.960 gr/Kap/Hr	1.896 gr/Kap/Hr	1.957 gr/Kap/Hr	2.000 gr/Kap/Hr	1.957 gr/Kap/Hr	100,25	1.957 gr/Kap/Hr	2.000 gr/kap/hr

Sumber : Hasil pengolahan data 2015

Capaian keberhasilan ketersediaan energi/kap/hari dan pola pangan harapan di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan peningkatan sektor pertanian dan ketahanan pangan Provinsi Jambi. Dalam tahun 2014, program yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini terdiri dari 5 program, yakni :

1. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
2. Program lumbung pangan
3. Program pengembangan sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura
4. Program peningkatan produksi & produktivitas tanaman pangan dan hortikultura
5. Program peningkatan ketahanan pangan melalui pembangunan desa mandiri pangan dan pembangunan lumbung desa

Permasalahan :

Secara umum tidak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, hanya saja keterlambatan pelaksanaan kegiatan baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota, dan adanya kebijakan dari pusat untuk penghematan dana, sehingga ada beberapa dana yang harus dikurangi.

Solusi :

Meningkatkan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan yang tentunya didasari oleh percepatan penetapan kebijakan anggaran (DPA) yang relatif memadai dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditentukan.

10. Sasaran Kualitas Kelestarian Sumber Daya Air, dan Kelestarian Lahan Meningkat

a. Penurunan Titik Api (Hot Spot)



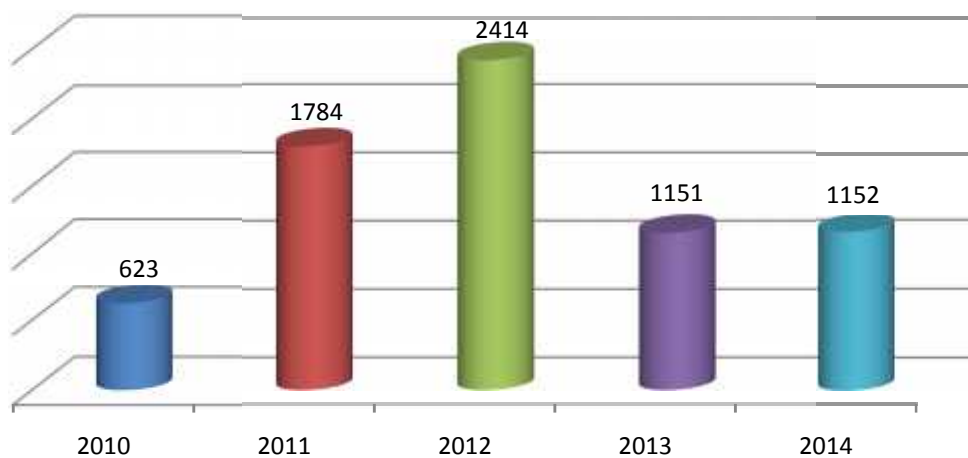
Dalam rangka mencegah serta menanggulangi terjadinya kebakaran hutan, maka Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, salah satu upaya yang dilakukan adalah pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dalam kegiatan ini dilakukan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang telah terlaksana di 11 Kab/Kota di Provinsi Jambi.

Kurun waktu sampai dengan bulan Desember 2014, jumlah titik api yang tercatat oleh satelit



NOAA18 sebanyak 1.152 titik api, jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan titik api tahun 2013 sebanyak 2.214 titik, tahun 2013 sebanyak 1.151 titik. Dengan target penuntasan jumlah titik api pada tahun 2014 sebanyak 800 titik, ternyata dapat di tuntaskan sebanyak 989 titik, selain itu titik api padam dikarenakan adanya hujan di wilayah titik api. Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tersebut antara lain dengan melakukan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta Penyuluhan Kehutanan. Hal ini berdampak pada terbukanya kesadaran, wawasan dan pola pikir masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dalam pemanfaatannya. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tersebut berdampak pada menurunnya potensi kebakaran hutan serta berkurangnya titik api di Provinsi Jambi.

Diagram 3.20. Trend Titik Api berdasar satelit NOAA Tahun 2010 s.d. 2014



Tabel 3.57. Perbandingan dan Capaian Kinerja Penurunan Jumlah Titik Api Tahun 2010 s.d. 2014

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Periode capaian kinerja			Capaian Kinerja			Capaian Target s.d. 2014	Target Akhir RPJMD
			2011	2012	2013	2014		% Capaian		
						Target	Realisasi			
1.	Penurunan jumlah titik api	1.782	1.784 titik	2.414 titik	1.151 titik	800 (dari 1.152 titik)	989	123,62	2.414 titik	300 titik

Sumber : Hasil pengolahan data 2015

Dari tabel di atas terlihat realisasi upaya pemadaman titik api telah melebihi target sebagaimana yang telah ditetapkan. Namun pemadaman titik api lebih dari 989 titik cenderung diakibatkan adanya hujan pada titik api, sehingga secara alami pemadaman titik api lainnya disebabkan faktor alam berupa hujan buatan untuk menjangkau sulitnya medan pemadaman serta area titik api yang terpantau tersebut merupakan lahan gambut yang sulit untuk dipadamkan.

Secara umum, dari tahun ke tahun trend jumlah titik api mengalami kenaikan, untuk menantisipasi hal ini Pemerintah Provinsi Jambi bekerjasama dengan pihak-pihak terkait terus berkomitmen dalam mengantisipasi dan melakukan upaya-upaya pemadaman secara sinergis, hal ini merupakan hasil dari berbagai program yang terkait peningkatan kualitas kelestarian sumber daya alam/lahan. Dalam tahun 2014, program yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini terdiri dari 4 program, yakni :

1. Program pengendalian dan pengrusakan lingkungan
2. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
3. Program fasilitasi dan pemulihan cadangan SDA
4. Program perlindungan hutan dan konservasi sumber daya hutan



Permasalahan :

1. Kurangnya sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
2. Informasi tentang sumber daya manusia dan peralatan kebakaran yang dimiliki perusahaan di bidang kehutanan belum terinventarisir.
3. Lokasi Tahura sekitar tanjung merupakan lahan gambut yang terjadi kebakaran pada musim kemarau.
4. Tenaga penyuluh di bidang kehutanan masih kurang.
5. Masih kurangnya tenaga dan penyegaran Polhut.

Solusi :

1. Koordinasi dengan Mangala Agni Provinsi Jambi lebih di tingkatkan.
2. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana dikawasan konflik.
3. Pembuatan bloking kanal diareal gambut sehingga air tidak mengalir langsung ke sungai diharapkan lahan gambut akan tetap basah untuk mengurangi kebakaran.
4. Penambahan anggaran untuk penyegaran polhut dan tenaga penyuluh kehutanan.
5. Menginventarisir SDM dan perlengkapan kebakaran di Perusahaan bidang kehutanan dan yang berbatasan dengan kawasan hutan.

11. Sasaran Kualitas Pengelolaan Mitigasi Perubahan Iklim dan Kelestarian Lingkungan Hidup Meningkat

a. Luasan Lahan Tertutup Pohon

Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan sebagaimana Luas Kawasan Hutan Tetap di Provinsi Jambi berdasarkan SK Menhutbun RI No.421/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 (cq. PERDA RTRW Provinsi Jambi No. 9 Tahun 1993 tanggal 27 Desember 1993) adalah seluas 2.179.440 Ha (42,73% Luas Daratan Jambi) dengan rincian :

a. Hutan Produksi Terbatas	: 340.700,00 Ha (15,63%)
b. Hutan Produksi Tetap	: 971.490,00 Ha (44,57%)
c. Hutan Lindung	: 191.130,00 Ha (8,77%)
d. Hutan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam :	
Cagar Alam	: 30.400,00 Ha (1,39 %)
Taman Nasional	: 608.630,00 Ha (27,92 %)
Tahura	: 36.660,00 Ha (1,68 %)
Hutan Wisata Alam	: 430,00 Ha (0,02 %)

Rasio luas kawasan tertutup berdasarkan kondisi saat ini di provinsi Jambi sebesar 64,80% persen (Dinas Kehutanan, 2014); telah diatas nasional yang hanya 52,43%, target ini akan terus meningkat dengan upaya-upaya penanaman satu milyar pohon (one Billion Indonesia Tree). Upaya ini dilakukan oleh pemegang izin HTI, Pemegang izin HTR, Pemegang izin Perusahaan perkebunan, Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan Provinsi, Kabupaten/Kota. Pohon yang ditanam sebanyak 56.634.327 batang dengan jarak tanam rata-rata 4x5 meter setara dengan luas 113.268,65 Hektar. Upaya ini perlahan meningkatkan target kawasan tertutup pohon pada tahun 2015 dalam pencapaian target MDGs.

Gambar 3.22. Luas Kawasan Tertutup Pohon

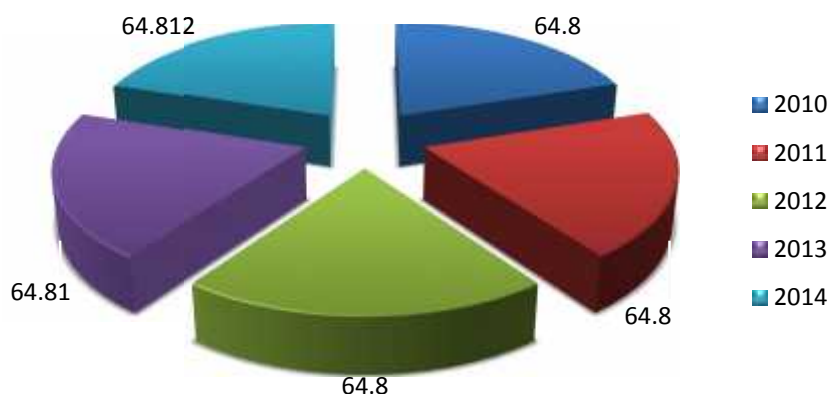




Kawasan hutan Provinsi Jambi meliputi luas $\pm 2.179.440,00$ Ha atau 42,73% dari keseluruhan luas Provinsi Jambi. Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan di Provinsi Jambi pada tahun 2010 mencapai 46%, yang terdiri dari Kawasan Konservasi seluas 676.120 Ha, Kawasan Lindung seluas 191.130 Ha dan Kawasan lindung Gambut seluas 253.330 Ha. Luasan kawasan lindung ini jauh diatas nasional yang hanya 26,40 pada tahun 2009, tahun 2015 ditargetkan luasan ini terus meningkat. Pada tahun 2013, luasan kawasan hutan tertutup pohon mengalami peningkatan perluasan sebesar 75 Ha dari hasil reboisasi di kawasan tanaman hutan rakyat sekitar tanjung sehingga luasan kawasan hutan tertutup pohon pada tahun 2013 mencapai $\pm 1.120.655$ Ha. Pada tahun 2014, peningkatan luasan lahan tertutup pohon meningkat seluas 100 Ha sesuai dengan target dalam perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan yakni sebesar 100 Ha. Oleh sebab itu, total luasan lahan tertutup pohon di provinsi Jambi menjadi $\pm 1.120.755$ Ha.

Di tingkat nasional, rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial ini persentasenya sebesar 4,35 persen (Kementerian Kelautan, 2009). Provinsi Jambi mempunyai 10% kawasan lindung perairan, sehingga saat ini status provinsi Jambi telah mencapai target MDGs tahun 2015 yaitu sebesar 10%. Untuk proposi tangkapan ikan yang berada pada batasan biologis aman di provinsi Jambi sebesar 71.820 ton/tahun sehingga status Jambi saat ini masih dibatas Maximum Sustainable Yield (MSY) yang ditentukan.

Gambar 3.23. Persentase luasan lahan tertutup pohon Provinsi Jambi 2010 s.d. 2014



Capaian tersebut di atas tentunya tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam berbagai program yang saling terkait, diantaranya : Program pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan yang bertujuan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan, difokuskan dalam dua Inventarisasi Potensi Hutan yang telah dilakukan inventarisasi potensi pada 8 kabupaten, serta kegiatan Restrukturisasi Industri Kehutanan, Optimalisasi PNBP dari SDA sektor kehutanan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah melalui revitalisasi industri kehutanan dengan bahan baku yang legal dan berkelanjutan, serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor kehutanan. Upaya ini juga dilakukan pada 11 Kab/Kota di Provinsi Jambi.

Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan didukung oleh capaian pemeliharaan atas tanaman unggulan lokal dan tanaman OBIT yang telah tertanam seluas 10 Ha serta terpeliharanya arboretum seluas 12 Ha. Terlaksananya pemeliharaan tanaman di 2 hutan tanaman rakyat seluas 147,75 Ha. Terbentuknya hutan desa sebanyak 24 unit yang berada di 3 Kabupaten (Merangin, Bungo, Batanghari) dengan total luas 54 ribu Ha. Selanjutnya peningkatan pengawasan batas sesuai target yaitu sepanjang 48,10 km meningkat sebesar 13,00 Km dari tahun 2012, serta sosialisasi tata batas di 6 (enam kecamatan yakni : Muara Sabak Barat (Kab. Tanjab. Timur), Dendang (Kab. Tanjab. Timur), Tebo Tengah (Kab. Tebo), Sumay (Kab. Tebo), Merlung (Kab. Tanjab. Barat), Pauh (Kab. Sarolangun). Terjaganya kawasan hutan dari perambahan dan terselesaikannya 9 kasus tindak pidana kehutanan. Terwujudnya konsep perubahan substansi kehutanan dalam tata ruang Provinsi Jambi



yang telah melewati tahap uji konsistensi dari stakeholder dengan proses yang masih akan berlanjut di Tahun Anggaran 2015 mendatang.

Tabel 3.58. Persentase Luasan Lahan Tertutup Pohon Tahun 2010 s.d. 2014

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Periode capaian kinerja			Capaian Kinerja			Capaian Target s.d. 2014	Target Akhir RPJMD
			2011	2012	2013	2014		% Capaian		
						Target	Realisasi			
1.	Persentase lahan tertutup pohon	64,80 (1.120.35 5 Ha)	64,80 (1.120.51 0 Ha)	64,80 (1.120.55 5 Ha)	64,81 (1.120.65 5 Ha)	64,815 (1.120.80 0 Ha)	64,812 (1.120.755 Ha)	99,9	64,815 (1.120.75 5 Ha)	65,5 (1.120.85 5 Ha)

Sumber : Hasil pengolahan data 2015

Capaian persentase rasio luasan lahan tertutup pohon sebagaimana tabel di atas merupakan upaya dalam rangka meningkatkan pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup dengan program yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini terdiri dari 7 program, yakni:

1. Program penataan kawasan
2. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya
3. Program pengendalian dan pengrusakan lingkungan
4. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
5. Program fasilitasi dan pemulihan cadangan SDA
6. Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH
7. Program rehabilitasi hutan dan lahan

Permasalahan :

1. Ekosistem alami di kawasan tropika seringkali amat rentan terhadap degradasi. penebangan, kebakaran, penggembalaan, dan budidaya pertanian dan perladangan yang berlebihan membuat vegetasi asli sulit untuk pulih kembali. Perambahan hutan dan model-model pertanian yang tidak berkelanjutan telah mempercepat degradasi lahan dan penurunan kesuburan tanah sangat cepat. Lapisan tanah telah hilang, tanah menjadi keras sehingga vegetasi sulit untuk tumbuh.

Solusi :

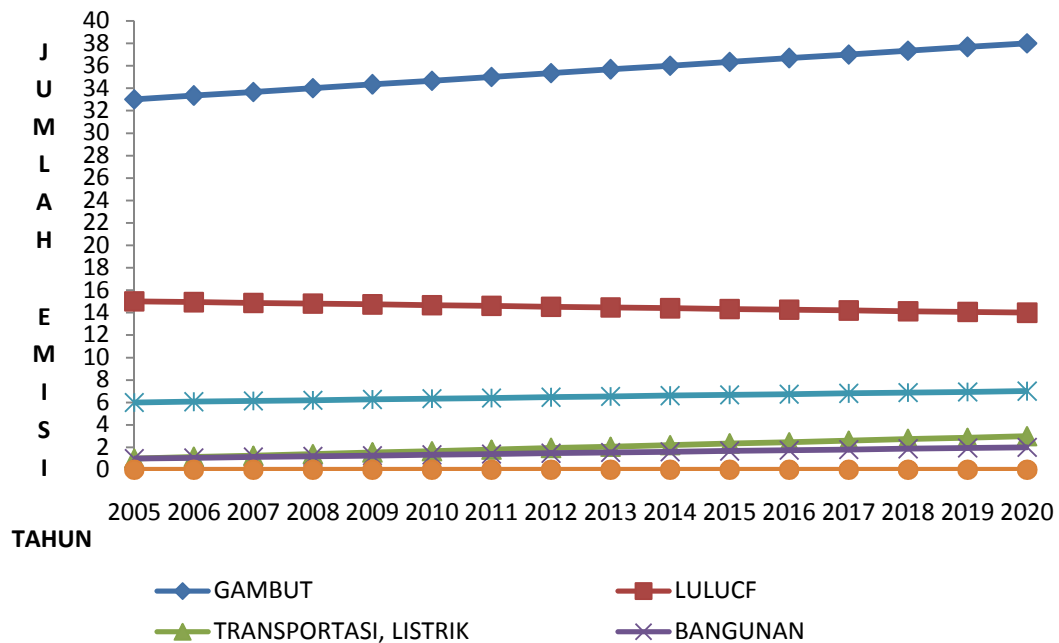
1. Melakukan reboisasi dan penghijauan dengan membuat hutan tanaman dengan jenis yang tumbuh cepat.
2. Perlu adanya pengaturan teknik penanaman baik secara horizontal maupun vertikal, sehingga dapat meningkatkan secara optimal tujuan penghijauan dalam mencegah bahaya erosi dan banjir. Keberadaan pohon dan tegakan hutan tidak secara otomatis mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi, justru peranan serasah dan tumbuhan bawah sangat besar dalam mencegah terjadinya bahaya erosi dan sedimentasi.

b. Indikator Kinerja Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Hutan adalah sumberdaya alam yang multifungsi. Dalam kaitannya dengan efek pemanasan global hutan mengurangi kadar CO₂ di udara dan memperangkapnya dalam bentuk biomassa hutan. Hutan klimaks ada dalam keseimbangan dinamik yang tidak lagi berfungsi mengurangi kadar CO₂. Jika dilakukan penebangan dengan cara yang benar, misalnya dengan tebang pilih yang mengikuti aturan, kerusakan yang terjadi adalah minimum. Pohon ditempat yang ditebang itu dipicu untuk tumbuh. Nisbah fotosintesis dan respirasi (P/R) naik sampai tercapai lagi keseimbangan. Oleh karena itu, jika penebangan dilakukan dengan baik akan menguntungkan dalam usaha penangkalan pemanasan global.

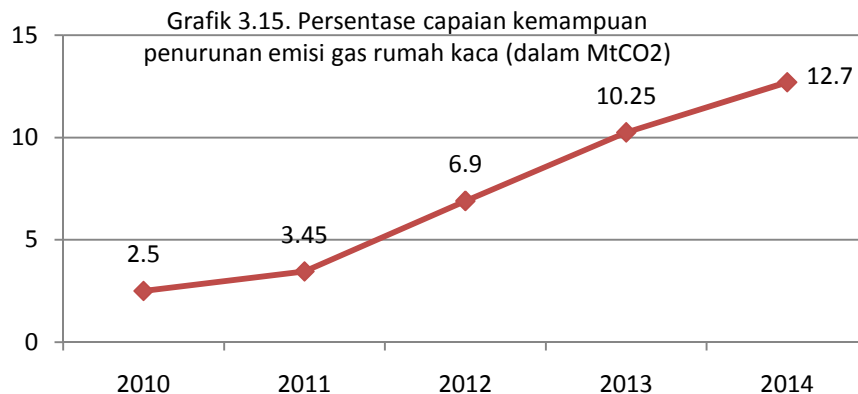


Grafik 3.14. Perkiraan Emisi GRK Provinsi Jambi



Reboisasi dan penghijauan dengan membuat hutan tanaman dengan jenis yang tumbuh cepat, penyerapan CO₂ akan berjalan cepat. Karbon yang tersimpan dalam biomassa hutan tanaman akan lebih besar daripada biomassa dalam hutan yang rusak. Apabila hutan yang rusak itu telah menjadi padang rumput. Dengan demikian hutan tanaman itu akan membantu dalam penurunan kadar CO₂ di udara. Akan tetapi pada umumnya biomassa hutan tanaman itu lebih rendah jumlah karbon yang tersimpan dalam hutan alam primer yang semula ada di tempat tersebut. Dengan demikian hutan tanaman sulit untuk dapat sepenuhnya mengembalikan kadar CO₂ udara pada tingkat seperti hutan klimaks, walaupun diproduksi bahan awet dari hutan tanaman. Apabila hutan tanaman dapat mengalihkan para pe ladang menjadi non-peladang, hutan yang rusak yang semula dipakai untuk perladangan akan dapat pulih secara alamiah.

Berdasarkan perhitungan dan analisis Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) 2010 terhadap pertumbuhan emisi dan mitigasi bahwa dalam skenario bisnis seperti biasa/business As Usual, Provinsi Jambi akan menjadi kontributor emisi gas rumah kaca yang signifikan di Indonesia sampai tahun 2030. Selanjutnya diterangkan Emisi bersih GRK tahunan Jambi pada tahun 2005 diperkirakan mencapai 57 MtCO₂e¹— setara dengan sekitar 3 persen dari total emisi Indonesia. Gambut dan Land Use and Land Use Change Forest (LULUCF) sejauh ini adalah kontributor emisi terbesar terhadap emisi Provinsi Jambi, mewakili 85 persen dari total emisi provinsi. Apabila tidak terdapat perubahan dalam cara pengelolaan sektor-sektor beremisi tinggi, emisi netto Jambi diperkirakan akan meningkat hingga 30 persen antara tahun 2005 dan 2030 dari 57 Mt CO₂e menjadi 74 MtCO₂e.



Pro Environment merupakan salah satu Strategi pembangunan Provinsi Jambi, untuk itu dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2010-2015 mempunyai Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 69 Mt CO₂ hingga tahun 2030 atau 17,25 MtCO₂ selama 5 tahun (yaitu 53% dari lahan gambut dan 36 % dari kehutanan). Menurut Perhitungan yang dilakukan oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim, Jambi memiliki potensi untuk menurunkan emisi GRKnya sampai dengan 55 MtCO₂e hingga tahun 2030, dengan perpaduan yang tepat antara kebijakan dalam negeri dan dukungan internasional. Dari kemungkinan-kemungkinan penurunan ini, 48 persen datang dari upaya upaya terkait konservasi lahan gambut dan 38 persen berasal dari sektor LULUCF. mewakili 80 persen total potensi pengurangan Jambi :

1. Mencegah pembakaran hutan dan lahan gambut ;
2. Mengurangi deforestasi hutan melalui penggunaan lahan yang lebih efektif, kebijakan-kebijakan alokasi lahan dan dengan meningkatkan produktivitas pertanian;
3. Merehabilitasi lahan gambut yang tidak digunakan atau yang rusak;
4. Mengelola hutan secara lestari; dan
5. Melakukan reboisasi.

Beberapa Program yang telah dilakukan dalam rangka mengurangi emisi karbon di Provinsi Jambi adalah :

1. Natural Resource Management, diantaranya pembenahan tata ruang dan rehabilitasi lahan, dalam hal ini Provinsi Jambi saat ini sedang melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),
2. Renewable Energy: Hydro power, Solar cell dan biomass,
3. Capacity and Human Resource Management : UMKM, Koperasi desa, capacity building, pengembangan sekolah kejuruan green dan riset.

Selain upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi telah menerbitkan Pergub Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca yang bertujuan untuk memberi panduan kepada Pemerintah Provinsi Jambi serta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pembangunan rendah karbon sehingga konsistensi pelaksanaannya menjadi terukur dan terarah serta mampu mendukung konsistensi pembangunan rendah karbon secara nasional. Sampai tahun 2014 Pemerintah provinsi Jambi telah menangani emisi gas rumah kaca sebesar 12,70 Mt CO₂.

Tabel 3.59. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2010 s.d. 2014

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Periode capaian kinerja			Capaian Kinerja			Capaian Target s.d. 2014	Target Akhir RPJMD
			2011	2012	2013	2014		% Capaian		
						Target	Realisasi			
1.	Emisi gas rumah kaca tertangani	2,5 Mt CO2	3,45 Mt CO2	6,90 Mt CO2	10,25 Mt CO2	12,00 Mt CO2	12,70 Mt CO2	100,7	12,70 Mt CO2	17,25 Mt CO2

Sumber : Hasil pengolahan data 2015



12. Sasaran Pengelolaan Tata Pemerintahan Yang Baik Meningkatkan

a. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan dan Asset Daerah

Target kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Provinsi tahun 2014 dengan predikat WTP telah tercapai sebagaimana target tahun 2014. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah, disiplin aparatur dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan serta mendeteksi secara dini terhadap kecurangan pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksaan/pembinaan terhadap 159 objek pemeriksaan (Obrik) dengan 156 penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau 98,11% dari target yang telah direncanakan sebelumnya.

Adapun progres tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jambi dari tahun 2010 s.d. 2014 dapat dijelaskan bahwa jumlah temuan sebanyak 1.445 dengan 2.738 rekomendasi dari jumlah tersebut terdapat kerugian negara. Terhadap rekomendasi tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 2.243 rekomendasi atau 81,92 persen, dalam proses penyelesaian sebanyak 210 rekomendasi atau 18,08 persen dan belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 285 rekomendasi atau 21,48 persen.

Sedangkan pengembalian atas kerugian negara sebesar 78,52 persen dari kerugian negara dan masih terdapat tunggakan pengembalian kerugian negara sebesar 21,48 persen. Selanjutnya atas temuan yang bersifat kewajiban setor kepada Negara/Daerah dalam kurun waktu 2009-2013 yang telah disetor ke Kas Negara/Daerah sebesar 87,96 persen, tunggakan atas kewajiban setor kepada Negara/Daerah sebesar 12,04 persen.

Pada tahun 2014 Provinsi Jambi telah melakukan pemeriksaan reguler di SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, dari hasil pemeriksaan tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat temuan sebanyak 321 dengan 603 rekomendasi. Jumlah tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 137 rekomendasi atau 22,72 persen, dalam proses penyelesaian sebanyak 102 rekomendasi atau 16,91 persen dan belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 364 rekomendasi atau 60,36 persen. Sedangkan temuan yang bersifat pengembalian atas kerugian daerah sebesar 22,16 persen dari jumlah kerugian negara sebesar sehingga masih terdapat tunggakan atas pengembalian kerugian negara sebesar 77,84 persen.

Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap Pemerintah Provinsi Jambi sampai dengan tahun 2014 sebanyak 72 temuan dengan 129 rekomendasi. Atas rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti sebanyak 42 rekomendasi atau 36,20% sedangkan 74 rekomendasi atau 63,20% lainnya masih dalam proses.

Hasil pemeriksaan BPK-RI periode 2003-2013 sebanyak 549 temuan dengan 1224 rekomendasi terdiri dari Pemeriksaan LKPD, Pemeriksaan pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada pada KPUD dan Panwas Provinsi Jambi, Pemeriksaan Bantuan Parpol, Pemeriksaan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Bantuan ADB pada Inspektorat Provinsi Jambi, Pemeriksaan atas dana perimbangan, Pemeriksaan atas Belanja Provinsi Jambi, Pemeriksaan Kinerja RSUD, Pemeriksaan Pendapatan, Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya, pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban program Jamkesmas, Pemeriksaan Penggunaan Dana STAR SDP pada Inspektorat Provinsi Jambi, Pelaksanaan Kerja Sama Kontrak Produksi Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Jambisapta Manunggal

Gambar 3.24. Penyerahan Opini WTP oleh BPK RI kepada Gubernur Jambi





Pratama Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Jambi Tepian Ratu Riverview Hotel dan Resort, Pemeriksaan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan Pemeriksaan Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada PT JII dan PT SPP di Jambi serta Pemeriksaan atas operasional PT. BPD Jambi Tahun Buku 2012 dan 2013.

Dari jumlah tersebut Inspektorat Provinsi Jambi telah melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut pada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dengan hasil : selesai ditindak lanjuti sejumlah 1.020 rekomendasi atau 83,33 persen, dalam proses penyelesaian tindak lanjut sebesar 147 rekomendasi atau 12,01 persen dan belum ditindaklanjuti sebanyak 57 rekomendasi atau 4,66 persen.

Tabel 3.60. Perbandingan Capaian Kinerja Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah & Asset Daerah Tahun 2010 s.d. 2014

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Periode capaian kinerja			Capaian Kinerja			Capaian Target s.d. 2014	Target Akhir RPJMD
			2011	2012	2013	2014		% Capaian		
						Target	Realisasi			
1.	Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP

Sumber : Hasil pengolahan data 2015

Pencapaian kinerja opini BPK atas laporan keuangan dan asset daerah tidak terlepas dari upaya yang dilakukan dengan melaksanakan program-program sebagai berikut ;

1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
3. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
4. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksaan dan aparatur pengawasan.

Permasalahan :

Beberapa penyebab utama yang menjadi permasalahan selama melakukan program prioritas baiknya opini BPK RI terhadap pengelolaan keuangan dan asset daerah Provinsi Jambi selama tahun 2014 antara lain sebagai berikut :

1. Terbatasnya Jumlah Personil yang memahami Kasus-kasus tertentu.
2. Adanya tahapan penyelesaian kasus yang memerlukan pendalaman sehingga memerlukan waktu yang relatif lama.
3. Masih terdapat Objek Pemeriksaan (SKPD) yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya karena belum adanya sanksi yang tegas terhadap Obrik yang tidak/belum melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
4. Kurangnya pemahaman Obrik terhadap Rekomendasi/saran dari temuan pemeriksaan.
5. Sulitnya menindaklanjuti temuan yang berhubungan dengan pihak ketiga.

Solusi :

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus seperti diklat audit Investigasi.
2. Mengupayakan penyelesaian kasus tahapan dan waktu yang lebih singkat.
3. Perlu adanya sanksi yang jelas dan tegas sehubungan dengan pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan, baik yang berhubungan dengan pemeriksaan oleh BPK maupun oleh APFP.
4. Menyarankan SKPD agar lebih pro aktif berkoordinasi dengan lembaga pemeriksa, baik APFP maupun BPK sehingga tindak lanjut dapat dilaksanakan dengan cepat.
5. Mengupayakan pola yang tepat menghubungkan antara Obrik/SKPD dengan pihak ketiga dalam menindaklanjuti temuan yang ada.



b. Aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Provinsi Jambi, dan Kabupaten /Kota

Sebagai konsekuensi diratifikasinya *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006, maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian kembali terhadap langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Direktorat Hukum dan HAM Bappenas sejak tahun 2006 telah mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2011-2025 yang lebih komprehensif, yang dijadikan sebagai acuan bagi seluruh *stakeholders*. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2011-2025 tersebut ditujukan untuk melanjutkan, mengkonsolidasikan dan menyempurnakan berbagai upaya dan kebijakan pemberantasan korupsi agar mempunyai dampak yang konkrit bagi peningkatan kesejahteraan, keberlangsungan pembangunan berkelanjutan dan konsolidasi demokrasi.

Sebagai penjabaran rencana aksi jangka panjang 2011-2025, dibuat rencana aksi jangka menengah 2011 - 2014. Selain itu dibentuk juga rencana aksi yang lebih tajam dan dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh Kementerian / Lembaga secara tahunan. Penyusunan Rencana Aksi Nasional Tahunan ini dimulai pada akhir tahun 2010 dengan melibatkan Kementerian / Lembaga terkait dan unit kerja Presiden bidang Pengawasan dan pengendalian Pembangunan (UKP4).

Pelaksanaan ADPPK Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota telah bergulir sejak tahun 2013. Berdasarkan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan realisasi pencapaian RAD PPK tahun 2013 yang dilaksanakan oleh 33 (tiga puluh tiga) provinsi dan 40 (empat puluh) kabupaten serta 33 (tiga puluh tiga) kota pada bulan Desember (B12) tahun 2013 yang disampaikan kepada Unit Kerja Presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan (UKP4) diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pembentukan kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) bagi pemerintah daerah yang membentuk kelembagaan PTSP : 71% memuaskan dan 29% mengecewakan.
2. Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP : 58,5% memuaskan dan 41,5% mengecewakan.
3. Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP (bagi pemerintah daerah yang sudah membentuk kelembagaan PTSP) : 64% memuaskan dan 36% mengecewakan.
4. Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP : 71% memuaskan dan 29% mengecewakan.
5. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah : 37% memuaskan dan 63% mengecewakan.
6. Publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah : 57% memuaskan dan 43% mengecewakan.
7. Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa : 51% memuaskan dan 49% mengecewakan.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian AD PPK tahun 2013 pada 106 daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk setiap aksi di atas 50% kecuali untuk aksi transparansi pengelolaan keuangan yang hanya mencapai 37%.

Evaluasi aksi PPK Pemerintah Daerah tahun 2013, yang terdiri dari jumlah aksi yang dilaksanakan sebanyak 7 aksi yang dilaksanakan oleh daerah provinsi sebanyak 33, daerah kabupaten 40, daerah kota 33. Permasalahan daerah yang masih mendapat nilai merah (41,73%) karena data dukung tidak sesuai target capaian, tidak ada laporan akibat offline internet daerah, terjadinya mutasi jabatan pada pengelola aksi, dan belum mengetahui cara pelaporan aksi. Solusi yang bisa dilakukan adalah sosialisasi ADPPK yang lebih optimal, dan juga komitmen pimpinan untuk tidak mengganti para pengelola aksi, dan koordinasi pelaporan lebih ditingkatkan.



Pada tahun 2014, berdasarkan hasil pemantauan dan verifikasi terhadap laporan atas realisasi pencapaian 4.609 aksi yang ditetapkan dalam aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (ADPPK) pada bulan September (B09) tahun 2014 yang disampaikan kepada unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan (UKP4), diperoleh gambaran sebagai berikut :

1. 2 aksi (0,04%) memperoleh kategori biru atau dengan predikat sangat memuaskan (melebihi target atau >100%).
2. 2.144 aksi (46,51%) memperoleh kategori hijau atau dengan predikat memuaskan (sesuai atau mendekati target 76-100%).
3. 193 aksi (4,18%) memperoleh kategori kuning atau dengan predikat kurang memuaskan (di bawah target atau 51-75%).
4. 2.229 aksi (48,36%) memperoleh kategori merah atau dengan predikat mengecewakan (jauh di bawah target atau <50%).
5. 41 aksi (0,89%) memperoleh kategori abu-abu dengan predikat tidak dapat dinilai karena tidak memuat target capaian.

Capaian realisasi aksi daerah Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.61. Realisasi ADPPK Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota B09 Tahun 2014

No.	Provinsi, Kab/Kota	Kategori Aksi					Jumlah Aksi
		Biru	Hijau	Kuning	Merah	Abu	
1.	Pemprov Jambi		8				8
2.	Pemkab Batanghari		6		9		15
3.	Pemkab Bungo		6	1	4		11
4.	Pemkab Kerinci		6	1	1		8
5.	Pemkab Merangin		3		5	2	10
6.	Pemkab Muaro Jambi		7		1		8
7.	Pemkab Sarolangun		8				8
8.	Pemkab Tanjab Barat		7		1		8
9.	Pemkab Tanjab Timur		6		2		8
10.	Pemkab Tebo		6	1			7
11.	Pemkot Jambi		8				8
12.	Pemkot Sungai Penuh		9		1		10

Sumber : Surat Menteri Dalam Negeri No.356/6336/SJ, 10 November 2014

Atas hasil capaian AD PPK Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota sebagaimana tabel di atas, bahwa capaian AD PPK Provinsi Jambi mendapatkan apresiasi yang sangat baik terbukti dari hasil penilaian UKP4 dengan kategori hijau untuk seluruh rencana aksi yang dilaporkan. Sedangkan rencana aksi yang masih mengalami kendala yakni dari Kab. Batang Hari dan Kab Bungo. Diberikannya kategori merah pada penilaian tersebut dikarenakan jumlah input aksi yang cukup banyak dari dua kabupaten tersebut sementara tidak didukung oleh capaian data yang disampaikan dalam laporan per-triwulannya.

Tabel 3.62. Perbandingan Capaian Kinerja ADPPK Provinsi Jambi dan Kab/Kota Tahun 2010 s.d. 2014

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Periode capaian kinerja			Capaian Kinerja			Capaian Target s.d. 2014	Target Akhir RPJMD
			2011	2012	2013	2014		% Capaian		
						Target	Realisasi			
1.	% Penilaian AD PPK Prov. Jambi	-	-	-	66,6 8 Aksi (kuning)	100 8 Aksi (hijau)	100 8 Aksi (hijau)	100	100 8 Aksi (hijau)	100 8 Aksi (hijau)
	% AD-PPK Kah/Kota	-	-	-	-	75	70		70	100

Sumber : Hasil pengolahan data 2015



Capaian kinerja meningkatnya aksi daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota sesungguhnya tidak terlepas dari dukungan berbagai 9 program, antara lain :

1. Program penerapan tata pemerintahan yang baik.
2. Program reformasi birokrasi.
3. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.
4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
5. Program pengembangan komunikasi dan informasi media massa.
6. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.
7. Program penghimpunan data dan penyebaran informasi pembangunan.
8. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.
9. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

Permasalahan :

Permasalahan daerah yang masih mendapat nilai merah antara lain :

1. Data dukung tidak sesuai target capaian.
2. Tidak ada laporan akibat offline internet daerah.
3. Terjadinya mutasi jabatan pada pengelola aksi, dan belum mengetahui cara pelaporan aksi.

Solusi :

1. Solusi yang bisa dilakukan adalah sosialisasi ADPPK yang lebih optimal.
2. Mendorong SKPD terkait di daerah provinsi, dan kab/kota untuk melaksanakan ADPPK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
3. Melaporkan permasalahan yang diterima dalam mengimplementasikan aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai amanat Inpres Nomor 2 tahun 2014.
4. Mengefektifkan tugas Tim koordinasi ADPPK pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah Kab/Kota yang dipimpin oleh sekretaris daerah masing-masing dan asisten sekda yang membidangi pemerintahan untuk memantau realisasi pencapaian dan pelaporan aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi.
5. Meningkatkan peran Bappeda provinsi dan Kab/Kota dalam memantau dan memverifikasi laporan pencapaian ADPPK serta kelengkapan data dukung yang menjadi syarat memenuhi target capaian yang telah ditetapkan

c. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jambi

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pendayagunaan aparatur negara bidang pelayanan publik melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bidang pelayanan publik melalui KepMenPAN Nomor : 81/1995 yang menyebutkan bahwa layanan prima adalah layanan layanan yang memberikan kepuasan pelanggan serta, serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. Kep/25/M.Pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, dan diperkuat dengan terbitnya surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 4/M/PAN-RB/03/2012 tentang pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada seluruh unit penyelenggara pelayanan publik.

Berbagai keluhan masyarakat atas rendahnya kinerja pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah baik pelayanan di bidang perizinan, administrasi, pelayanan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit termasuk pula pelayanan oleh badan usaha milik daerah, perlu segera diupayakan perbaikannya. Keluhan masyarakat yang tidak segera di respon oleh pemerintah akan dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah, yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat.

Pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat merupakan salah satu bentuk upaya yang bisa dilakukan dalam rangka melihat sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah



kepada masyarakat. Berbagai unsur yang ada dalam survei tersebut dapat dijadikan acuan dan tolok ukur perbaikan pelayanan pada masa yang akan datang.

Pada tahun 2013, pelaksanaan survei IKM lingkup Pemerintah Provinsi Jambi telah dilakukan pada 15 (lima belas) SKPD dengan unit pelaksanaan survei sebanyak 36 unit, dan pada tahun 2014 perkembangan pelaksanaan survei IKM SKPD menjadi 16 SKPD dengan unit survei sebanyak 30 Unit, berikut disajikan skor rata-rata hasil penilaian survei IKM lingkup SKPD Provinsi Jambi yang dijadikan sampel yang meningerpretasikan kinerja pelayanan Pemerintah Provinsi Jambi kurun waktu tahu 2013-2014, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.63. SKPD/Unit yang Melaksanakan Survei IKM Tahun 2013

No.	SKPD	Rata-rata IKM	Nilai Huruf
1	DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAMBI	77.31	
a	UPT - KERINCI-SEI. PENUH	77.01	B
b	UPT – BUNGO	73.92	B
c	UPT – TEBO	75.53	B
d	UPT - BATANG HARI	75.10	B
e	UPT - MUARO JAMBI	83.54	A
f	UPT - TANJAB BARAT	78.15	B
g	UPT - TANJAB TIMUR	78.06	B
h	UPT – MERANGIN	84.58	A
i	UPT - KOTA JAMBI	75.60	B
j	UPT – SAROLANGUN	71.60	B
2	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. JAMBI	76.02	
a	UPTD PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TANJAB BARAT	78.35	B
b	UPTD BALAI BENIH IKAN SNTRAL IKAN SENTRAL KERINCI	82.52	A
c	LABOR PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN (UJI MUTU HASIL PERIKANAN)	73.69	B
3	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROV. JAMBI	71.54	
a	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TANAMAN ANGGREK & KULTUR JARINGAN	75.11	B
b	BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA LINGKUP UPTD BALAI PERBENIHAN TPH DIPERTA PROV. JAMBI	69.15	B
c	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN & HOLTIKULTURA	71.71	B

Tabel 3.64. SKPD/Unit yang Melaksanakan Survei IKM Tahun 2014

No.	SKPD	Rata-rata IKM	Nilai Huruf
1	BIRO KESRAMAS SETDA PROVINSI JAMBI	69.03	B
	POLIKLINIK KANTOR GUBERNUR JAMBI	69.03	
2	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI	82.51	B
3	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI JAMBI	83.95	A
	PELAYANAN PERPUSTAKAAN, PENG.MINAT, DAN BUDAYA BACA	83.95	A
4	BADAN KESBANGPOL PROVINSI JAMBI	70.19	B
5	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI JAMBI	78.90	B
a	KOORDINASI PENYUSUNAN AMDAL	70.88	B
b	PENATAAN HUKUM LINGKUNGAN	89.29	A
c	PENDAYAGUNAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN	76.53	B
6	BPMD DAN PPT PROVINSI JAMBI	83.96	A
7	BADAN PENG.KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAMBI	83.96	A
8	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI	79.21	B
9	DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAMBI	71.87	B
	PELAYANAN KEBUN BINATANG TAMAN RIMBO	71.87	B
10	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI	75.21	B
a	PELAYANAN PENDIDIKAN FARMASI	71.41	B
b	PELAYANAN PELATIHAN KESEHATAN JAMBI	79.00	B
11	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI JAMBI	80.31	B



d	UPTD BPSPT DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROV. JAMBI	77.14	B
e	UPTD-BPSDMP DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROV. JAMBI	67.97	B
4	RSJ PROVINSI JAMBI	77.69	
a	PELAYANAN	78.66	B
b	POLIKLINIK SYARAF	79.84	B
c	RAWAT INAP	78.95	B
d	POLIKLINIK JIWA	78.66	B
e	FISIOTRAPI	77.49	B
f	APOTEK	75.76	B
g	REKAM MEDIK	74.46	B
5	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROV. JAMBI	85.42	A
6	BAKORLUH	71.43	B
7	DISPORA (KOLAM RENANG TELAGO RATU)	74.43	B
8	BKD	76.06	B
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASY & PEMB. PEREMPUAN	84.73	A
10	KPID	66.67	B
11	BANDIKLATDA	74.32	B
12	DINAS KESEHATAN	81.85	A
13	RSUD RADEN MATTATHER PROV. JAMBI	70.21	B
14	BPMD & PPT PROV. JAMBI	77.71	B
15	BIRO ORGANISASI STDA PROV. JAMBI	83.10	A
	NILAI RATA-RATA IKM PROVINSI JAMBI	76.89	B

Unsur Nilai Tertinggi dan Terendah IKM 2013

14U	UNSUR PELAYANAN	Rata-rata
U1	Prosedur pelayanan	76.84
U2	Persyaratan pelayanan	76.61
U3	Kejelasan petugas pelayanan	76.89
U4	Kedisiplinan petugas pelayanan	75.98
U5	Tanggung jawab petugas pelayanan	77.83
U6	Kemampuan petugas pelayanan	77.85
U7	Kecepatan pelayanan	74.56
U8	Keadilan mendapatkan pelayanan	76.49
U9	Kesopanan dan keramahan petugas	78.88
U10	Kewajaran biaya pelayanan	76.82
U11	Kepastian biaya pelayanan	75.83
U12	Kepastian jadwal pelayanan	75.30
U13	Kenyamanan lingkungan	77.22
U14	Keamanan pelayanan	79.35

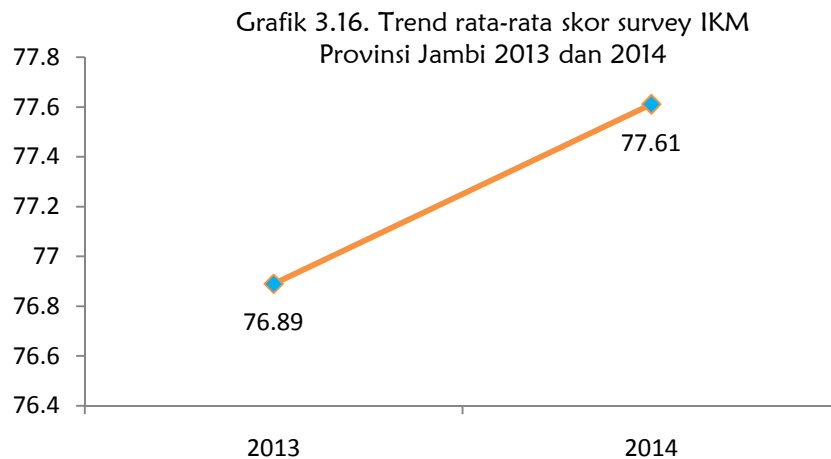
a	PELAYANAN RUMAH TANGGA DINAS	84.52	B
b	PELAYANAN BALAI PENGUJIAN	80.36	B
c	PELAYANAN BALAI PERALATAN DAN PERBEKALAN	76.07	B
12	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI	76.78	B
13	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI	79.83	B
14	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI	78.13	B
a	PELAYANAN POLIKLINIK UMUM	79.13	B
b	PELAYANAN POLIKLINIK SYARAF	80.32	B
c	PELAYANAN RAWAT INAP	79.43	B
d	PELAYANAN POLIKLINIK JIWA	79.11	B
e	PELAYANAN POLIKLINIK FISIOTERAPI	77.82	B
f	PELAYANAN APOTIK	76.22	B
g	PELAYANAN REKAMEDIK	74.90	B
15	KANTOR PERWAKILAN PROVINSI JAMBI DI JAKARTA	76.32	B
16	SEKRETARIAT KPID PROVINSI JAMBI	71.54	B
	NILAI RATA-RATA IKM PROVINSI JAMBI	77.61	B

Unsur Nilai Tertinggi dan Terendah IKM 2014

14U	UNSUR PELAYANAN	Rata-rata
U1	Prosedur pelayanan	77.00
U2	Persyaratan pelayanan	78.25
U3	Kejelasan petugas pelayanan	78.17
U4	Kedisiplinan petugas pelayanan	75.92
U5	Tanggung jawab petugas pelayanan	77.46
U6	Kemampuan petugas pelayanan	78.28
U7	Kecepatan pelayanan	76.30
U8	Keadilan mendapatkan pelayanan	77.66
U9	Kesopanan dan keramahan petugas	79.03
U10	Kewajaran biaya pelayanan	78.51
U11	Kepastian biaya pelayanan	79.23
U12	Kepastian jadwal pelayanan	76.14
U13	Kenyamanan lingkungan	79.21
U14	Keamanan pelayanan	79.85



Berdasarkan rekapitulasi hasil survei, diperoleh nilai IKM Pemerintah Provinsi Jambi dengan mutu rata-rata pelayanan "B" dan kinerja unit pelayanan termasuk kategori "BAIK" yang artinya tingkat kepuasan pelayanan pada Pemerintah Provinsi Jambi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk dalam kategori baik dengan nilai rata-rata tahun 2013 yakni 76,89 (B) dan pada tahun 2014 rata-rata 77,61 (B).



Jika dilihat dari rata-rata unsur pelayanan dari masing-masing SKPD, dapat diketahui unsur-unsur yang masih dianggap lemah dan perlu upaya perbaikan pelayanan pada masa yang akan datang. Pada tahun 2013 dan 2014, unsur yang perlu mendapat perhatian perbaikan yakni unsur ke-7 (tujuh) yaitu : Kecepatan Pelayanan dengan rata-rata 74,56 (tahun 2013) dan 76,30 (tahun 2014). Sedangkan unsur yang mendapatkan rata-rata tertinggi dan perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan yakni unsur ke-14 (empat belas) yaitu : Keamanan Pelayanan, dengan nilai rata-rata IKM 79,35 (tahun 2013) dan 79,85 (tahun 2014).

Dari rata-rata tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2013 paling tinggi diperoleh dari unsur keamanan pelayanan dan disusul dengan unsur kesopanan & keramahan petugas, serta kemampuan petugas pelayanan. Pada tahun 2014, unsur keamanan pelayanan masih menduduki nilai tertinggi, disusul oleh kepastian biaya pelayanan, dan unsur kesopanan dan keramahan petugas.

Tabel 3.65. Perbandingan dan Capaian Kinerja Peningkatan Skor IKM Pelayanan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2013 s.d. 2014

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Periode capaian kinerja			Capaian Kinerja			Capaian Target s.d. 2014	Target Akhir RPJMD
			2011	2012	2013	2014		% Capaian		
						Target	Realisasi			
1.	Skor IKM Pemerintah Provinsi Jambi	-	-	-	76,89 (B)	77	77,61 (B)	100,79	77,61	> 85 (A)

Sumber : Hasil pengolahan data 2015

Pencapaian kinerja peningkatan skor IKM ini diharapkan akan meningkat pada masa yang akan datang, terlepas dari belum seluruhnya SKPD yang melaksanakan survey IKM namun langkah ini merupakan upaya untuk mengetahui sejauh mana tingkat pelayanan yang diberikan oleh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang dijadikan sampel sebagai cerminan pelayanan Pemerintah Provinsi Jambi kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja ini antara lain dengan melaksanakan program-program sebagai berikut ;

1. Program peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Program penerapan tata pemerintahan yang baik.
3. Program penguatan akuntabilitas kinerja.



4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Permasalahan :

1. Belum seluruhnya SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang melaksanakan survei IKM terhadap pelayanan SKPD maupun unit pelayanan di wilayah kerjanya.
2. Beberapa SKPD yang telah melakukan survei belum memberikan laporan secara berkala terhadap hasil pelaksanaan survei IKM yang dilaksanakannya.

Solusi :

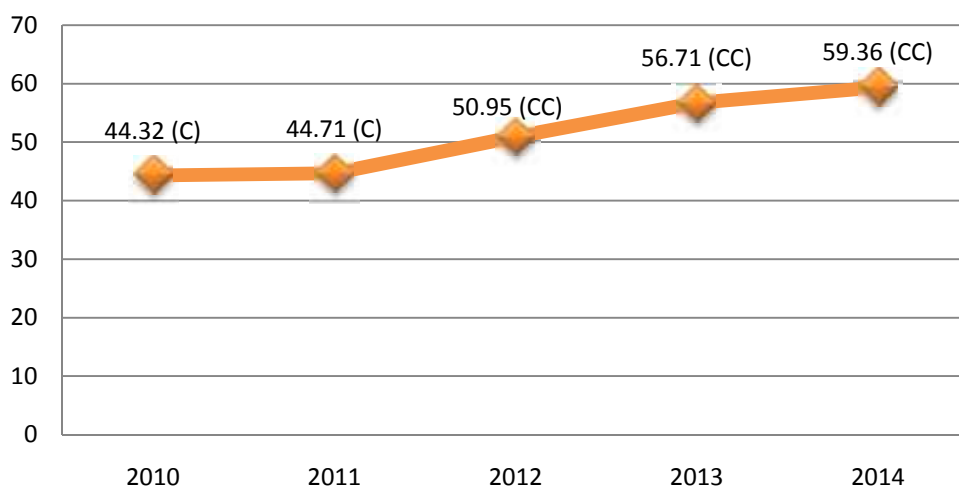
1. Mendorong dan memotivasi SKPD untuk melaksanakan survei IKM pada unit kerjanya secara berkala, yang didukung oleh ketersediaan anggaran yang cukup sebagai sumberdaya pelaksanaan survei IKM yang harus dilakukan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali.
2. Mengingatkan SKPD untuk segera menyampaikan laporan hasil pelaksanaan survei IKM tersebut kepada Gubernur Jambi melalui leading sektor pelaksanaan survei IKM yakni Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.

d. Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas pemerintah menunjukkan pergeseran baru dalam relasi antara pemerintah dengan publik. Konsep akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggung-jawabkan mandat yang diberikan publik untuk mengelola urusan-urusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015, perhatian Provinsi Jambi akan pentingnya akuntabilitas, bisa dilihat dalam rumusan misi ke-5 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. Tata kelola pemerintahan yang baik lazim di gambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga kata kunci ini menunjukkan juga pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah yang lain. Karenanya, partisipasi dan transparansi juga menjadi kunci selain akuntabilitas untuk membuat pengelolaan publik dengan lebih terbuka dan memberi ruang bagi berbagai pihak.

Capain kinerja yang sudah diraih menunjukkan hasil yang belum maksimal. Target yang ditetapkan adalah nilai B untuk akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Jambi, belum berhasil dicapai (0%). Belum tercapainya target kinerja ini dikarenakan belum maksimalnya perumusan indikator kinerja, baik itu indikator kinerja utama (outcome) maupun indikator kinerja (output) SKPD. Sebagai catatan, kinerja ini adalah realisasi kinerja pemerintah daerah tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB tahun 2014, karena proses penilaian akuntabilitas kinerja tahun 2014 sedang dalam proses.

Grafik 3.17. Trend Perolehan Skor SAKIP Provinsi Jambi 2010 - 2014





Tabel 3.66. Perbandingan dan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2010 s.d. 2014

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Periode capaian kinerja			Capaian Kinerja			Capaian Target s.d. 2014	Target Akhir RPJMD
			2011	2012	2013	2014		% Capaian		
						Target	Realisasi			
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi	C 44,32 Penilaian LAKIP 2009	C 44,71 Penilaian LAKIP 2010	CC 50,95 Penilaian LAKIP 2011	CC 56,71 Penilaian LAKIP 2012	B 65 Penilaian LAKIP 2013	CC 59,36 Penilaian LAKIP 2013	91,32	CC Penilaian LAKIP 2013	B

Sumber : Hasil pengolahan data 2015

Menurut penilaian Kemenpan RB, beberapa hal penting dari penilaian akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- Pemerintah Provinsi Jambi meraih nilai 59,36 atau masih mencapai predikat CC (cukup baik namun perlu perbaikan yang tidak mendasar). Capaian ini memperoleh persentase sebesar 91,32% dari target yang ingin dicapai yakni sebesar 65%.
- Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang dievaluasi.
- Pemerintah Provinsi Jambi telah membangun akuntabilitas kinerja pada tingkat pemerintah provinsi dan SKPD dengan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang meliputi perencanaan, kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.
- Secara umum, evaluasi atas kinerja Pemerintah Provinsi Jambi cukup baik, namun ada beberapa hal yang dibutuhkan untuk perbaikan ke depan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.67. Hasil Evaluasi Kemapan RB RI atas Akuntabilitas Kinerja Provinsi Jambi Tahun 2013

Aspek	Tantangan dan Rekomendasi
Perencanaan Kinerja	Tantangan : - RPJMD/Renstra SKPD belum dilengkapi dengan indikator kinerja untuk tujuan strategis - Renstra, RKT, dan Penetapan/Perjanjian Kinerja terutama SKPD belum seluruhnya berorientasi hasil - Indikator kinerja yang terdapat dalam renstra SKPD sebagian besar masih berorientasi output sehingga belum menggambarkan hasil yang akan diwujudkan - PK belum dimonitor pencapaiannya secara berkala dan berkelanjutan ataupun dimanfaatkan dalam pengelolaan kegiatan Rekomendasi : Mereviu ulang sasaran yang ada dalam renstra, RKT, dan IKU terutama di SKPD sehingga lebih menggambarkan hasil sesuai dengan tugas pokok fungsinya dan dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai
Pengukuran Kinerja	Tantangan : - Kualitas rumusan indikator kinerja terutama di SKPD belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria indikator kinerja yang baik, sehingga hasil pengukurannya belum dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya - Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk pengendalian dan peningkatan kinerja Rekomendasi : - Mereviu ulang indikator kinerja tujuan/sasaran yang telah ada sehingga dapat memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik



	2. Memonitor pencapaian PK secara berkala, berkelanjutan dan jika dimungkinkan dapat menggunakan teknologi sistem informasi
Pelaporan Kinerja	Tantangan : LAKIP Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2013 yang disusun telah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri PAN dan RB RI. Terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian dalam pelaporan kinerja, antara lain : 1. LAKIP terutama di tingkat SKPD belum menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome/hasil, dan lebih banyak menyajikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan 2. LAKIP terutama di tingkat SKPD belum menyajikan perbandingan data kinerja secara memadai Rekomendasi : Menyempurnakan penyajian informasi dalam LAKIP terutama di SKPD mengenai capaian target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan disertai penjelasan yang cukup mengenai hasil analisis kinerja
Evaluasi	Tantangan : Hasil evaluasi belum maksimal ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja. Demikian juga, Pemerintah Provinsi Jambi belum melakukan evaluasi program secara memadai dalam rangka menilai keberhasilan program strategis Rekomendasi : Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga rekomendasinya dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi
Capaian Kinerja	Tantangan : Capaian kinerja output hampir seluruh target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan telah tercapai. namun untuk capaian kinerja outcome hasilnya belum dapat diukur sebab perumusan indikator kinerja belum memadai Rekomendasi : Melakukan evaluasi terhadap capaian program secara memadai dalam rangka menilai keberhasilan program strategis

Selain tantangan sebagaimana substansi pada tabel di atas, Pemerintah Provinsi Jambi juga perlu mengembangkan transparansi dan akuntabilitas melalui sarana teknologi informasi. Saat ini keterbukaan informasi telah dipublikasikan dalam web Provinsi Jambi di jambiprov.go.id dalam transparansi kebijakan pembangunan, transparansi anggaran, dan keterbukaan ruang publik dalam pembangunan Provinsi Jambi.

Gambar 3.25. Kebijakan Pembangunan, Transparansi Anggaran, & Keterbukaan informasi publik dalam Web : jambiprov.go.id





Melalui web ini, publik juga dapat memberikan saran dan kritik membangun terkait perkembangan pembangunan Provinsi Jambi. Namun tidak dipungkiri seiring berkembangnya teknologi, juga perlu diimbangi dengan kemampuan akses informasi yang lebih baik. Untuk menunjang keberhasilan transparansi tersebut, maka telah dilakukan upaya dalam bentuk pelaksanaan program-program sebagai berikut :

1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
3. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
4. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas.
5. Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa.
6. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.
7. Program pengumpulan data dan penyebaran informasi pembangunan.
8. Program tata kelola pemerintahan yang baik.

Permasalahan :

1. Persoalan dengan pengembangan sarana-sarana untuk membuka transparansi dan akuntabilitas adalah sejauh mana sarana-sarana dan sistem informasi berbasis teknologi informasi sudah dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Sistem yang tersedia sebagai sarana pengembangan akuntabilitas belum seluruhnya menjangkau masyarakat yang belum melek teknologi. Strategi ini juga penting karena proporsi masyarakat yang belum melek teknologi jumlahnya lebih banyak
3. Juga penting untuk menggali, sejauh mana aplikasi dan data berbasis teknologi informasi ini telah dipakai sebagai pijakan perbaikan perencanaan tahun/periode setelahnya.

Solusi :

1. Pemanfaatan informasi dan hasil analisis pengendalian untuk perbaikan kualitas perencanaan pada periode berikutnya.
2. Penyebarluasan informasi dan prosedur untuk penerapan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk menjamin hak masyarakat dalam kebijakan publik.

13. Sasaran Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Meningkatkan

a. Indikator Kinerja Persentase Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Salah satu indikator pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menurut MDGs adalah angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun. Kelompok penduduk usia sekolah ini adalah kelompok penduduk usia produktif. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menunjukkan bahwa angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun di Provinsi Jambi pada tahun 2014 telah mencapai 98%. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2013 yakni sebesar 97,4%. Peningkatan angka melek huruf terjadi antara lain karena peningkatan partisipasi penduduk usia 15-24 tahun yang buta huruf untuk mengikuti program pendidikan keaksaraan dan pendidikan non formal serta meningkatnya proporsi siswa yang menamatkan SD/MI/Paket A dan SMP/MTs.

Tujuan mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan memiliki tiga indikator, yaitu rasio perempuan terhadap laki-laki ditingkat pendidikan dasar menengah dan tinggi; Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian dan Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun. Rasio perempuan terhadap laki-laki tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi adalah angka hasil bagi APM laki-laki jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan APM perempuan pada jenjang pendidikan yang sama. Apabila hasil bagi 95% - 105% dapat disimpulkan masih dalam kategori kesetaraan gender. Terjadi ketimpangan gender apabila hasil bagi lebih besar dari 105% atau lebih kecil dari 95%.

Berbagai kemajuan telah dicapai dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender di berbagai bidang. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki pada tahun 2013 tingkat SD/ MI dan SMP sebesar 96,9% dan 97,59%, mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 97,02% dan 97,56% dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15



sampai 24 tahun telah mencapai 97,43%. Dengan demikian, Jambi sudah secara efektif menuju pencapaian kesetaraan gender yang terkait dengan pendidikan pada tahun 2015.

Tabel 3.68. Perbandingan dan Capaian Kinerja Persentase Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2010 s.d. 2014

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Periode capaian kinerja			Capaian Kinerja			Capaian Target s.d. 2014	Target Akhir RPJMD
			2011	2012	2013	2014		% Capaian		
						Target	Realisasi			
1.	Persentase kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (dilihat dari APM 15-24 Th)	96,00	96,06	96,33	97,40	97,50	97,43	99,92	97,43	97,5

Sumber : Hasil pengolahan data 2015

Sementara itu, angka buta huruf perempuan dan laki-laki menunjukkan pola yang sama di semua kabupaten/kota, yaitu persentase perempuan masih lebih tinggi dibandingkan persentase laki-laki. Secara total, penduduk buta huruf di Kota Jambi adalah yang terendah, hanya 1,38 persen. Begitu pula ketimpangan antara perempuan dan laki-laki relatif lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Kondisi cukup memprihatinkan terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di mana persentase buta huruf masih relatif tinggi baik penduduk perempuan maupun laki-laki (10,92% dan 5,07%)

Program Pendidikan Sekolah Menengah, diarahkan dalam rangka upaya perluasan akses layanan dan meningkatkan mutu keluaran/lulusan melalui berbagai upaya antara lain pemberian bantuan operasional, penyediaan ruang kelas, peningkatan bakat dan prestasi siswa, baik umum (SMA) maupun kejuruan (SMK). Upaya peningkatan akses pendidikan, terutama bagi siswa miskin dari sisi ekonomi sangat ditentukan oleh kebijakan yang dirumuskan dengan baik dan dibangun dengan proses partisipatif.

Dalam upaya peningkatan akses tersebut, pemerintah Propinsi Jambi menganut kebijakan yang berpihak pada siswa kurang mampu/miskin. Kebijakan yang berpihak kepada siswa miskin bertujuan untuk mengupayakan siswa miskin menikmati layanan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah tanpa terancam putus sekolah. Sejak tahun 2012 s.d. 2014 telah dilaksanakan Pendidikan Menengah Universal (PMU) oleh Mendikbud RI untuk memperluas kesempatan dan jangkauan partisipasi semua golongan untuk memperoleh layanan pendidikan. Dengan harapan satuan pendidikan pada jenjang menengah yang tersebar diwilayah Provinsi Jambi dapat melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan.

Partisipasi Angkatan Kerja Wanita

Di bidang ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam rangka pencapaian target MDGs sebagai upaya meningkatkan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian telah meningkat menjadi 35,8% persen pada tahun 2012 (laporan MDGs 2011) dan pada tahun 2013 menjadi 36,1%.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dan perempuan, maka berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Melalui program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan melaksanakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain itu, terbentuknya Institusi pemberdayaan perempuan di masing-masing Kab/Kota dalam Provinsi Jambi juga merupakan upaya juga berdampak pada penanganan pemberdayaan perempuan dan anak di masing-masing Kab/Kota.



Kewajiban Pemerintah untuk mengembangkan kebijaksanaan dan peraturan berkaitan dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai persamaan substantif, hak yang sama dan persamaan *legal standard* antara laki-laki dan perempuan (misalnya; hak yang sama dalam keluarga, peluang kerja yang sama, pemberian gaji yang sama, kewarisan, kewarganegaraan, kesempatan di bidang politik). Proses modernisasi dan kemajuan teknologi informasi membawa dampak pada perubahan sosial pada peranan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Jumlah kaum perempuan yang bekerja di luar rumah seperti, sebagai Pegawai Negeri, di bidang Pemerintahan, Legislatif dan Yudikatif), semakin meningkat. Fenomena meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja memang diharapkan bahkan didorong oleh negara lewat konsep ke mitrasejajaran pria dan wanita dalam GBHN. Diharapkan perempuan akan lebih banyak berpartisipasi dalam pembangunan untuk peningkatan pemberdayaan perempuan tidak saja untuk masa kini tetapi juga untuk masa yang akan datang agar tetap berkesinambungan dalam pembangunan berkelanjutan.

Sebagai bentuk kesetaraan gender dan emansipasi wanita di pemerintahan, Pemerintah Provinsi Jambi selalu berusaha menghormati hak-hak wanita dalam pemerintahan termasuk didalamnya adalah memberikan kesempatan dalam berkarya di lingkungan pemerintahan. Perkembangan angka persentase wanita yang menjabat eselon merupakan salah satu indikator semakin proporsionalnya kesempatan yang di berikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Jika dilihat dari jumlah wanita yang menjabat eselon dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.69. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Wanita Yang Menjabat Eselon lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2010 s.d. 2014

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Periode capaian kinerja			Capaian Kinerja			Capaian Target s.d. 2014	Target Akhir RPJMD
			2011	2012	2013	2014		% Capaian		
						Target	Realisasi			
1.	Persentase Wanita yang menjabat eselon lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	24,47 (245 orang dari 1.001 jabatan eselon)	25,47 (255 orang dari 1.001 jabatan eselon)	26,27 (263 orang dari 1.001 jabatan eselon)	26,50 (267 orang dari 1.001 jabatan eselon)	27 (269 orang dari 1.001 jabatan eselon)	27,11 (271 orang dari 1.001 jabatan eselon)	100,41	27,11 (271 orang dari 1.001 jabatan eselon)	30 (300 orang)

Sumber : BKD, Biro Organisasi, & hasil pengolahan data 2015

Jika dilihat pada tabel di atas, terlihat trend kenaikan persentase wanita yang menjabat eselon. Pada tahun 2010 tercatat sebanyak 245 orang atau sebesar 24,47% dari jumlah jabatan yang ada yakni sebanyak 1.001 jabatan eselon (eselon 1 s.d eselon 4). Kenaikan persentase dialami pada tahun 2011 dengan tingkat persentase sebesar 25,47% dengan jumlah pejabat wanita sebanyak 255 orang. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 26,27% dengan jumlah pejabat sebanyak 263 orang sedangkan pada tahun 2013 meningkat menjadi 267 orang. Capaian akhir tahun 2014 diperoleh persentase sebesar 27,11% atau dengan jumlah 271 orang perempuan dalam jabatan eselon pada Pemerintah Provinsi Jambi. Ke depan, diharapkan persentase ini akan terus meningkat menuju tingkat proporsional dalam mendukung kebijakan pemerintah mengenai emansipasi wanita dan kesetaraan gender menuju target 30% pada akhir periode RPJMD. Dengan meningkatnya persentase ini, berdampak positif pada perencanaan anggaran responsif berbasis gender yang melahirkan program dan kegiatan-kegiatan yang berbasis gender, terutama program/kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3.3. Pencapaian Kinerja Lainnya

Selain pencapaian IKU Gubernur sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, pencapaian tujuan dan target pembangun yang lain juga menjadi penanda kemajuan dan keberhasilan dari program/kegiatan pembangunan daerah. Bagian berikut akan menguraikan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk beberapa kinerja lain, khususnya capaian RPJMN sebagaimana pada tabel di bawah ini :



Tabel 3.70. Prioritas dan Sasaran Strategis RPJMN untuk Pemerintah Provinsi Jambi

Provinsi	Tahun	
	2010	2014
Pertumbuhan Ekonomi	4,8 – 5,3	6,9 – 7,6
Kemiskinan (%)	7,2 – 8,0	4,6 – 5,1
Pengangguran (%)	4,2 – 4,7	3,1 – 3,5
Angka Kematian Bayi	27	24
Rata-Rata Lama Sekolah	7,84	8,08
Angka Harapan Hidup	70,43	71,26
Pendapatan Perkapita (Rp.Ribu)	5.853,36	6.843,80

Sumber : RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015

Pertumbuhan Ekonomi

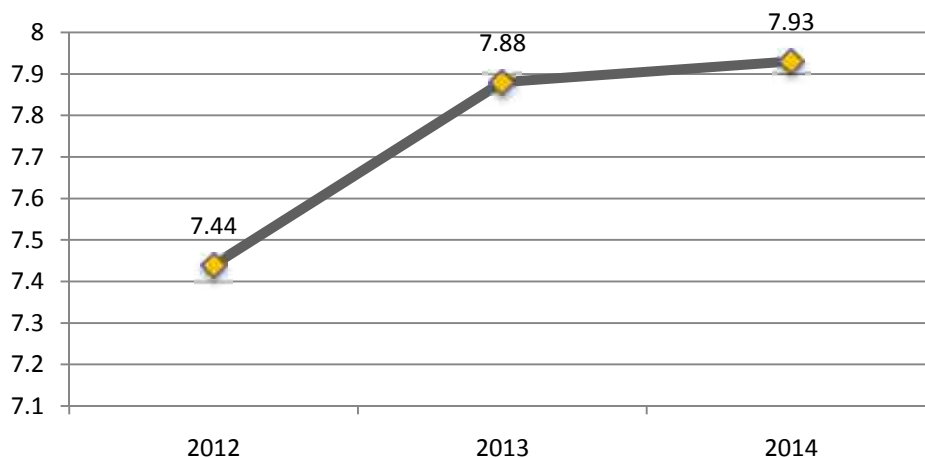
Pertumbuhan ekonomi Jambi dalam empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional. Pertumbuhan ekonomi provinsi itu secara spasial naik mencapai 7,93% melebihi target yang diarahkan RPJMN terhadap Provinsi Jambi untuk tahun 2014 yakni sebesar 7,6%. Pertumbuhan ekonomi Jambi ini tertinggi di Sumatera dan peringkat dua secara Nasional setelah Sulawesi Barat dengan pertumbuhan ekonomi 8,73%.

Pertumbuhan ekonomi ini sangat penting bagi modal pembangunan Provinsi Jambi, karena dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, akan menggerakkan aktivitas perekonomian dan dapat mengurangi pengangguran, di samping itu laju inflasi di Provinsi Jambi juga mampu dikendalikan. Dengan pertumbuhan ekonomi ini, trend investasi di Provinsi Jambi juga akan meningkat, karena salah satu pertimbangan investor berinvestasi di daerah itu juga diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonominya.

Gambar 3.26. Aktivitas penunjang pertumbuhan perekonomian



Grafik 3.8. Trend Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi



Pertumbuhan ekonomi ini juga berpengaruh positif terhadap investasi Provinsi Jambi, mengingat salah satu tolak ukur investor berinvestasi di daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dari release yang disampaikan BPS Nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar

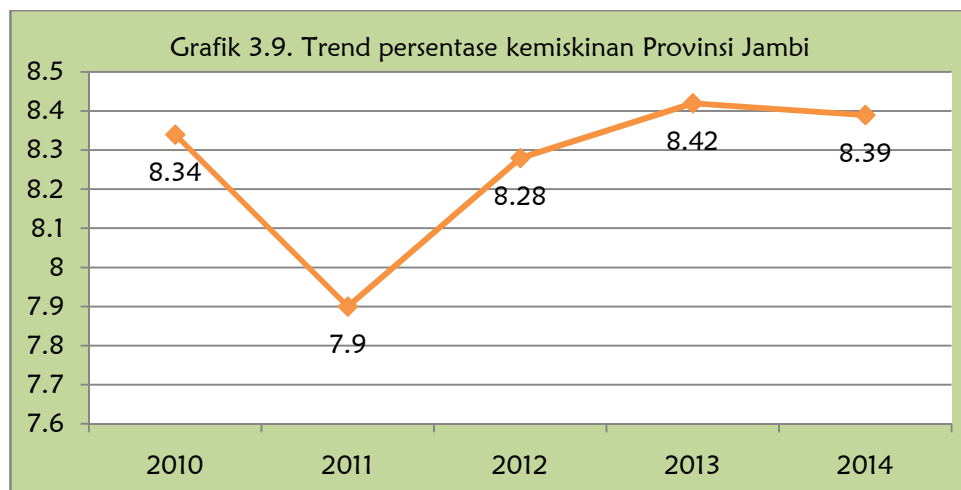


5,02%. Pertumbuhan ini masih didorong oleh aktifitas perekonomian di Pulau Jawa sebesar 5,59%, Sumatera 4,66%, Bali dan Nusa Tenggara 5,86%, Kalimantan 3,19%, Sulawesi 6,88%, serta Maluku 4,32%.

Pertumbuhan ekonomi ini terjadi diseluruh Indonesia. Tertinggi terjadi di Sulawesi Barat 8,73%, disusul Jambi 7,93% dan Provinsi Sulawesi Selatan 7,57%. Sementara provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi dibawah pertumbuhan ekonomi Nasional yang itu, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Papua, Riau, Kalimantan Timur, dan terendah Aceh.

Persentase Kemiskinan

Trend capaian penurunan kemiskinan Provinsi Jambi dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Jambi pada bulan September 2014 sebesar 281,75 ribu jiwa (8,39 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2014 yang berjumlah 263,80 ribu jiwa (7,92 persen), berarti jumlah penduduk miskin naik sebesar 18 ribu jiwa.

Pada bulan September 2014, persentase penduduk miskin perkotaan mencapai 10,67 persen sedangkan di perdesaan mencapai 7,39 persen. Garis Kemiskinan menunjukkan tren sedikit meningkat akibat pengaruh inflasi pada nilai pengeluaran penduduk. Jika dibandingkan dengan target penurunan yang ditetapkan oleh RPJMN yakni 4,6% - 5,1%, maka tingkat capaian penurunan tahun 2014 untuk Provinsi Jambi belum sesuai dengan capaian tahun 2014 sebesar 8,39%.

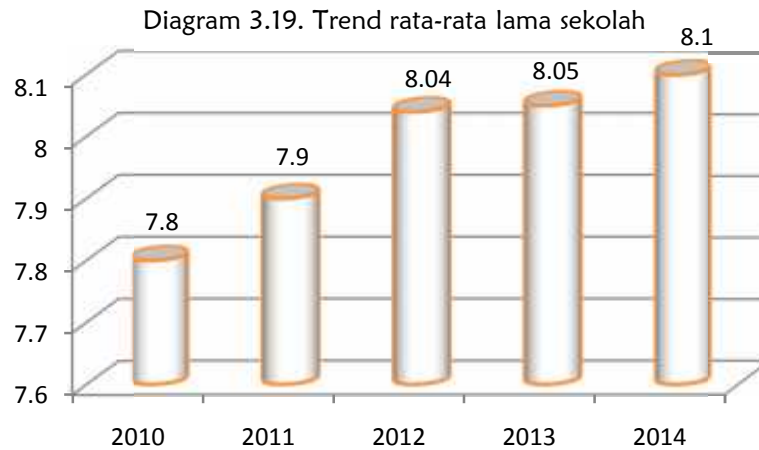
Angka Rata-rata Lama Sekolah

Program Pendidikan Dasar 9 Tahun bertujuan untuk menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang bermutu dan mengurangi angka putus sekolah, sangat berpengaruh pada Angka Rata-Rata Lama Sekolah. Saat ini angka rata-rata lama sekolah Provinsi Jambi sebesar 8,10 tahun, dan sudah melebihi target yang telah ditetapkan oleh RPJMN pada tahun 2014 sebesar 8,08 tahun. Akan tetapi, Pemerintah Pusat sejak tahun 2012 telah mencanangkan wajib belajar 12 tahun, sehingga Pemerintah Provinsi Jambi harus bekerja keras untuk mencapainya. Dalam kaitan pencapaian target tersebut diatas, pemerintah Provinsi Jambi tetap mendorong Kabupaten/Kota untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan. Disamping itu, Pemerintah Provinsi Jambi tetap berkomitmen meningkatkan infrastruktur pendidikan sesuai dengan kewenangan, salah satunya melalui dana transfer ke daerah.

Melalui indikator peningkatan angka rata-rata lama sekolah selama 4 (empat) tahun terakhir juga mengalami peningkatan dari 7,8Th pada tahun 2010 menjadi 7,9Th pada tahun 2011, pada



tahun 2012 mengalami peningkatan angka rata-rata lama sekolah menjadi 8,04Th, pada tahun 2013 telah mencapai angka 8,05Th, dan pada tahun 2014 telah menjapai 8,10Th.



Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran ini menunjukkan bahwa capaian kinerjanya sangat baik, karena mencapai 8,10% dari target yang dirumuskan. Pada tahun 2014, rata-rata lama sekolah adalah 8,10 tahun, dibandingkan dengan target sebanyak 8,08 tahun. Pencapaian ini juga telah mencapai 100,24% dari rencana target kinerja pada akhir RPJMD pada tahun 2015 yaitu rata-rata lama sekolah sebesar 8,5 tahun.

Pendapatan Perkapita

Garis Kemiskinan Maret 2014 sebesar Rp. 318.262/kapita/bulan meningkat menjadi Rp. 329.181/kapita/bulan pada September 2014. Peran konsumsi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peran konsumsi bukan makanan. Pada bulan September 2014, kontribusi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) di Provinsi Jambi sebesar 77,38 persen.

Pada periode September 2014 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 1,124 mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode Maret 2014 yang menunjukkan angka sebesar 1,048, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,232 pada September 2014 sedikit menurun dari Maret 2014 yang mencapai 0,234. Hal ini memberikan indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan, sementara ketimpangan pengeluaran penduduk miskin relatif stabil pada kondisi sedang.

Jika dibandingkan target kinerja dalam RPJMN Provinsi Jambi tahun 2014 dengan nilai Rp. 684.300,-/kapita/bulan maka capaian pendapatan perkapita Provinsi Jambi hanya mencapai Rp. 329.181,-/kapita/bulan. Ini berarti capaian hanya 48,8%.

B. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2014 sebesar 89,66% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program utama sebesar 86,48% sedangkan realisasi untuk program pendukung sebesar 96,45%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program sasaran Penerapan tata ruang wilayah sebagai acuan kebijakan pembangunan kewilayahan berkelanjutan meningkat sebesar 99,92%. Sedangkan penyerapan terkecil pada program dalam sasaran Pembangunan infrastruktur energi dan listrik meningkat dengan persentase sebesar 72,23%

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2014 relatif mencukupi.



Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2014 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.71. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2014

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Kualitas ketersediaan infrastruktur meningkat	492.465.120.333,-	429.311.769.101,-	87,18
2.	Pembangunan infrastruktur energi dan listrik meningkat	10.396.276.750,-	6.494.305.700,-	72,23
3.	Kualitas ketersediaan jaringan irigasi dan air bersih meningkat	328.310.080.222,-	286.207.846.067,-	87,18
4.	Pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas meningkat	213.518.807.348,-	181.315.315.626,-	84,92
5.	Layanan kesehatan masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu meningkat	308.859.265.363,-	260.291.301.309,-	84,28
6.	Perlindungan dan kesejahteraan sosial meningkat	25.781.000.000,-	21.805.030.167,-	84,58
7.	Investasi Meningkat	17.093.780.000,-	15.873.063.814,-	92,86
8.	Kunjungan dan industri kepariwisataan meningkat	19.853.637.900,-	16.724.581.990,-	84,24
9.	Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan meningkat	33.513.681.877,-	31.378.156.558,-	94,00
10.	Kualitas kelestarian sumber daya air, dan lahan meningkat	15.759.967.793,-	14.048.647.234,-	89,14
11.	Kualitas pengelolaan mitigasi, perubahan iklim, dan kelestarian lingkungan hidup meningkat	9.458.789.200,-	9.008.279.953,-	95,24
12.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik meningkat	19.131.367.000,-	18.824.110.024,-	98,39
13.	Partisipasi dan peran perempuan dalam pembangunan meningkat	10.395.989.600,-	9.855.234.394,-	94,80
Jumlah		1.504.537.763.386,-	1.301.137.461.937,-	86,48
Belanja langsung pendukung		300.907.552.677,-	290.199.990.097,-	96,45
Total belanja langsung		1.805.445.316.063,-	1.591.199.940.584,-	88,14

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Realisasi anggaran pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2014 sebesar 86,48%. Penyerapan anggaran ini berbanding lurus dengan pelaksanaan kinerja yang secara menyeluruh telah dilaksanakan dengan baik. Oleh sebab itu, maka terdapat sisa anggaran sebesar 13,52%. Sisa anggaran ini didalamnya terkandung muatan kebijakan penghematan anggaran dan juga pengalokasian anggaran yang diperuntukkan bagi kinerja prioritas daerah, namun demikian penghematan tersebut tetap memperhatikan mutu dari capaian kinerja utama Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Alokasi anggaran berdasarkan tingkat serapan anggaran tertinggi terealisasi pada sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan capaian sebesar 98,39%. Hal ini sebanding dengan tingkat capaian kinerja meningkatnya tata kelola pemerintahan Provinsi Jambi dengan keberhasilan capaian rata-rata sangat baik dengan perolehan capaian sasaran sebesar



97,55%. Sedangkan serapan anggaran paling rendah yakni pada pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur energi dan listrik sebesar 72,23%.

3. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya serapan anggaran sebesar 100% antara lain dikarenakan :
 - a. Adanya efisiensi dana dalam pelaksanaan program.
 - b. Adanya sisa lelang/kontrak pengadaan barang dan jasa.
 - c. Kegiatan yang melibatkan pihak ketiga (rekanan) yang mendapat alokasi pagu kegiatan yang cukup besar tidak didorong sebagai prioritas utama.